PROFIL
DATA STATISTIK
SEKTORAL
PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2026



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
2026

PROFIL
DATA STATISTIK SEKTORAL
PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2026



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
2026

PROFIL DATA STATISTIK SEKTORAL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2026

Jumlah Halaman : xix+283

Naskah:
Bidang Statistik, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur

Penyunting:
Bidang Statistik, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur

Desain Cover dan Layout:
Bidang Statistik, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur

Diterbitkan dan Dicetak oleh:
© Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengkomunikasikan, dan atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Penerbit Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur

TIM PENYUSUN

Pengarah
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur

Penanggung Jawab
Kepala Bidang Statistik, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur

Penulis dan Penyunting
H. M. Adrie Dirga Sagita, S.Sos., M.Si.
Ika Wahyuni, S.E.
Untung Maryono, S.T., M.M.
Nazarruddin, S.Kom.
Nadia Paramitha Nazma, S.T.

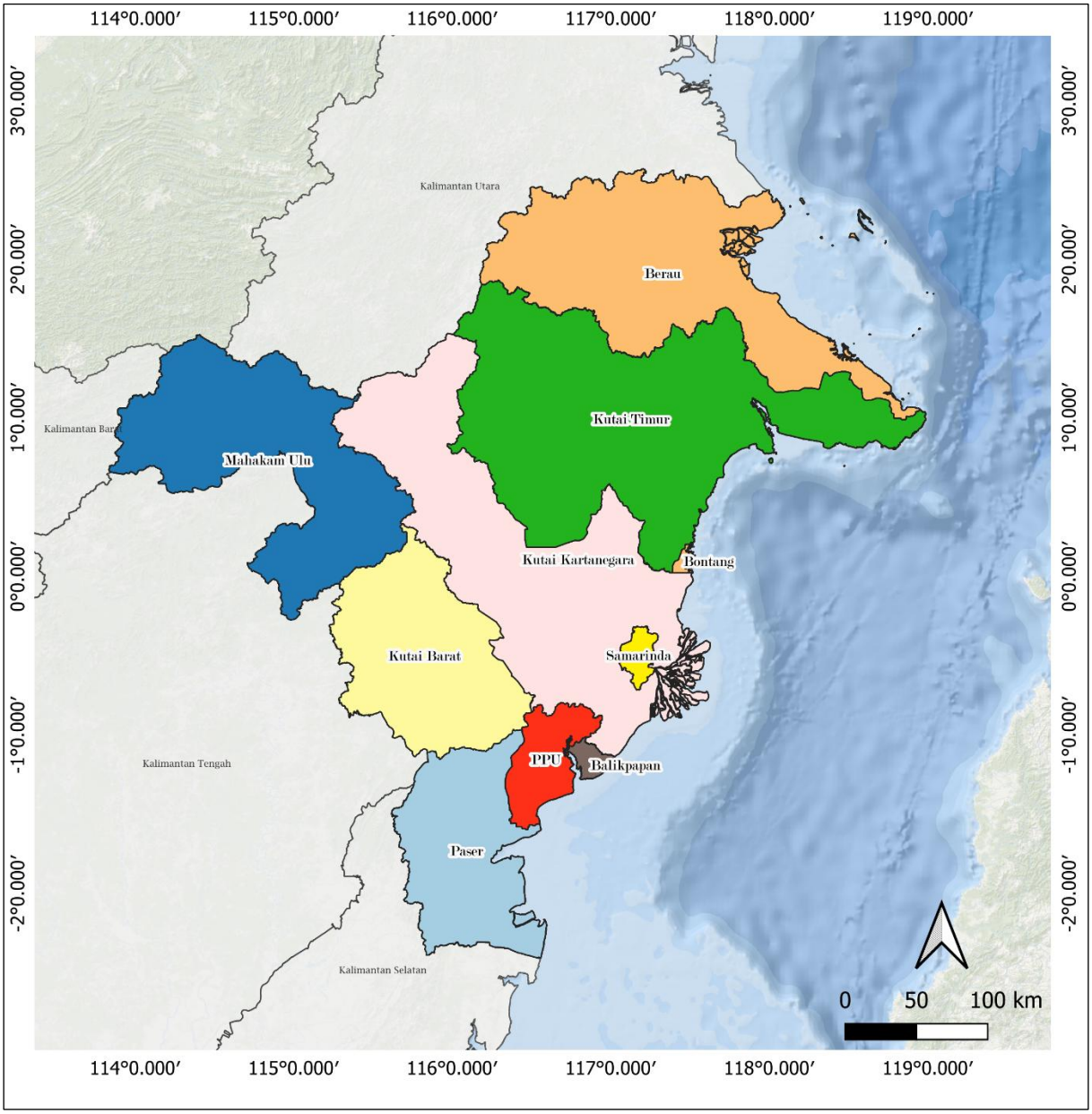
Pengolah Data
Hari Adam Suharto
Audinta Sakti Firmansyah, S.Mat.
Anisa Haura Salsa Fatih Yusuf, S.Si.
Iis Yustiani, S.Stat.
Khairina Zulfathana Mahmuda, S.Mat.
Dwi Ayu Anggraini, S.Stat.

Desain Sampul dan Tata Letak
Febri Irawan, S.E.
Eka Indah Justisiani, S.I.Kom.
Vebi Regina, S.E.
Rizmalani Syawitri, S.Sos.

Penerbit
Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur

Alamat Redaksi
Bidang Statistik
Jalan Basuki Rahmat Nomor 41, Kelurahan Sungai Pinang Luar,
Kecamatan Samarinda Kota, Samarinda, Kalimantan Timur, 75121.
Website : https://diskominfo.kaltimprov.go.id
Email : diskominfo@kaltimprov.go.id
Telp/Fax: 0541-731963

PETA KALIMANTAN TIMUR



KATA SAMBUTAN

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan petunjuk-Nya Buku Profil Data Statistik Sektoral Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 telah tersusun. Adapun tujuan dari disusunnya buku ini untuk memenuhi kebutuhan data di Kalimantan Timur dalam rangka penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan daerah dan rencana kerja pemerintah daerah yang merupakan tugas pokok instansi di lingkungan Pemerintah Kalimantan Timur.

Data yang dimuat dalam buku ini merupakan hasil kompilasi data-data statistik sektoral dari 39 Organisasi Perangkat Daerah pada tahun 2026. Buku ini menyajikan data statistik sektoral dengan pembagian tematik berupa data umum, data sosial kemasyarakatan dan kesejahteraan, data sumber pertanian dan ketahanan pangan, data perhubungan dan infrastruktur, data perdagangan, industri, koperasi dan modal, data ekonomi dan keuangan, data penanggulangan bencana dan satpol pp, dan data telekomunikasi dan pariwisata. Memiliki potensi yang signifikan dalam memberikan manfaat baik bagi pemerintah atau masyarakat, sinergi antara pemerintah sebagai penyedia data, dan masyarakat sebagai penggunanya akan terbangun ketika data pemerintah dapat diakses dengan mudah dan dapat digunakan kembali dengan tujuan inovasi dan kolaborasi.

Dengan adanya buku ini diharapkan dapat memberikan gambaran terhadap Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan data-data statistik sektoral. Penghargaan dan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi sehingga penyusunan Buku Profil Data Statistik Sektoral Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 dapat terlaksana dengan baik, semoga buku ini dapat memberikan manfaat dan menjadi rujukan resmi bagi berbagai pihak yang membutuhkan.

Kami menyadari bahwa dalam pembuatan buku data statistik sektoral ini masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan. Saran dan kritik dari semua pihak sangat diharapkan agar ke depannya buku statistik sektoral ini dapat disajikan lebih baik. Sekian dan terima kasih.

Samarinda, Oktober 2026
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Kalimantan Timur

Ririn Sari Dewi, S.IP., M.Si.

DAFTAR ISI

PETA KALIMANTAN TIMUR ..... **iii**

KATA SAMBUTAN ..... **iv**

DAFTAR ISI ..... **v**

DAFTAR TABEL ..... **vii**

DAFTAR GRAFIK ..... **xviii**

BAB I GAMBARAN UMUM **1**

1.1 Provinsi Kalimantan Timur 2

1.2 Kewilayahan Provinsi Kalimantan timur 6

1.3 Visi dan Misi Provinsi Kalimantan Timur 8

BAB II SOSIAL MASYARAKAT DAN KESEJAHTERAAN **9**

2.1 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Timur 10

2.2 Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur 20

2.3 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Timur 30

2.4 Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur 34

2.5 Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur 43

2.6 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Provinsi Kalimantan Timur 55

2.7 Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur 58

2.8 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur 62

2.9 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur 67

2.10 Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur 73

BAB III PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN **79**

3.1 Dinas Lingkungan Hidup Prov. Kalimantan Timur 80

3.2 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur .. 84

3.3 Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur 94

3.4 Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur 102

3.5 Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur 111

3.6 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur 122
BAB IV PERHUBUNGAN DAN INFRASTRUKTUR 130
4.1 Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur 131
4.2 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur 138
4.3 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur 145
4.4 Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Timur 153
4.5 Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Kalimantan Timur 158
4.6 Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Timur 161
4.7 Biro Administrasi Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur 164
BAB V PERDAGANGAN, INDUSTRI, KOPERASI DAN MODAL 167
5.1 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur 168
5.2 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur 180
5.3 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur 188
5.4 Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Kalimantan Timur 195
5.5 Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Timur 198
BAB VI EKONOMI DAN KEUANGAN 202
6.1 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 203
6.2 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 206
6.3 Badan Pendapatan Daerah 220
6.4 Biro Perekonomian Setda 226
6.5 Inspektorat 228
6.6 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 231
BAB VII PENANGGULANGAN BENCANA DAN SATPOL PP 245
7.1 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 246
7.2 Satuan Polisi Pamong Praja 254
7.3 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 262
BAB VIII TELEKOMUNIKASI DAN PARIWISATA 269
8.1 Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur 270
8.2 Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur 275

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.1 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2025 14
Tabel 2.1.2 Rasio Kepadatan Penduduk per Kabupaten/Kota Tahun 2024..... 15
Tabel 2.1.3 Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota, 2024 16
Tabel 2.1.4 Jumlah Penduduk berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2025..... 17
Tabel 2.1.5 Rasio Jenis Kelamin Menurut Kelompok Umur Tahun 2025..... 18
Tabel 2.1.6 Jumlah Penduduk yang Memiliki E-KTP di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2025 19
Tabel 2.2.1 Data Realisasi SPM (Standar Pelayanan Minimal) Dinas Sosial Prov. Kaltim Tahun 2021 - 2025..... 25
Tabel 2.2.2 Jumlah Anak Terlantar (0-21 Tahun) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur, 2023 -2024..... 26
Tabel 2.2.3 Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur, 2022-2024 27
Tabel 2.2.4 Jumlah Karang Taruna Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur, 2022-2024 28
Tabel 2.2.5 Indikator SDGs Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2025 29
Tabel 2.3.1 Jumlah Tenaga Widyaiswara Berdasarkan Gender, Jabatan dan Pendidikan, 2023 31
Tabel 2.3.2 Jumlah ASN/SDM Pemerintah Provinsi Kaltim yang telah Mengikuti Pengembangan Kompetensi Tahun 2022 – 2025..... 32
Tabel 2.3.3 Jumlah Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional, 2019-2022 33
Tabel 2.3.4 Jumlah Pengembangan Kompetensi Struktural dan Pelatihan pra Jabatan 2019-2022..... 33
Tabel 2.3.5 Jumlah Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi, 2020-2021 33

Tabel 2.4.1 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Jenis Kelamin di Provinsi Kalimantan Timur 2024-2025 36
Tabel 2.4.2 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Jabatan di Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2025 36
Tabel 2.4.3 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Pendidikan di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2025 37
Tabel 2.4.4 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Kepangkatan dan Jenis Kelamin di Provinsi Kalimantan Timur, 2023-2025 38
Tabel 2.4.5 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Dinas/Instansi Pemerintah dan Jenis Kelamin di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2025 39
Tabel 2.4.6 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Golongan Kepangkatan di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2025 42
Tabel 2.5.1 Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur, 2025 45
Tabel 2.5.2 Jumlah Rumah Sakit Kesehatan di Provinsi Kalimantan Timur, 2024-2025 46
Tabel 2.5.3 Kasus Penyakit Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Penyakit di Provinsi Kalimantan Timur, 2025 48
Tabel 2.5.4 Jumlah Penderita dan Kematian Menurut Jenis Penyakit dan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur, 2025 49
Tabel 2.5.5 Jumlah Fasilitas Kesehatan di Provinsi Kalimantan Timur, 2024-2025 50
Tabel 2.5.6 Jumlah Ibu Hamil, Melakukan Kunjungan K1, Melakukan Kunjungan K4, Kurang Energi Kronis (KEK), dan Mendapat Tablet Zat Besi (Fe) di Provinsi Kalimantan Timur, 2018-2025 51
Tabel 2.5.7 Jumlah Ibu Hamil dan Jumlah Persalinan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur, 2023 52
Tabel 2.5.8 Jumlah Bayi Lahir, Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), dan Bergizi Kurang Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur, 2025 53
Tabel 2.5.9 Jumlah Sarana Distribusi Alkes dan Industri Farmasi di Provinsi Kalimantan Timur, Tahun 2023-2025 54
Tabel 2.6.1 Status desa menurut Indeks Desa Membangun di Provinsi Kalimantan Timur, 2019-2025 57

Tabel 2.6.2 Jumlah Badan Usaha Milik Desa (Bumdes),Bumdes Yang Aktif Bumdes Yang Dibina,Pasar Desa, dan Pasar Desa Yang Dibina, 2021-2025 57
Tabel 2.7.1 Jumlah Lembaga Atlet, dan Sarana Prasarana Cabang Olahraga di Provinsi Kalimantan Timur, 2020-2025 60
Tabel 2.7.2 Jumlah Fasilitas, Organisasi, Kegiatan, dan Penghargaan dalam Bidang Olahraga dan Kepemudaan di Provinsi Kalimantan Timur, 2023-2025 ... 61
Tabel 2.8.1 Jumlah penerima beasiswa Pemprov Kalimantan Timur Tahun 2024 64
Tabel 2.8.2 Persentase dan Jumlah kelulusan per Jenjang Pendidikan di Provinsi Kalimantan Timur, 2024-2025..... 65
Tabel 2.8.3 Penyelenggaraan Kebudayaan di Provinsi Kalimantan Timur, 2024-2025 66
Tabel 2.9.1 Jumlah Kasus Kekerasan Menurut Kab/Kota di Provinsi Kalimantan TimurTahun 2020-2025 69
Tabel 2.9.2 Jumlah Anak Korban Kekerasan Menurut Kab/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025..... 70
Tabel 2.9.3 Predikat Layak Anak Menurut Kab/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025..... 71
Tabel 2.9.4 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Menurut Kab/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024..... 72
Tabel 2.10.1 Proporsi penduduk Berusia 15 Tahun ke atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi Menurut Kab/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025..... 75
Tabel 2.10.2 Rincian Penerima Program Perjalanan Religi Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2025..... 76
Tabel 2.10.3 Jumlah Mahasiswa Penerima Manfaat Gratispol Tahun 2025 77
Tabel 3.1.1 Jumlah Plasma Nutfah dilindungi di Provinsi Kalimantan Timur, 2016-2025..... 82
Tabel 3.1.2 Jumlah Sarana dan Pengendalian Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur, 2021-2025 83
Tabel 3.2.1 Populasi Ternak Sapi Perah dan Sapi Potong Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Ternak di Provinsi Kalimantan Timur (ekor), 2023-2025 88
Tabel 3.2.2 Populasi Ternak Kerbau dan Kuda Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Ternak di Provinsi Kalimantan Timur (ekor), 2023 dan 2024 89

Tabel 3.2.3 Populasi Ternak Kambing, Domba, dan Babi Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Ternak di Provinsi Kalimantan Timur (ekor), 2023-2025 90
Tabel 3.2.4 Populasi Unggas Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Ternak di Provinsi Kalimantan Timur (ekor), 2023-2025 91
Tabel 3.2.5 Produksi Daging Ternak Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Ternak di Provinsi Kalimantan Timur (ton), 2025..... 92
Tabel 3.2.6 Produksi Daging Unggas menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Unggas di Provinsi Kalimantan Timur (ton), 2025..... 93
Tabel 3.3.1 Luas Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan di Provinsi Kalimantan Timur (ha), 2025 97
Tabel 3.3.2 Produksi Kayu Bulat Menurut Jenis Produksi di Provinsi Kalimantan Timur, 2020-2025 98
Tabel 3.3.3 Produksi Kayu Olahan Menurut Jenis Produksi di Provinsi Kalimantan Timur, 2020-2025 99
Tabel 3.3.4 Jumlah Perusahaan Pemegang IUPHHK-HA dan IUPHHK-HT serta Luasnya menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur, 2022 .. 100
Tabel 3.3.5 Luas Lahan yang Direboisasi dan Direhabilitas di Wilayah Hutan di Provinsi Kalimantan Timur, 2020-2024..... 101
Tabel 3.4.1 Luas Areal, Luas Tanam, Produksi, Produktivitas, dan Tenaga Kerja Perkebunan Kelapa Sawit dan Kelapa Dalam di Provinsi Kalimantan Timur, 2024 dan 2025..... 105
Tabel 3.4.2 Luas Areal, Luas Tanam, Produksi, Produktivitas, dan Tenaga Kerja Perkebunan Karet dan Kopi di Provinsi Kalimantan Timur, 2024 dan 2025..... 105
Tabel 3.4.3 Luas Areal, Luas Tanam, Produksi, Produktivitas, dan Tenaga Kerja Perkebunan Kakao dan Lada di Provinsi Kalimantan Timur, 2024 dan 2025..... 106
Tabel 3.4.4 Luas Areal, Luas Tanam, Produksi, Produktivitas, dan Tenaga Kerja Perkebunan Cengkeh dan Aren di Provinsi Kalimantan Timur, 2024 dan 2025..... 106

Tabel 3.4.5 Luas Tanam, Produksi, Produktivitas, dan Jumlah Tenaga Kerja Karet dan Kelapa Sawit Perkebunan Besar Pemerintah di Provinsi Kalimantan Timur, 2024 dan 2025 107
Tabel 3.4.6 Luas Tanam, Produksi, Produktivitas, dan Jumlah Tenaga Kerja Karet dan Kelapa Sawit Perkebunan Besar Swasta di Provinsi Kalimantan Timur, 2024 dan 2025 107
Tabel 3.4.7 Luas Tanam, Produksi, dan Produktivitas Kelapa Sawit, Kelapa Dalam dan Karet Perkebunan Kecil/Rakyat di Provinsi Kalimantan Timur, 2024 dan 2025 108
Tabel 3.4.8 Luas Tanam, Produksi, dan Produktivitas Kakao, Lada dan Kopi Perkebunan Kecil/Rakyat di Provinsi Kalimantan Timur, 2024 dan 2025 108
Tabel 3.4.9 Luas Tanam, Produksi, dan Produktivitas Cengkeh, Aren dan Kemiri Perkebunan Kecil/Rakyat di Provinsi Kalimantan Timur, 2024 dan 2025 109
Tabel 3.4.10 Luas Tanam, Produksi, dan Produktivitas Kayu Manis, Panili dan Sagu Perkebunan Kecil/Rakyat di Provinsi Kalimantan Timur, 2024 dan 2025 109
Tabel 3.4.11 Luas Tanam, Produksi, dan Produktivitas Pala, Pinang dan Tebu Perkebunan Kecil/Rakyat di Provinsi Kalimantan Timur, 2024 dan 2025 110
Tabel 3.5.1 Perkembangan Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Tanaman Pangan menurut Jenis di Provinsi Kalimantan Timur, 2024 dan 2025..... 117
Tabel 3.5.2 Perkembangan Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Tanaman Sayuran dan Buah-buahan Semusim menurut Jenis di Provinsi Kalimantan Timur, 2024 dan 2025 118
Tabel 3.5.3 Perkembangan Produksi, Produktivitas, dan Tanaman Menghasilkan Tanaman Buah-buahan menurut Jenis di Provinsi Kalimantan Timur, 2024 dan 2025 119
Tabel 3.5.4 Perkembangan Luas Areal, Produktivitas, dan Produksi Tanaman Bio Farmaka di Provinsi Kalimantan Timur, 2024 dan 2025 120
Tabel 3.5.5 Perkembangan Luas Areal, Produktivitas, dan Produksi Tanaman Hias di Provinsi Kalimantan Timur, 2024 dan 2025 121
Tabel 3.6.1 Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Budidaya Menurut Jenis Usaha di Provinsi Kalimantan Timur, 2024 dan 2025 126

Tabel 3.6.2 Jumlah Nelayan dan Pembudidaya Ikan di Provinsi Kalimantan Timur, 2024 dan 2025 126
Tabel 3.6.3 Rumah Tangga Perikanan Menurut Jenis Usaha di Provinsi Kalimantan Timur, 2024 dan 2025 127
Tabel 3.6.4 Luas Wilayah, Ekosistem, dan Lahan Perikanan di Provinsi Kalimantan Timur, 2024 dan 2025 128
Tabel 4.1.1 Jumlah Penumpang Pesawat Udara Menurut Bandara di Kalimantan Timur, 2025 134
Tabel 4.1.2 Jumlah Barang yang Dimuat dan Dibongkar Melalui Bandara di Kalimantan Timur, 2025 134
Tabel 4.1.3 Jumlah Angkutan Umum di Provinsi Kalimantan Timur, 2025 135
Tabel 4.1.4 Sebaran Izin Trayek Perkotaan Menurut Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur, 2025 136
Tabel 4.1.5 Jumlah Izin Trayek Angkutan Umum di Provinsi Kalimantan Timur, 2025 137
Tabel 4.2.1 Capaian Penanganan Air Baku di Provinsi Kalimantan Timur, 2024 141
Tabel 4.2.2 Luas Sawah Terlayani Irigasi di Provinsi Kalimantan Timur, 2025 142
Tabel 4.2.3 Panjang Jalan Nasional dan Jalan Provinsi di Provinsi Kalimantan Timur Menurut Kondisi (km), 2021-2024 143
Tabel 4.2.4 Panjang Jalan Nasional dan Jalan Provinsi di Provinsi Kaliman tan Timur Menurut Jenis Permukaan Jalan (km), 2021-2024 144
Tabel 4.3.1 Jumlah Koleksi Buku Di Perpustakaan Daerah Provinsi Kaltim Tahun 2019-2025 148
Tabel 4.3.2 Jumlah Pengunjung Perpustakaan Daerah Provinsi Kaltim Berdasarkan Segmentasi Pengunjung, 2019-2025 149
Tabel 4.3.3 Jumlah Peminjam Buku dan Jumlah Buku yang Dipinjam dari Perpustakaan Daerah Provinsi Kaltim, 2019-2025 149
Tabel 4.3.4 Jumlah Perpustakaan di Provinsi Kaltim Menurut Klasifikasinya, 2019-2025 150
Tabel 4.3.5 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) di Provinsi Kaltim Menurut Kabupaten/Kota, 2023-2025 151
Tabel 4.3.6 Tingkat Kegemaran Membaca (TGM) di Provinsi Kaltim Menurut Kabupaten/Kota, 2023-2025 152

Tabel 4.4.1 Indikator SDGs Biro Organisasi, 2021-2025 156
Tabel 4.4.2 Indikator RPJMD Biro Organisasi, 2021-2025 156
Tabel 4.4.3 Jumlah Organisasi Daerah Menurut Jenisnya di Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (lembaga), 2021-2024 157
Tabel 4.5.1 Jumlah Perjanjian Kerjasama dan Nota Kesepakatan Dalam dan Luar Negeri Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, 2018-2024 160
Tabel 4.5. 2 Indikator RPJMD Biro Pemerintah dan Otonomi, 2021-2023..... 160
Tabel 4.6.1 Daftar Data Indeks Kualitas kebijakan Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Timur, 2025..... 163
Tabel 4.6.2 Jumlah Produk Hukum yang Diterbitkan di Provinsi Kalimantan Timur, 2018-2025..... 163
Tabel 4.7. 1 Capaian Indikator Kinerja, 2024–2025..... 165
Tabel 5.1.1 Data Pelayanan Ketenagakerjaan, 2019-2025 171
Tabel 5.1.2 Data Prioritas Nasional Bidang Pengawasan, 2024-2025 172
Tabel 5.1.3 Data Prioritas Nasional Bidang Pengembangan, 2024-2025..... 173
Tabel 5.1.4 Pencari Kerja Terdaftar, Lowongan Kerja Terdaftar, dan Penempatan/ Pemenuhan Tenaga Kerja Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Kalimantan Timur, 2023 174
Tabel 5.1.5 Pencari Kerja Terdaftar Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin, 2023..... 175
Tabel 5.1.6 Upah Minimum Kabupaten/Kota/Provinsi di Provinsi Kalimantan Timur, 2024..... 176
Tabel 5.1. 7 Data Pelatihan pada BLKI Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023-2025 177
Tabel 5.1.8 Data Ketenagakerjaan, 2019-2025 178
Tabel 5.1.9 Data Transmigrasi, 2019-2025..... 179
Tabel 5.2.1 Data UMKM Tahun 2023-2025 182
Tabel 5.2.2 Persentase Koperasi Aktif Provinsi Kalimantan Timur, 2023 183
Tabel 5.2.3 Jumlah Koperasi Unit Desa (KUD) dan Kegiatannya di Provinsi Kalimantan Timur, 2020-2025..... 184
Tabel 5.2.4 Jumlah Koperasi Per Bentuk Anggota, 2019-2025 184
Tabel 5.2.5 Jumlah Koperasi Perjenis Usaha, 2023-2025..... 185
Tabel 5.2.6 Data Koperasi, 2023-2025 185

Tabel 5.2.7 Data Potensi Industri, 2023-2025 186
Tabel 5.2.8 Jumlah UKM Berdasarkan Jenis Usaha di Provinsi Kalimantan Timur, 2021-2023 186
Tabel 5.2.9 Jumlah Koperasi Menurut Prinsip Keuangan, 2022 -2025 187
Tabel 5.2.10 Data Jumlah Pasar, 2020 -2025 187
Tabel 5.2.11 Jumlah Wirausaha di Provinsi Kalimantan Timur, 2023-2025 187
Tabel 5.3.1 Data Pertambangan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 - 2025 192
Tabel 5.3.2 Produksi Minyak Bumi dan Gas Bumi di Provinsi Kalimantan Timur, 2021- 2025 193
Tabel 5.3.3 Produksi dan Pemasaran Batubara di Provinsi Kalimantan Timur (ton), 2021-2023 193
Tabel 5.3.4 Rasio Desa Berlistrik dan Rasio Elektrifikasi Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur (%), 2023 194
Tabel 5.3. 5 Luas lahan Pertambangan Kalimantan Timur (Ha), 2019- 2025 194
Tabel 5.4.1 Jumlah Penyedia Usaha Mikro Dan Kecil (UMK) yang Produknya Ditayangkan dalam Katalog Elektronik Provinsi Kalimantan Timur, 2025 196
Tabel 5.5.1 Indeks Inovasi Daerah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur, 2022-2025 199
Tabel 5.5.2 Indeks Daya Saing Daerah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur, 2024-2025 200
Tabel 6.1.1 Data Perencanaan Pembangunan Daerah Provinlsi Kalimantan Timur Tahun 2025 204
Tabel 6.1.2 Luas Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021–2023 205
Tabel 6.2.1 Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 207
Tabel 6.2.2 Nilai Aset Sarana Prasarana Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2025 209
Tabel 6.2.3 Alokasi Dana Perimbangan (Dana Transfer) TA 2023-2025 211
Tabel 6.2.4 Pendapatan Provinsi Kalimantan Timur TA 2024 212
Tabel 6.2.5 Status Kepemilikan Gedung Bangunan Kantor Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2025 214
Tabel 6.3.1 Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022-2024 (Rupiah) 221

Tabel 6.3.2 Objek Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2022 222
Tabel 6.3.3 Dana Alokasi Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022-2024 223
Tabel 6.3.4 Dana Alokasi Khusus Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022-2024 223
Tabel 6.3.5 Data Penerimaan Retribusi Daerah Tahun 2023-2024 (rupiah)..... 224
Tabel 6.3.6 Realisasi Dana Perimbangan dan Pendapatan Transfer Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 224
Tabel 6.3.7 Data Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Tahun 2022-2023 225
Tabel 6.4.1 Kuota Penugasan Penyediaan dan Pendistribusian Kuota Volume Penyalur Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Tahun 2019–2021 Provinsi Kalimantan Timur..... 226
Tabel 6.4.2 Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2022..... 227
Tabel 6.5.1 Zona Integritas Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023-2025 229
Tabel 6.5.2 Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2022..... 230
Tabel 6.6.1 Rekapitulasi Perizinan E-PTSP Menurut Sektor Usaha di Provinsi Kalimantan Timur, Januari-September 2025 233
Tabel 6.6.2 Realisasi Proyek Penanaman Modal Dalam Negeri Menurut Sektor Ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur, Triwulan II 2025 234
Tabel 6.6.3 Realisasi Proyek Penanaman Modal Dalam Negeri Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur, April-Juni 2025..... 236
Tabel 6.6.4 Realisasi Penanaman Modal Asing di Provinsi Kalimantan Timur, Tahun 2015-2025..... 237
Tabel 6.6.5 Realisasi Proyek Penanaman Modal Asing Menurut Sektor Ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur, April-Juni 2025 238
Tabel 6.6.6 Realisasi Proyek Penanaman Modal Asing Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur, April-Juni 2025 240
Tabel 6.6.7 Jumlah Realisasi Investasi di Provinsi Kalimantan Timur, 2014-2024 241
Tabel 6.6.8 Jumlah Realisasi Investasi di Provinsi Kalimantan Timur, 2014-2024 242
Tabel 6.6.9 Jumlah Perizinan Berusaha OSS RBA Menurut Sektor Usaha di Provinsi Kalimantan Timur, Januari-September 2025 243
Tabel 7.1.1 Jumlah Lembaga Swadaya Masyarakat Tahun 2021-2025 248

Tabel 7.1.2 Jumlah Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2024 249
Tabel 7.1.3 Jumlah Kegiatan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2024 249
Tabel 7.1.4 Jumlah Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) se-Provinsi Kalimantan Timur, 2025 251
Tabel 7.1.5 Data Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Se-Provinsi Kalimantan Timur, 2022-2024 252
Tabel 7.1.6 Data Pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) se-Provinsi Kalimantan Timur, 2023-2025..... 253
Tabel 7.2.1 Data Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kaltim Tahun 2024 dan 2025 258
Tabel 7.2.2 Indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tahun 2022-2024 259
Tabel 7.2.3 Indikator Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2023 260
Tabel 7.2.4 Jumlah Aparat Satuan Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 dan 2025..... 261
Tabel 7.3.1 Data Bencana Alam Provinsi Kalimantan Timur 2021-2025 264
Tabel 7.3.2 Frekuensi Terjadinya Bencana Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2025..... 265
Tabel 7.3.3 Kawasan Rawan Bencana Alam Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2025..... 266
Tabel 7.3. 4 Kerusakan Kawasan Akibat Bencana di Provinis Kalimantan Timur Tahun 2021-2025 267
Tabel 8.1.1 Persentase Blankspot di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 – 2024 272
Tabel 8.1.2 Data Pos Telekomunikasi Provinsi Kaltim 2022–2025..... 273
Tabel 8.1.3 RPJMD Diskominfo Provinsi Kalimantan Timur, 2020–2024 274
Tabel 8.1.4 Jumlah Penyiaran Media Elektronik Yang Masuk, 2021– 2025 274
Tabel 8.2.1 Jumlah Hotel Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019–2025 277
Tabel 8.2.2 Jumlah Objek Wisata di Provinsi Kalimantan Timur, 2021–2024..... 278
Tabel 8.2.3 Jumlah perusahaan atau agen biro perjalanan wisata di kaltim 2016–2023..... 279

Tabel 8.2.4 Jumlah Tenaga Kerja di Hotel berbintang Provinsi Kalimantan Timur Berdasarkan Akomodasi dan Jenis Kelamin Tahun 2024..... 280
Tabel 8.2.5 Data Pramuwisata dan Toko Cinderamata Provinsi Kalimantan Timur, 2016- 281
Tabel 8.2.6 Data Jumlah Usaha Restoran dan Rumah Makan di Kalimantan Timur Tahun 2017–2023..... 281

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1.1 Piramida Penduduk Provinsi Kalimantan Timur, 2025 11
Grafik 2.1.2 Rasio Ketergantungan Penduduk Provinsi Kalimantan Timur, 2022 12
Grafik 2.2.1 Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial menurut Jenisnya di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 24
Grafik 2.3.1 Jumlah Peserta dan Alumni Diklat pada Pelatihan Dasar CPNS, Pelatihan Kepemimpinan, Pelatihan Teknis, Pelatihan Sosial Kultural dan Pelatihan Fungsional,Tahun 2022-2025 30
Grafik 2.4.1 Pegawai Negeri Sipil Menurut Jabatan di Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 35
Grafik 2.5.1 Jumlah Tenaga Kesehatan di provinsi Kalimantan Timur, 2023-2025 43
Grafik 2.6.1 Status Desa Menurut Indeks Desa Membangun di Provinsi Kalimantan Timur, 2021-2025 55
Grafik 2.7.1 Jumlah Atlet Bela Diri di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023–2025..... 59
Grafik 2.8.1 Jumlah Lulusan pada Jenjang Pendidikan di Provinsi Kalimantan Timur, 2024-2025 63
Grafik 2.9.1 Jumlah Kasus Kekerasan di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2025..... 68
Grafik 2.10.1 Jumlah Total Penerima Beasiswa Gratispol dalam Kaltim Tahun 2025 74
Grafik 3.1.1 Jumlah Plasma Nutfah dilindungi di Provinsi Kalimantan Timur, 2016-2025..... 80
Grafik 3.2.1 Populasi Ternak Potong Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Ternak di Provinsi Kalimantan Timur (ekor), 2025..... 84
Grafik 3.2.2 Produksi Daging Ternak Menurut Jenis Ternak di Provinsi Kalimantan Timur (ton), 2024 86
Grafik 3.3.1 Produksi Kayu Bulat menurut Jenis Produksi di Provinsi Kalimantan Timur, 2020-2025 95
Grafik 3.3.2 Produksi Kayu Olahan Menurut Jenis Produksi di Provinsi Kalimantan Timur, 2020-2025 96
Grafik 3.4.1 Produksi Perkebunan Menurut Jenis Tanaman di Provinsi Kalimantan Timur (ton), 2024 dan 2025 103
Grafik 3.4.2 Produksi Perkebunan Menurut Jenis Tanaman (Selain Kelapa Sawit) di Provinsi Kalimantan Timur (ton), 2024 dan 2025..... 103
Grafik 3.5.1 Grafik Perkembangan Luas Panen dan Produksi Padi di Kalimantan Timur, 2021-2025 116
Grafik 3.6.1 Produksi Perikanan Budidaya Menurut Jenis di Provinsi Kalimantan Timur, 2025 125

Grafik 4.1.1 Jumlah Penumpang Pesawat Udara Menurut Bandara di Kalimantan Timur, 2025 132
Grafik 4.1.2 Sebaran Izin Trayek Perkotaan Menurut Kabupaten/ Kota di Kalimantan Timur, 2025 133
Grafik 4.2.1 Panjang Jalan Nasional di Provinsi Kalimantan Timur menurut Kondisinya (km),2021-2024 138
Grafik 4.2.2 Panjang Jalan Provinsi Timur menurut Kondisinya (km) di Provinsi Kalimantan, 2021-2024 139
Grafik 4.3.1 Jumlah Pengunjung Perpustakaan Daerah Provinsi Kaltim Berdasarkan segmentasi Pengunjung, 2022-2025 146
Grafik 4.3.2 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) di Provinsi Kaltim, 2025 147
Grafik 4.4.1 Persentase Perangkat Daerah di Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang telah melaksanakan survey kepuasan masyarakat (SKM) sesuai standar (%), 2019-2023 154
Grafik 4.4.2 Persentase Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah di Provinsi Kalimantan Timur yang Memperoleh Predikat Minimal B (BAIK) (%), 2019-2023 155
Grafik 4.5.1 Jumlah Perjanjian Kerjasama dan Nota Kesepakatan Dalam dan Luar Negeri Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, 2021-2024 159
Grafik 4.6.1 Jumlah Produk Hukum yang diterbitkan di Provinsi Kalimantan Timur, 2021-2025 162
Grafik 5.1.1 Jumlah Pencari kerja yang Mendaftar dan yang Ditempatkan di Provinsi Kalimantan Timur, 2019-2025 170
Grafik 5.2.1 Jumlah UMKM di Provinsi Kalimantan Timur, 2023-2025 180
Grafik 5.3 1 Produksi Batubara menurut Jenis Perusahaan di Provinsi Kalimantan Timur, 2022- 2025 189
Grafik 6.3.1 Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Timur, 2021-2022 220
Grafik 6.6.1 Realisasi Investasi PDMN Provinsi Kalimantan Timur, 2015-2025 232
Grafik 7.1. 1 Jumlah Anggota Forum Kewaspadaan Dini Se-Provinsi Kalimantan Timur, 2025 247
Grafik 7.2.1 Jumlah Aparat Satuan Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2025 257
Grafik 7.3.1 Target dan Realisasi Indeks Risiko Bencana Provinsi Kalimantan Timur... 263
Grafik 8.1.1 Jumlah Penyiaran Media Elektronik Yang Masuk ke Provinsi Kalimantan Timur, 2021-2025 270
Grafik 8.2.1 Data Pramuwisata dan Toko Cinderamata Provinsi Kalimantan Timur, 2016–2025 275



PROFIL DATA STATISTIK SEKTORAL

Provinsi Kalimantan Timur 2026



Potensi Daerah



Pertambangan
(Batu Bara)



Perkebunan
(Kelapa Sawit)



Perhutanan
(Kayu Olahan)

Dasar hukum pembentukan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara adalah Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Undang-undang ini mengatur tantang pemindahan, pembangunan, dan penyelenggaraan pemerintah di IKN Nusantara, termasuk pengolahan wilayah tata ruang, serta peran pemerintah pusat dan daerah.

BAB I
GAMBARAN UMUM

1.1 Provinsi Kalimantan Timur

Kalimantan Timur pada awalnya merupakan wilayah yang jarang dihuni dan memiliki sejumlah kerajaan, antara lain Kerajaan Kutai, Kesultanan Kutai Kartanegara ing Martadipura, Kesultanan Pasir, dan Kesultanan Bulungan. Menurut Hikayat Banjar, wilayah Pasir, Kutai, Berau, dan Karasikan merupakan bagian dari wilayah taklukan Kesultanan Banjar sejak zaman Hindu. Pada paruh pertama abad ke-17, Kesultanan Makassar (Gowa-Tallo) memperoleh wilayah di bagian timur dan tenggara Kalimantan sebagai tempat berdagang melalui perjanjian dengan Kesultanan Banjar. Selanjutnya, pada 13 Agustus 1787, Sultan Tahmidullah II dari Banjar menyerahkan Kalimantan Timur kepada VOC Belanda. Penyerahan wilayah tersebut kemudian ditegaskan kembali melalui traktat 1 Januari 1817 dan pada 4 Mei 1826 kepada pemerintahan kolonial Hindia Belanda.

Pada 1846, Belanda mulai menempatkan Asisten Residen di Samarinda untuk wilayah Borneo Timur. Kalimantan Timur kemudian dibentuk sebagai provinsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 dengan APT Pranoto sebagai gubernur pertama. Daerah Tingkat II di Kalimantan Timur selanjutnya dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959. Dalam perkembangannya, wilayah Kalimantan Timur kembali mengalami pemekaran hingga terbentuk Provinsi Kalimantan Utara pada 2012.



Daerah-daerah Tingkat II di dalam wilayah Kalimantan Timur, dibentuk berdasarkan Undang-undang No. 27 Tahun 1959, Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1959 No.9). Lembaran Negara No.72 Tahun 1959 terdiri atas:

Pembentukan 2 kotamadya, yaitu:

1. Kotamadya Samarinda, dengan Kota Samarinda sebagai ibu kota nya dan sekaligus sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan timur.
2. Kotamadya Balikpapan, dengan Kota Balikpapan sebagai ibu kota nya dan merupakan pintu gerbang Kalimantan Timur.

Pembentukan 4 Kabupaten, yaitu:

1. Kabupaten Kutai, dengan ibu kota nya Tenggarong.
2. Kabupaten Pasir, dengan ibu kota nya Tanah Grogot.
3. Kabupaten Berau, dengan ibu kota nya Tanjung Redeb.
4. Kabupaten Bulungan, dengan ibu kota nya Tanjung Selor

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 1981, maka dibentuk Kota Administratif Bontang di wilayah Kabupaten Kutai dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1989, maka dibentuk pula Kota Madya Tarakan di wilayah Kabupaten Bulungan. Dalam Perkembangan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan di dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah, maka dibentuk 2 Kota dan 4 kabupaten, yaitu:

1. Kabupaten Kutai Barat, ibu kota nya di Sendawar.
2. Kabupaten Kutai Timur, dengan ibu kota nya di Sangatta.
3. Kabupaten Malinau, dengan ibu kota nya di Malinau.
4. Kabupaten Nunukan, dengan ibu kota nya di Nunukan.
5. Kabupaten Bontang (peningkatan kota administrative Bontang menjadi kotamadya

Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2002, maka Kabupaten Pasir mengalami pemekaran dan pemekarannya bernama Kabupaten Penajam Paser Utara. Pada tanggal 17 Juli 2007, DPR RI sepakat menyetujui berdirinya Tana Tidung sebagai kabupaten baru di Kalimantan Timur, maka jumlah keseluruhan Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur menjadi 14 wilayah. Pada tahun yang sama, nama Kabupaten Pasir berubah menjadi Kabupaten Paser berdasarkan PP No. 49 Tahun 2007.

Tahun 2012, giliran Provinsi Kalimantan Timur yang dimekarkan dan melahirkan Provinsi Kalimantan Utara (UU No.20 Tahun 2012). Lima Kota/Kabupaten bergabung ke

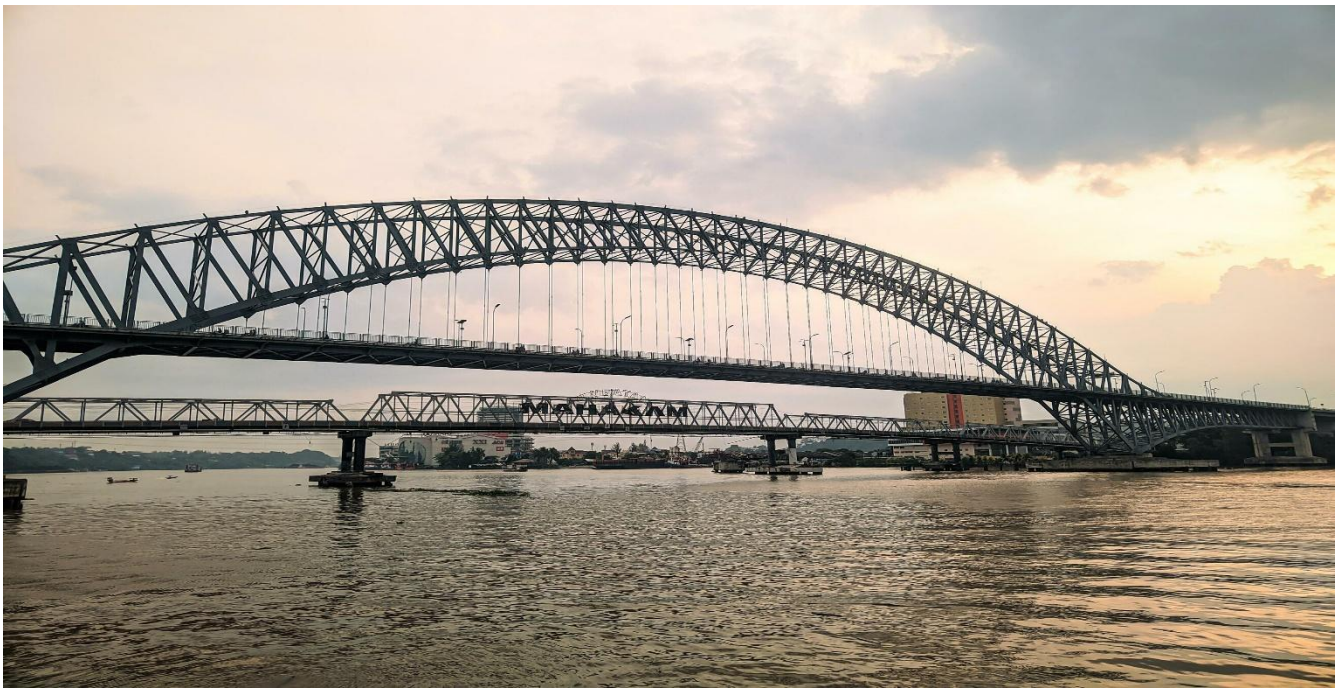
dalam Provinsi Kalimantan Utara, yaitu Kota Tarakan, Kabupaten Nunukan,Kabupaten Malinau, Kabupaten Tana Tidung dan Kabupaten Bulungan. Hingga jumlah Kota/Kabupaten yang tergabung dalam Provinsi Kalimantan Timur berkurang dari 14 Kota/Kabupaten menjadi 9 Kota/Kabupaten.

Tahun 2012 melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur, wilayah Kabupaten Kutai Barat dimekarkan dan melahirkan Kabupaten termuda dikaltim, yaitu Kabupaten Mahakam Ulu, yang mengenapkan dalam Provinsi Kalimantan Timur menjadi 10 Kota/Kabupaten.





1.2 Kewilayahan Provinsi Kalimantan timur



Kalimantan Timur merupakan salah satu Provinsi terluas keempat setelah Papua, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat, memiliki potensi sumber daya alam melimpah dimana sebagian besar potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal. Sumber daya alam dan hasil-hasilnya sebagian besar di ekspor ke luar negeri, sehingga Provinsi ini merupakan penghasil devisa utama bagi negara, khususnya dari sektor pertambangan, kehutanan dan hasil lainnya.

Secara administratif Provinsi ini memiliki batas wilayah sebelah Utara berbatasan dengan Kalimantan Utara, sebelah Timur berbatasan dengan sebagian (12 Mil) Selat Makasar dan Laut Sulawesi, sebelah selatan berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Selatan, sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Tengah dan Provinsi Kalimantan Barat serta Negara Bagian Serawak Malaysia Timur. Kalimantan Timur memiliki luas wilayah daratan 127.346,92 km^2 dan luas pengelolaan laut 25.656 km^2 terletak antara 113º44’ Bujur Timur dan119º00’ Bujur Timur serta diantara 2º33’ Lintang Utara dan 2º25’ Lintang Selatan.

Provinsi ini mempunyai topografi bergelombang dari kemiringan landai sampai curam, dengan ketinggian berkisar antara 0-1500 meter diatas permukaan laut dengan kemiringan antara 0-60 persen. Daerah dataran rendah pada umunya dijumpai pada kawasan sepanjang sungai. Sedangkan daerah perbukitan dan pegunungan memiliki

ketinggian rata-rata lebih dari 1000 meter di atas permukaan laut dengan kemiringan 300 persen, terdapat dibagian barat laut yang berbatasan langsung dengan wilayah Malaysia.

Kondisi topografi tersebut sangat berpengaruh terhadap peluang budidaya suatu jenis komoditi, potensi dan persediaan air, dinamika hidrologi dan kerentanan terhadap erosi. Dilihat dari topografi, sebagian besar atau 43,35 persen wilayah daratan termasuk dalam kemiringan diatas 40 persen persen dan 43,22 persen terletak pada ketinggian 100-1000 m diatas permukaan laut, sehingga pemanfaatan lahan di Provinsi Kalimantan Timur harus memperhatikan karakteristik lahan tersebut.

Kalimantan Timur merupakan salah satu pintu gerbang pembangunan di wilayah Indonesia bagian Timur. Daerah yang juga dikenal sebagai gudang kayu dan hasil pertambangan ini mempunyai ratusan sungai yang tersebar pada hampir semua kabupaten/kota dimana sungai menjadi salah satu sarana angkutan utama di samping angkutan darat. Adapun sungai terpanjang di Kalimantan Timur adalah Sungai Mahakam. Sungai ini berawal dari Mahakam Ulu, melintasi wilayah Kutai Barat dan berhilir di Kutai Kartanegara dan Kota Samarinda.

1.3 Visi dan Misi Provinsi Kalimantan Timur

VISI DAN MISI PEMBANGUNAN KALTIM 2025-2029
"KALTIM SUKSES MENUJU GENERASI EMAS"

1) Mewujudkan sumber daya manusia yang unggul dan sejahtera.
2) Mewujudkan Kalimatan Timur sebagai pusat ekonomi baru yang inklusi berbasis berbasis Industrialisasi komoditas unggulan daerah.
3) Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Profesional, dan berintegritas berbasis teknologi informasi.
4) Meningkatkan kualitas kehidupan beragama, penguatan budaya dan kearifan lokal.
5) Mewujudkan Pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Jumlah Ibu Hamil, Melakukan Kunjungan K1 dan Kunjungan K4 di Provinsi Kalimantan Timur, Tahun 2018-2025





BAB II

SOSIAL MASYARAKAT DAN KESEJAHTERAAN

2.1 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Timur

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Provinsi Kalimantan Timur berdiri pada tahun 2023 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang ditindaklanjuti melalui Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 43 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

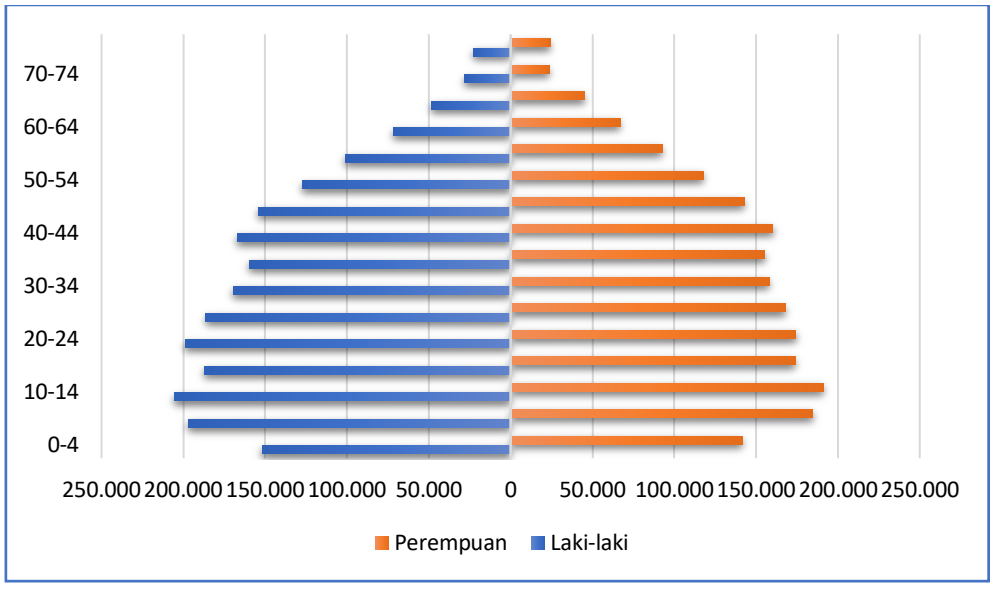
Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 43 Tahun 2023, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Timur merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang mempunyai tugas pokok membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.



Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, penyajian data kependudukan pada skala kabupaten/kota bersumber dari data kependudukan yang telah melalui proses konsolidasi dan pembersihan oleh kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri.

Dengan demikian, data yang digunakan dalam penyusunan Perkembangan Kependudukan mengacu pada DAK 2 atau Data Agregat Kependudukan Semester II dari Kementerian Dalam Negeri yang diterbitkan sebanyak dua kali dalam satu tahun. Apabila terdapat perbedaan antara data DAK 2 dengan data kependudukan yang tersedia di daerah, maka data yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian Dalam Negeri menjadi acuan sebagai data resmi kependudukan.

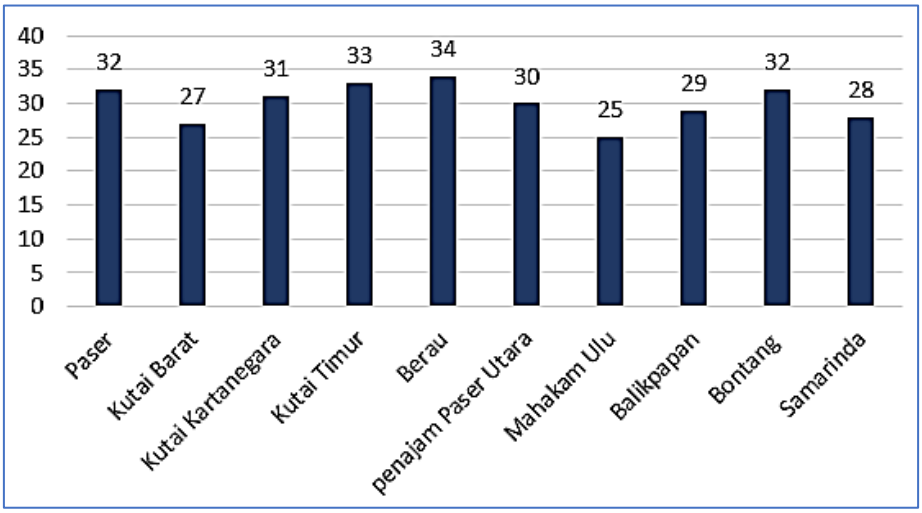
Grafik 2.1.1 Piramida Penduduk Provinsi Kalimantan Timur, 2025



Pada diagram piramida penduduk ini, kelompok umur 0–4 tahun berjumlah 293.315 jiwa atau 6,99% dari total penduduk. Batang pada kelompok 5–9 tahun dan 10–14 tahun lebih lebar, masing-masing mencapai 381.351 jiwa (9,09%) dan 396.418 jiwa (9,45%). Kelompok 10–14 tahun merupakan kelompok dengan jumlah penduduk terbesar. Besarnya jumlah penduduk usia anak menunjukkan perlunya perhatian terhadap ketersediaan layanan pendidikan dan kesehatan sesuai kebutuhan tiap kelompok umur.

Penduduk usia 15–64 tahun berjumlah 2.932.043 jiwa (69,89%), dengan kelompok 20–24 tahun mencapai 372.964 jiwa (8,89%). Jumlah penduduk mulai mengecil pada kelompok umur yang lebih tua. Penduduk berusia 65 tahun ke atas tercatat 191.831 jiwa (4,57%). Walaupun proporsinya masih relatif kecil, kebutuhan layanan bagi lansia perlu disiapkan sejak sekarang seiring kemungkinan perubahan struktur umur penduduk dan meningkatnya harapan hidup. Karena itu, perencanaan ketenagakerjaan, layanan kesehatan, pelayanan lansia, dan pemenuhan kebutuhan sosial dasar perlu memperhatikan komposisi penduduk saat ini serta perubahannya pada tahun-tahun mendatang.

Grafik 2.1.2 Rasio Ketergantungan Penduduk Provinsi Kalimantan Timur, 2022



Rasio Ketergantungan, juga dikenal sebagai *dependency ratio*, dapat berfungsi sebagai indikator kasar untuk menggambarkan kondisi ekonomi suatu negara, baik sebagai negara maju atau yang sedang berkembang. Dependency ratio adalah indikator demografi yang signifikan, di mana semakin tinggi rasio ketergantungan, semakin besar beban yang harus ditanggung oleh populasi produktif (usia 15-64 tahun) dalam membiayai baik populasi yang belum produktif (usia 0-14 tahun) maupun populasi yang tidak lagi produktif (usia 65 tahun ke atas). Di sisi lain, rasio ketergantungan yang lebih rendah mengindikasikan beban yang lebih ringan yang harus ditanggung oleh populasi produktif untuk membiayai kelompok penduduk yang masih tergolong non-produktif.

Konsep ini mencerminkan seberapa besar proporsi penduduk yang bergantung pada populasi usia kerja. Rasio ketergantungan dihitung dengan membagi total populasi yang tidak produktif dengan total populasi yang produktif. Secara umum, rasio

ketergantungan di Kalimantan Timur sekitar 30. Ini berarti setiap 100 penduduk usia produktif di Kalimantan Timur harus menanggung beban dari sekitar 30 penduduk yang belum atau tidak lagi produktif, seperti anak-anak atau lansia.

Angka ini masih berada di bawah angka 50 yang dianggap cukup rendah. Meskipun persentase penduduk lanjut usia (>65 tahun) terhadap total populasi di Kalimantan Timur kecil (3,6%), jumlah absolutnya cukup besar, mencapai 167.843 jiwa. Karena jumlah penduduk usia lanjut yang tinggi ini, diperlukan upaya pembangunan infrastruktur seperti panti jompo, rumah sakit, dan lainnya untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Apabila melihat data dalam tabel penduduk yang tidak produktif, Kota Samarinda menonjol dengan populasi usia muda (0-14 tahun) yang berjumlah 207.586 jiwa. Kabupaten Mahakam Ulu memiliki rasio ketergantungan terendah, yaitu 25, yang kemungkinan besar disebabkan oleh banyaknya perkebunan di wilayah tersebut yang menyerap tenaga kerja dari penduduk setempat. Di sisi lain, Kabupaten Berau memiliki rasio ketergantungan tertinggi, mencapai 34.



Tabel 2.1.1 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2025

Indikator	2024	2025	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Jumlah Penduduk Laki-laki	1.984.638	2.020.220	Jiwa
Jumlah Penduduk Perempuan	2.138.665	2.174.738	Jiwa
Jumlah Penduduk	4.123.303	4.194.958	Jiwa
Rasio Jenis Kelamin	107,76	107,65	%

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 2.1.2 Rasio Kepadatan Penduduk per Kabupaten/Kota Tahun 2024

Kabupaten/Kota	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Luas KM^2	Kepadatan Penduduk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Paser	160.276	149.391	309.667	11.906,96	26,01
Kutai Barat	98.069	88.512	186.581	13.709,92	13,61
Kutai Kartanegara	420.744	386.220	806.964	25.988,92	31,05
Kutai Timur	240.268	208.582	448.850	31.051,71	14,45
Berau	158.927	140.078	299.005	31.735,19	13,76
Penajam Paser Utara	104.765	97.302	202.067	2.923,73	69,11
Mahakam Ulu	21.192	18.523	39.715	19.449,41	2,04
Kota Balikpapan	387.112	370.306	757.418	512,25	1.478,61
Kota Bontang	99.151	92.660	191.811	163,14	1.175,74
Kota Samarinda	448.161	433.064	881.225	716,25	1.230,33
Kalimantan Timur	**2.138.665**	**1.984.638**	**4.123.303**	**127.346,92**	**32.38**

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 2.1.3 Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota, 2024

Kabupaten/Kota	Penduduk Kaltim Tahun 2023			Penduduk Kaltim Tahun 2024			Pertambahan Penduduk 2023-2024	Pertumbuhan Penduduk 2023-2024
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Paser	156.903	146.521	303.424	160.276	149.391	309.667	6.243	2,06%
Kutai Barat	94.596	85.523	180.119	98.069	88.512	186.581	6.462	3,59%
Kutai Kartanegara	410.731	377.382	788.113	420.744	386.220	806.964	18.851	2,39%
Kutai Timur	229.815	199.825	429.640	240.268	208.582	448.850	19.210	4,47%
Berau	149.271	131.727	280.998	158.927	140.078	299.005	18.007	6,41%
Penajam Paser Utara	101.816	94,750	196.566	104.765	97.302	202.067	5.501	2,80%
Mahakam Ulu	20.553	17.945	38.498	21.192	18.523	39.715	1.217	3,16%
Kota Balikpapan	377.458	361.074	738.532	387.112	370.306	757.418	18.886	2,56%
Kota Bontang	98.222	91.746	189.968	99.151	92.660	881.225	1.843	2,24%
Kota Samarinda	438.477	423.401	861.876	448.161	433.064	191.811	19.347	0,97%
Kalimantan Timur	**2.077.842**	**1.929.894**	**4.007.736**	**2.138.665**	1.984.638	**4.123.303**	**115.567**	**2.88%**

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 2.1.4 Jumlah Penduduk berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2025

Kelompok Umur	Laki-laki	%	Perempuan	%	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
00-04	151.910	3,62	141.405	3,37	293.315	6,99
05-09	196.732	4,69	184.619	4,40	381.351	9,09
10-14	205.253	4,89	191.165	4,56	396.418	9,45
15-19	187.239	4,46	173.768	4,14	361.007	8,61
20-24	198.643	4,74	174.321	4,16	372.964	8,89
25-29	186.208	4,44	167.743	4,00	353.951	8,44
30-34	169.371	4,04	158.109	3,77	327.480	7,81
35-39	159.535	3,80	155.325	3,70	314.860	7,51
40-44	167.006	3,98	160.313	3,82	327.319	7,80
45-49	153.967	3,67	142.916	3,41	296.883	7,08
50-54	127.377	3,04	117.843	2,81	245.220	5,85
55-59	101.006	2,41	92.648	2,21	193.654	4,62
60-64	71.789	1,71	66.916	1,60	138.705	3,31
65-69	48.239	1,15	45.251	1,08	93.490	2,23
70-74	27.968	0,67	23.521	0,56	51.489	1,23
>75	22.495	0,54	24.357	0,58	46.852	1,12
Jumlah	**2.174.738**	**51,84**	**2.020.220**	**48,16**	**4.194.958**	**100.00**

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 2.1.5 Rasio Jenis Kelamin Menurut Kelompok Umur Tahun 2025

Kelompok Umur	Laki-laki	%	Perempuan	%	Sex Ratio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
00-04	151.910	6,99	141.405	7,00	107
05-09	196.732	9,05	184.619	9,14	139
10-14	205.253	9,44	191.165	9,46	145
15-19	187.239	8,61	173.768	8,60	132
20-24	198.643	9,13	174.321	8,63	140
25-29	186.208	8,56	167.743	8,30	132
30-34	169.371	7,79	158.109	7,83	120
35-39	159.535	7,34	155.325	7,69	113
40-44	167.006	7,68	160.313	7,94	118
45-49	153.967	7,08	142.916	7,07	109
50-54	127.377	5,86	117.843	5,83	90
55-59	101.006	4,64	92.648	4,59	71
60-64	71.789	3,30	66.916	3,31	51
65-69	48.239	2,22	45.251	2,24	34
70-74	27.968	1,29	23.521	1,16	20
>75	22.495	1,03	24.357	1,21	16
Jumlah	**2.174.738**	**100.00**	**2.020.220**	**100.00**	**1.538**

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 2.1.6 Jumlah Penduduk yang Memiliki E-KTP di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2025

Indikator	2024	2025	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Jumlah Penduduk Laki-laki	1.498.840	1.540.305	Jiwa
Jumlah Penduduk Perempuan	1.386.786	1.427.918	Jiwa
Jumlah Total Penduduk	2.883.368	2.953.144	Jiwa

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Timur

2.2 Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur

Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Sejak dibentuknya Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 02 Tahun 1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur, sebagai wujud kepedulian Pemerintah Daerah dalam menangani permasalahan sosial yang ada di daerah. Dalam perjalanannya Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur telah mengalami beberapa kali penyempurnaan dasar hukum yaitu:

1. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 03 Tahun1 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatat Kejra Dinas-dinas Provinsi Kalimantan Timur
2. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
3. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 45 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
4. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 17 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur.
5. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 75 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
7. Peraturan Daerah Nomor Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
8. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 57 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur.
9. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 92 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur.
10. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur.

Dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur dibantu Sekretaris, Kepala Bidang Pelayanan Dan RehabilitasiSosial, Kepala Bidang Perlindungan Dan Jaminan Sosial, Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial, Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin dan Kepala UPTD Pada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur. Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur memiliki Visi ”TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL”. Dan Misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan perlindungan dan jaminan sosial
2. Meningkatkan keberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
3. Mengembangkan prakarsa dan peran aktif masyarakat.
4. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan

Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari Misi dan merupakan sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu tertentu ke depan (Kapan). Berdasarkan uraian di atas, maka Dinas /sosial Provinsi Kalimantan Timur menetapkan tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatkan ketahanan sosial
2. Meningkatkan kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
3. Meningkatkan kualitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penanganan Penyadang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
4. Meningkatkan keberdayaan Sumber Daya Aparatur.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara merata secara nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran atau bulanan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategik instansi pemerintah. Fokus utama sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber data daerah dalam kegiatan organisasi/pemerintah daerah. Sasaran bersifat spesifik, dapat dinilai, diukur, menantang namun dapat dicapai, berorientasi padahasil dan dapat dicapai dalam periode I (satu) tahun. Berdasarkan pengertian tersebut, maka Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur menetapkan sasaran dalam periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 sebagi berikut:

1. Meningkatnya kualitas hidup Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
2. Meningkatkan potensi sosial Penyadang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
3. Meningkatkan kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penanganan Penyadang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

4. Meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur.

Sebagai upaya pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Prov. Kaltim maka ditetapkan strategi sebagai berikut:

1. Perluasan dan peningkatan akses penyelenggaraan kesejahteraan sosial
2. Meningkatkan kualitas pelayanan dan bantuan dasar kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial.
3. Memperkuat tanggung jawab dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui kelembagaan sosial, dan upayaupaya kesejahteraan sosial perorangan, kelompok masyarakat dandunia usaha.
4. Mengoptimalkan pemanfataan sarana dan prasarana dalam rangka menunjang akuntabilitas pelaksanaan kegiatan.



Guna mencapaian tujuan dan sasaran Pembangunan kesejahteraan sosial di Prov. Kalimantan Timur maka disusunlah suatu kebijakan yang terdiri dari:

1. Meningkatkan pemberdayaan fakir miskin, penyandang cacat, dan kelompok rentan sosial lainnya.
2. Meningkatkan kualitas hidup bagi PMKS terhadap pelayanan sosial dasar, fasilitas pelayanan publik, dan jaminan kesejahteraan sosial;
3. Mengembangkan dan menyerasikan kebijakan untuk penanganan masalahmasalah strategis yang menyangkut masalah kesejahteraan sosial;
4. Meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan sosial dan dunia usaha dalam penelenggaraan kesejahteraan sosial.
5. Meningkatkan kapasitas masyarakat agar lebih siap siaga dalam penanggulangan bencana.
6. Perluasan jangkauan pelayanan sosial dengan mengembangkan komitmen dan aksi Masyarakat sebagai pelaku usaha kesejahteraan sosial.
7. Pelaksanaan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan melalui kegiatan pemeriksaan secara berkala, monitoring dan evaluasi serta reviu.

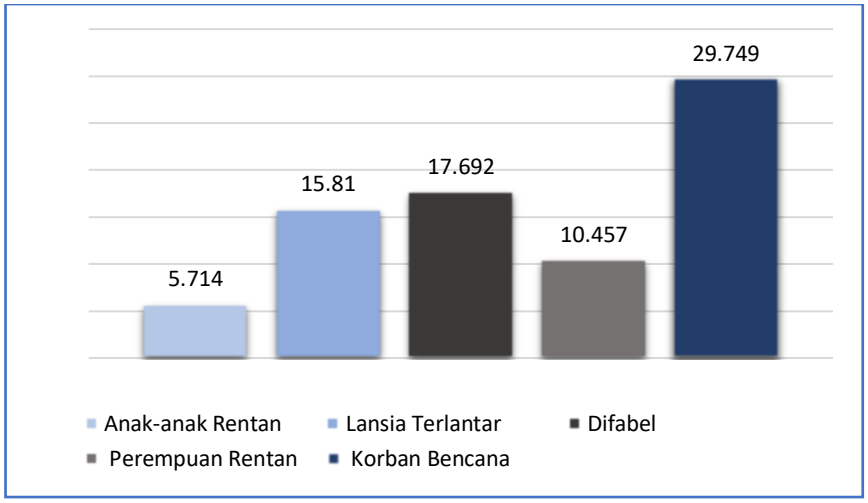


Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur telah merilis sejumlah data yang memberikan gambaran tentang kondisi sosial di wilayah tersebut dalam beberapa tahun terakhir. Data ini mencakup berbagai aspek, termasuk pelayanan kepada lansia, anak terlantar, pekerja sosial masyarakat (PSM), serta organisasi dan karang taruna di setiap kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur. Melalui data-data yang



terkumpul, kita dapat mengidentifikasi tren dan perubahan yang terjadi dalam bidang sosial selama beberapa periode hingga tahun 2025.

Grafik 2.2.1 Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial menurut Jenisnya di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025



Berdasarkan data tahun 2025, jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan perbedaan yang cukup besar menurut jenis permasalahannya. Dari lima kelompok yang ditampilkan, korban bencana menjadi kelompok dengan jumlah paling banyak dibandingkan jenis PMKS lainnya.

Jumlah korban bencana tercatat sebanyak 29.749 orang, diikuti kelompok difabel sebanyak 17.692 orang dan lansia terlantar sebanyak 15.810 orang. Sementara itu, jumlah perempuan rentan tercatat sebanyak 10.457 orang. Ketiga kelompok tersebut menunjukkan bahwa persoalan kesejahteraan sosial di Kalimantan Timur tidak hanya berkaitan dengan keterlantaran, tetapi juga mencakup kondisi kerentanan sosial serta kebutuhan pelayanan bagi penyandang disabilitas.

Adapun anak-anak rentan memiliki jumlah paling sedikit di antara kelompok yang ditampilkan, yaitu sebanyak 5.714 orang. Meskipun jumlahnya lebih rendah dibandingkan kategori lainnya, kelompok ini tetap membutuhkan perhatian karena berkaitan dengan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan dasar anak.

Secara keseluruhan, data tahun 2025 menunjukkan bahwa korban bencana merupakan kelompok PMKS yang paling dominan di Kalimantan Timur, sedangkan anak-anak rentan merupakan kelompok dengan jumlah terendah. Data ini dapat menjadi gambaran dalam menentukan prioritas pelayanan sosial, terutama dalam penanganan korban bencana, pelayanan bagi penyandang disabilitas, perlindungan lansia terlantar, serta kelompok masyarakat rentan lainnya.

Tabel 2.2.1 Data Realisasi SPM (Standar Pelayanan Minimal) Dinas Sosial Prov. Kaltim Tahun 2021 - 2025

Standar Pelayanan Minimal Sandang di Panti	2021	2022	2023	2024	2025	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(5)	(6)
Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang menerima paket sandang di dalam panti	0	10	21	80	50	Paket
Jumlah anak terlantar yang menerima paket sandang di dalam panti	252	250	253	6,056	265	Paket
Jumlah lanjut usia terlantar yang menerima paket sandang di dalam panti	110	110	110	1,550	1,768	Orang
Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang Menerima paket Sandang di dalam panti	0	87	82	48	60	Orang
Jumlah korban becana yang mendapatkan sandang	70,166	43,057	1,000	3,926	300	KK

Sumber: Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 2.2.2 Jumlah Anak Terlantar (0-21 Tahun) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur, 2023 -2024

Kabupaten/Kota	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)
Paser	1.583	1.583	194
Kutai Barat	53	289	136
Kutai Kartanegara	523	649	1.264
Kutai Timur	287	757	155
Berau	584	585	544
Penajam Paser Utara	164	164	422
Mahakam Ulu	-	-	56
Kota Balikpapan	614	699	1.709
Kota Bontang	436	886	309
Kota Samarinda	1.129	2.019	1.639
Kalimantan Timur	**5.473**	**7.631**	**6.448**

Sumber: Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 2.2.3 Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur, 2022-2024

Kabupaten/Kota	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)
Paser	69	69	75
Kutai Barat	24	24	25
Kutai Kartanegara	57	57	30
Kutai Timur	5	5	141
Berau	20	20	20
Penajam Paser Utara	95	95	61
Mahakam Ulu	4	4	3
Kota Balikpapan	34	34	34
Kota Bontang	60	60	59
Kota Samarinda	300	300	374
Kalimantan Timur	**668**	**668**	**822**

Sumber: Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 2.2.4 Jumlah Karang Taruna Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur, 2022-2024

Kabupaten/Kota	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)
Paser	62	61	92
Kutai Barat	179	22	36
Kutai Kartanegara	63	228	228
Kutai Timur	81	0	139
Berau	76	76	76
Penajam Paser Utara	54	53	53
Mahakam Ulu	-	-	6
Kota Balikpapan	34	41	41
Kota Bontang	16	16	16
Kota Samarinda	59	70	70
Kalimantan Timur	**624**	**567**	**757**

Sumber: Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 2.2.5 Indikator SDGs Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 – 2025

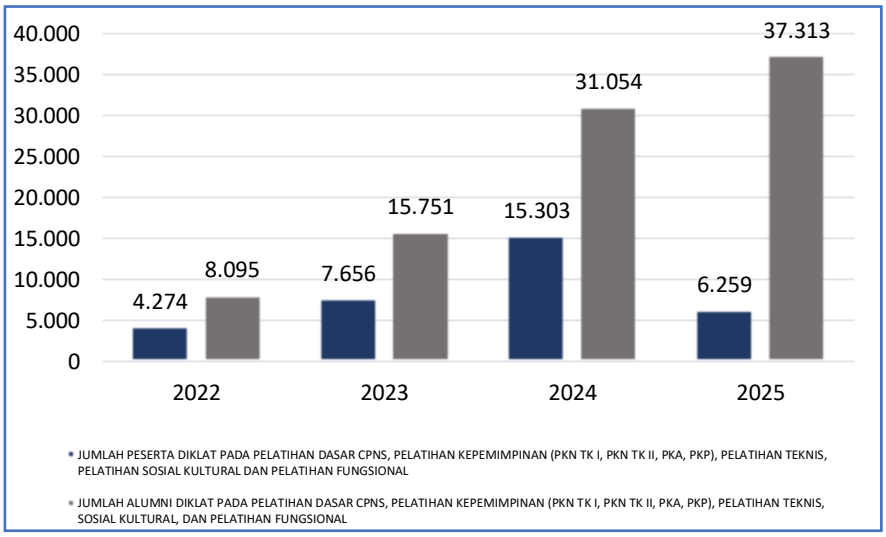
Kabupaten/Kota	2021	2022	2023	2024	2025	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jumlah Penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas	0	10	21	30	50	Orang
Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus	10	10	10	10	5	Kab/Kota
Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program keluarga Harapan	65.387	71.751	53.662	39.412	61.219	Keluarga Penerima Manfaat
Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana	2.030	2.868	39.366	15.826	17.870	Jiwa
Pendamping psikosial korban bencana sosial	2.03	2.868	1.584	-	600	Jiwa

Sumber: Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur

2.3 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Timur

Di era saat ini, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kalimantan Timur memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. BPSDM bertanggung jawab dalam mengembangkan SDM yang unggul, adaptif terhadap perkembangan teknologi dan inovasi, serta memiliki kepedulian terhadap isu lingkungan. Melalui berbagai program pendidikan, pelatihan, dan pengembangan kompetensi, BPSDM berupaya mempersiapkan sumber daya manusia di Kalimantan Timur agar mampu menghadapi tantangan global, mendukung pertumbuhan ekonomi, serta berkontribusi terhadap pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Grafik 2.3.1 Jumlah Peserta dan Alumni Diklat pada Pelatihan Dasar CPNS, Pelatihan Kepemimpinan, Pelatihan Teknis, Pelatihan Sosial Kultural dan Pelatihan Fungsional Tahun 2022-2025



Dalam periode Tahun 2022–2025, jumlah peserta dan alumni pendidikan dan pelatihan pada Pelatihan Dasar CPNS, Pelatihan Kepemimpinan, Pelatihan Teknis, Pelatihan Sosial Kultural, dan Pelatihan Fungsional menunjukkan perkembangan yang cukup dinamis. Jumlah peserta meningkat dari 4.274 orang pada Tahun 2022 menjadi 7.656 orang pada Tahun 2023 dan 15.303 orang pada Tahun 2024, kemudian menurun menjadi 6.259 orang pada Tahun 2025. Sementara itu, jumlah alumni meningkat secara konsisten dari 8.095 orang pada Tahun 2022 menjadi 15.751 orang pada Tahun 2023, 31.054 orang



pada Tahun 2024, dan mencapai 37.313 orang pada Tahun 2025. Perkembangan tersebut menunjukkan pentingnya pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan dalam mendukung peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur di Kalimantan Timur. Meskipun jumlah peserta pada Tahun 2025 mengalami penurunan, jumlah alumni justru mencapai nilai tertinggi selama periode pengamatan. Oleh karena itu, perencanaan program pelatihan perlu terus disesuaikan dengan kebutuhan kompetensi aparatur dan prioritas organisasi agar alokasi sumber daya dapat dilakukan secara lebih efisien serta pelatihan yang diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan aktual. Evaluasi terhadap perubahan jumlah peserta dan alumni dari tahun ke tahun juga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan program pengembangan kompetensi aparatur.

Tabel 2.3.1 Jumlah Tenaga Widyaiswara Berdasarkan Gender, Jabatan dan Pendidikan, 2023

Kategori		Widyaiswara
(1)		(2)
Jabatan	Pertama	-
	Muda	4
	Madya	7
	Utama	5
Jenis Kelamin	Laki-laki	12
	Perempuan	4
Pendidikan	S2	12
	S3	4

Sumber: Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kaltim

Tabel di atas memberikan informasi mengenai tenaga Widyaiswara berdasarkan jabatan, jenis kelamin, dan pendidikan pada tahun 2022. Dalam hal jabatan, terdapat 4 orang di tingkat Muda, 7 orang di tingkat Madya, dan 4 orang di tingkat Utama. Terlihat bahwa laki-laki mendominasi kehadiran dengan 11 orang, sedangkan wanita berjumlah 4 orang. Sementara dalam hal pendidikan, mayoritas Widyaiswara memiliki gelar S2, yang terdiri dari 12 individu, dan 3 orang memiliki pendidikan pada tingkat S3. Meskipun distribusi gender masih tidak seimbang, tren pendidikan yang tinggi menunjukkan upaya untuk meningkatkan kualifikasi dan kompetensi dalam menyampaikan pelatihan berkualitas.

Tabel 2.3.2 Jumlah ASN/SDM Pemerintah Provinsi Kaltim yang telah Mengikuti Pengembangan Kompetensi Tahun 2022 – 2025

Jumlah ASN/SDM	2022	2023	2024	2025	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Persentase Asn Yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Fungsional	24,75	11,42	1,79	10,63	%
Jumlah Asn Yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Fungsional	3.992	3.097	656	2.201	orang
Persentase Asn Yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Manajerial	25,22	54,14	14,65	16,81	%
Jumlah Asn Yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Manajerial	4.069	14.687	5.378	3.480	orang
Persentase Sdm/Aparatur Yang Bersertifikasi Kompetensi	1,04	1,25	0,8	0,99	%
Jumlah Sdm/Aparatur Yang Bersertifikasi Kompetensi	168	339	103	208	orang
Persentase Sdm/Aparatur Yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Daerah	30,94	13,06	14,65	100	%
Jumlah Sdm/Aparatur Yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Daerah	4.991	3.542	5.379	20.708	orang
Persentase Sdm/Aparatur Yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Teknis	15,11	12,8	5,08	90,83	%
Jumlah Sdm/Aparatur Yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Teknis	2.438	3.472	1.866	18.810	orang
Persentase Sdm/Aparatur Yang Telah Memperoleh Sertifikasi/Sttp Pengembangan Kompetensi	100	100	100	100	%

Sumber: Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kaltim

Tabel 2.3.3 Jumlah Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional, 2019-2022

Tahun	Pelatihan	Bimtek	Workshop	Seminar Daring	Sosialisassi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2019	19	-	-	-	-
2020	42	-	68	1.090	-
2021	97	156	156	-	39
2022	416	305	305	-	531

Sumber: Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kaltim

Tabel 2.3.4 Jumlah Pengembangan Kompetensi Struktural dan Pelatihan pra Jabatan 2019-2022

Tahun	PIM IV	PKP	PKA	LATSAR CPNS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2019	1.120	-	-	-
2020	-	120	34	250
2021	-	286	140	1.486
2022	-	40	75	1.427

Sumber: Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kaltim

Tabel 2.3.5 Jumlah Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi, 2020-2021

Tahun	Sharing Session	Coummunity Of Practices	Seminar Daring
(1)	(2)	(3)	(4)
2020	131	-	-
2021	-	-	842
2022	173	439	-

Sumber: Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kaltim

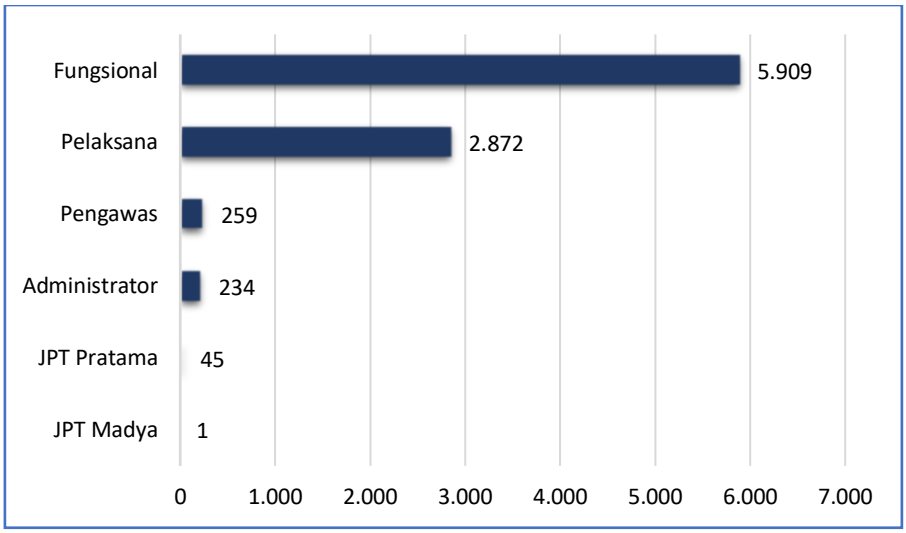
2.4 Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Badan Kepegawaian Daerah merupakan salah satu perangkat daerah yang berperan dalam mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian. Pembentukannya didasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Dalam menjalankan tugasnya, Badan Kepegawaian Daerah memiliki tanggung jawab dalam perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi, serta pengendalian teknis, terutama yang berkaitan dengan dokumentasi dan informasi kepegawaian. Pelaksanaan tugas tersebut menuntut adanya pengelolaan data kepegawaian yang tertib, akurat, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penyediaan dan pengelolaan data kepegawaian mengacu pada Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengembangan Database Pegawai Negeri Sipil. Pedoman tersebut menjadi dasar dalam penyusunan serta pengembangan basis data agar informasi kepegawaian dapat tersaji secara sistematis dan berkualitas. Melalui pengelolaan data yang baik, informasi kepegawaian diharapkan dapat lebih mudah diakses dan dimanfaatkan oleh berbagai pihak yang berkepentingan, sekaligus mendukung pelaksanaan pengelolaan kepegawaian yang lebih tertata dan efektif.



Grafik 2.4.1 Pegawai Negeri Sipil Menurut Jabatan di Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025



Pada Tahun 2025, jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur didominasi oleh jabatan fungsional dengan total 5.909 orang, disusul jabatan pelaksana sebanyak 2.872 orang. Kedua kelompok ini mencakup mayoritas PNS, yang menunjukkan bahwa struktur birokrasi di tingkat provinsi lebih menitikberatkan pada tenaga teknis dan pendukung operasional pemerintahan.

Di sisi lain, jumlah PNS pada jabatan struktural relatif lebih sedikit. Jabatan pengawas tercatat sebanyak 259 orang, administrator 234 orang, JPT Pratama 45 orang, dan JPT Madya hanya 1 orang. Hal ini menggambarkan bahwa jabatan manajerial di tingkat atas hanya ditempati sebagian kecil pegawai, sementara sebagian besar diarahkan untuk mendukung fungsi teknis dan pelayanan publik.

Kondisi ini sejalan dengan arah kebijakan reformasi birokrasi yang mendorong penguatan jabatan fungsional. Dengan komposisi tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur diharapkan mampu meningkatkan kinerja pelayanan publik sekaligus menjaga efisiensi organisasi pemerintahan.

Tabel 2.4.1 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Jenis Kelamin di Provinsi Kalimantan Timur 2024-2025

Pegawai Negeri Sipil	2024	2025
(1)	(2)	(3)
Jumlah PNS Laki-Laki	4.839	4.624
Jumlah PNS Perempuan	4.663	4.624
Jumlah Total PNS	9.502	9.323

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 2.4.2 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Jabatan di Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2025

Jabatan	2024	2025
(1)	(2)	(5)
JPT Madya	1	1
JPT Pratama	54	45
Administrator	255	234
Pengawas	278	259
Pelaksana	2.88	2.872
Fungsional	6.034	5.909
Jumlah	**9.502**	**9.320**

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 2.4.3 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Pendidikan di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2025

Tingkat Pendidikan	2024	2025
(1)	(2)	(3)
S3	36	49
S2	1.676	1.716
Sarjanan S1/DIV	9.147	12.259
Diploma III /Akta II I/Sarjanan Muda	1.971	2.385
Diploma I.IV Akta I	15	13
SMA/Sederajat	9	7
SMP/Sederajat	1.443	4.200
Jumlah/Total	134	165

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 2.4.4 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Kepangkatan dan Jenis Kelamin di Provinsi Kalimantan Timur, 2023-2025

Tingkat Pendidikan	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)
Golongan I			
- Laki-laki	77	47	38
- Perempuan	7	3	0
- Jumlah	84	50	38
Golongan II			
- Laki-laki	997	430	804
- Perempuan	495	1.279	409
- Jumlah	1.492	804	1.213
Golongan III			
- Laki-laki	2.857	3.195	2.869
- Perempuan	3.271	6.028	3.222
- Jumlah	6.128	2.869	6.091
Golongan IV			
- Laki-laki	1.176	1.045	1.004
- Perempuan	1.117	2.121	1.006
- Jumlah	2.293	1.004	2.101

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 2.4.5 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Dinas/Instansi Pemerintah dan Jenis Kelamin di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2025

Perangkat Daerah	2024			2025		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Badan Kepegawaian Daerah	34	32	66	37	35	72
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	27	10	37	28	10	38
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	33	6	39	29	6	35
Badan Pendapatan Daerah	167	110	277	175	112	287
Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah	28	13	41	29	13	42
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	57	43	100	49	43	92
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	29	20	49	26	19	45
Badan Penghubung Jakarta	9	10	19	8	9	17
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	51	26	77	48	33	81
Biro Administrasi Pembangunan	15	8	23	15	8	23
Biro Administrasi Pimpinan	24	10	34	25	9	34
Biro Hukum	10	11	21	10	11	21
Biro Kesejahteraan Rakyat	9	6	15	10	4	14
Biro Organisasi	12	9	21	13	8	21
Biro Pemerintahan Dan Otonomi Daerah	19	12	31	16	13	29
Biro Pengadaan Barang Dan Jasa	35	13	48	37	13	50
Biro Perekonomian	19	6	25	15	7	22
Biro Umum	66	23	89	62	25	87

Lanjutan Tabel 2.4.5

Perangkat Daerah	2024			2025		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral	51	15	66	50	15	65
Dinas Kehutanan	401	111	512	401	113	514
Dinas Kelautan Dan Perikanan	83	34	117	80	33	113
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	-	1	1	5	1	6
Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	19	21	40	11	6	17
Dinas Kesehatan	95	79	174	91	81	172
Dinas Komunikasi Dan Informatika	33	16	49	37	18	55
Dinas Lingkungan Hidup	33	22	55	33	20	53
Dinas Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura	117	81	198	110	84	194
Dinas Pariwisata	22	15	37	21	16	37
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang & Perum Rakyat	202	74	276	198	78	276
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa	20	16	36	17	18	35
Dinas Pemuda Dan Olahraga	55	27	82	56	27	83
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	22	9	31	24	9	33
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	1.919	2.483	4.402	1.805	2.412	4.217
Dinas Perhubungan	56	17	73	65	21	86

Lanjutan Tabel 2.4.5

Perangkat Daerah	2024			2025		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	36	23	59	31	21	52
Dinas Perkebunan	43	28	71	41	24	65
Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	29	36	65	25	37	62
Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	37	36	73	37	36	73
Dinas Sosial	105	48	153	97	44	141
Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	89	47	136	89	57	146
Inspektorat	53	28	81	68	52	120
Kantor Gubernur	2	-	2	2	0	2
Rsjd Atma Husada Mahakam	60	95	155	53	92	145
Rsud Abdul Wahab Sjahranie	289	557	846	281	541	822
Rsud Dr. Kanujoso Djatiwibowo	210	357	567	202	351	553
Satuan Polisi Pamong Praja	57	5	62	87	26	113
Sekretariat Daerah	3	2	5	2	1	3
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	54	12	66	48	12	60

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 2.4.6 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Golongan Kepangkatan di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2025

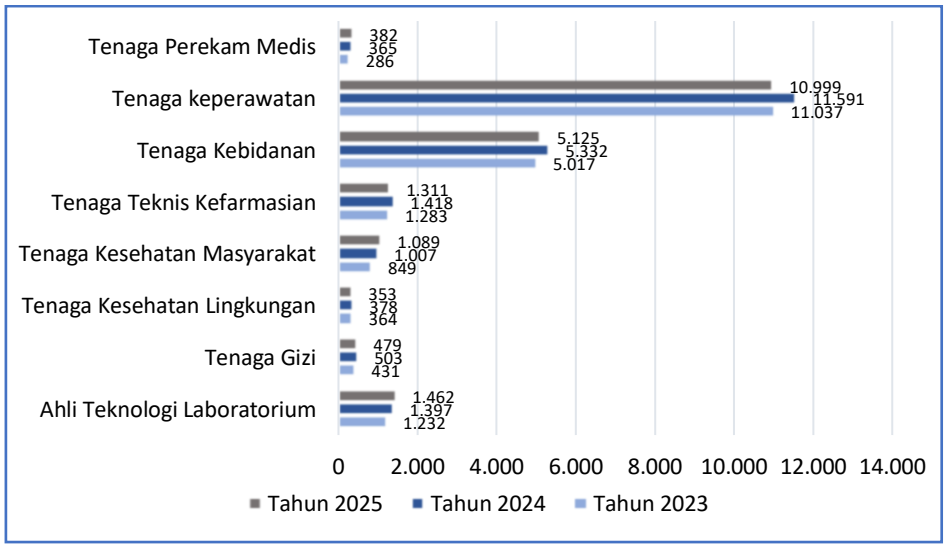
Golongan	2024	2025
(1)	(2)	(3)
Jumlah PNS Berdasarkan Golongan I	51	38
Jumlah PNS Berdasarkan Golongan II	1.314	1.184
Jumlah PNS Berdasarkan Golongan III	6.026	6.050
Jumlah PNS Berdasarkan Golongan IV	2.111	2.051

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur

2.5 Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur

Data dari Dinas Kesehatan memiliki peranan penting dalam menggambarkan kondisi kesehatan masyarakat serta berbagai upaya pemerintah dalam meningkatkan sektor kesehatan di wilayah ini. Data tersebut menjadi sumber informasi yang berharga untuk mengukur capaian indikator kesehatan, seperti angka kesakitan, angka kematian, cakupan imunisasi, akses terhadap pelayanan kesehatan, hingga upaya penanggulangan penyakit endemik. Melalui data ini, dapat diketahui sejauh mana berbagai program kesehatan telah dilaksanakan dan memberikan dampak terhadap kualitas hidup masyarakat. Dengan mengkaji lebih lanjut informasi yang terdapat dalam buku statistik sektoral ini, dapat diperoleh gambaran yang lebih luas mengenai tantangan dan peluang dalam meningkatkan sektor kesehatan di Provinsi Kalimantan Timur.

Grafik 2.5.1 Jumlah Tenaga Kesehatan di provinsi Kalimantan Timur, 2023-2025



Selama periode tahun 2023 hingga 2025, jumlah tenaga kesehatan di Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan perkembangan yang cukup dinamis. Sebagian besar jenis tenaga kesehatan mengalami peningkatan pada tahun 2024, meskipun beberapa kategori kembali mengalami penurunan pada tahun 2025. Peningkatan yang cukup terlihat terjadi pada tenaga kesehatan masyarakat yang bertambah dari 849 orang pada tahun 2023 menjadi 1.007 orang pada tahun 2024, kemudian kembali meningkat menjadi 1.089 orang pada tahun 2025. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kapasitas tenaga yang berperan dalam upaya promotif dan preventif di bidang kesehatan.



Peningkatan juga terlihat pada tenaga ahli teknologi laboratorium medik yang terus bertambah dari 1.232 orang pada tahun 2023 menjadi 1.397 orang pada tahun 2024 dan 1.462 orang pada tahun 2025. Tenaga perekam medis juga mengalami peningkatan secara konsisten, dari 286 orang menjadi 365 orang dan kemudian 382 orang. Sementara itu, tenaga gizi meningkat dari 431 orang pada tahun 2023 menjadi 503 orang pada tahun 2024, meskipun sedikit menurun menjadi 479 orang pada tahun 2025.

Berbeda dengan beberapa kategori yang mengalami peningkatan, sejumlah tenaga kesehatan justru menurun pada tahun 2025. Tenaga keperawatan turun dari 11.591 orang pada tahun 2024 menjadi 10.999 orang pada tahun 2025, setelah sebelumnya meningkat dari 11.037 orang pada tahun 2023. Penurunan juga terjadi pada tenaga kebidanan, dari 5.332 menjadi 5.125 orang, serta tenaga teknis kefarmasian dari 1.418 menjadi 1.311 orang pada periode yang sama.

Secara keseluruhan, tenaga keperawatan tetap menjadi kategori dengan jumlah terbesar selama periode tahun 2023–2025, diikuti tenaga kebidanan. Sementara itu, tenaga kesehatan masyarakat dan ahli teknologi laboratorium medik menunjukkan tren peningkatan hingga tahun 2025. Perubahan jumlah pada beberapa kategori menunjukkan pentingnya perhatian terhadap ketersediaan dan pemerataan sumber daya manusia di bidang kesehatan. Ke depan, peningkatan jumlah tenaga kesehatan perlu diimbangi distribusi yang merata agar pelayanan kesehatan dapat menjangkau seluruh masyarakat di Provinsi Kalimantan Timur.

Tabel 2.5.1 Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur, 2025

Kabupaten/Kota	Tenaga Perekam Medis	Tenaga Keperawatan	Tenaga Kebidanan	Tenaga Kefarmasian	Tenaga Kesehatan Lingkungan	Tenaga Gizi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Paser	36	716	601	75	34	58
Kutai Barat	30	702	412	55	25	32
Kutai Kartanegara	30	1.445	885	130	48	76
Kutai Timur	35	1.261	789	101	34	43
Berau	33	716	389	75	28	41
Penajam Paser Utara	17	454	317	46	14	26
Mahakam Ulu	5	188	115	15	13	10
Kota Balikpapan	82	2.301	654	294	56	80
Kota Bontang	29	664	216	112	18	29
Kota Samarinda	85	2.503	738	408	83	84
Kalimantan Timur	**382**	**10.999**	**5.125**	**1.311**	**353**	**479**

Catatan 1: Tenaga medis terdiri atas dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh pemerintah RI sesuai peraturan perundang-undangan (UU No. 29 Tahin 2004 tentang Praktik Kedokteran)

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kaltim

Tabel 2.5.2 Jumlah Rumah Sakit Kesehatan di Provinsi Kalimantan Timur, 2024-2025

Rumah Sakit	2024	2025	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)			
Jumlah RSUD Kelas A	1	3	Unit
Jumlah RSUD Kelas B	0	4	Unit
Jumlah RSUD Kelas C	0	9	Unit
Jumlah RSUD Kelas D	1	8	Unit
Jumlah RSUD Kelas D Pratama	0	2	Unit
2. Rumah Sakit Swasta			
Jumlah Rumah Sakit Swasta Kelas A	0	0	Unit
Jumlah Rumah Sakit Swasta Kelas B	0	1	Unit
Jumlah Rumah Sakit Swasta Kelas C	1	14	Unit
Jumlah Rumah Sakit Swasta Kelas D	17	12	Unit
Jumlah Rumah Sakit Swasta Kelas D Pratama	10	0	Unit
Jumlah Rumah Sakit Swasta yang belum ada penetapan kelas	0	0	Unit
3. Rumah Sakit BUMN			
Jumlah Rumah Sakit BUMN Kelas A	0	0	Unit
Jumlah Rumah Sakit BUMN Kelas B	0	0	Unit
Jumlah Rumah Sakit BUMN Kelas C	1	1	Unit
Jumlah Rumah Sakit BUMN Kelas D	0	0	Unit
Jumlah Rumah Sakit BUMN Kelas D Pratama	0	0	Unit
Jumlah Rumah Sakit BUMN yang belum ada penetapan kelas	0	0	Unit

Lanjutan Tabel 2.5.2

Rumah Sakit	2024	2025	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)
4. Rumah Sakit Milik AD/AU/AL/POLRI			
Jumlah RS Milik AD/AU/AL/POLRI Kelas A	0	0	Unit
Jumlah RS Milik AD/AU/AL/POLRI Kelas B	0	0	Unit
Jumlah RS Milik AD/AU/AL/POLRI Kelas C	2	2	Unit
Jumlah RS Milik AD/AU/AL/POLRI Kelas D	2	2	Unit
Jumlah RS Milik AD/AU/AL/POLRI Kelas D Pratama	0	0	Unit
Jumlah RS Milik AD/AU/AL/POLRI Kelas D yang belum ada penetapan kelas	0	0	Unit
5. Rumah Sakit Khusus			
Jumlah Rumah Sakit Ibu dan Anak	8	8	Unit
Jumlah Rumah Sakit Jiwa (RSJ)	1	1	Unit
Jumlah Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO)	0	0	Unit
Jumlah Rumah Sakit Kusta	0	0	Unit
Jumlah Rumag Sakit Mata	2	2	Unit
6. Jumlah Rumah Sakit Kelas A	3	3	
Jumlah Rumah Sakit Kelas B	5	5	Unit
Jumlah Rumah Sakit Kelas C	28	32	Unit
Jumlah Rumah Sakit Kelas D	22	22	Unit
Jumlah Rumah Sakit Kelas D Pratama	2	2	
Jumlah Seluru Rumah Sakit	**60**	**64**	**Unit**

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kaltim

Tabel 2.5.3 Kasus Penyakit Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Penyakit di Provinsi Kalimantan Timur, 2025

Kabupaten/Kota	Angka Penemuan TBC	Angka Keberhasila Pengobatan TBC	Jumlah Kasus Baru AIDS	Jumlah Kasus Malaria Positif	*Incidence Rate* DBD	Jumlah Kasus Filariasis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Paser	39,8%	78,8%	16	68	369	8
Kutai Barat	41,7%	80,4%	17	12	317	44
Kutai Kartanegara	38,3%	92,9%	21	38	1.260	2
Kutai Timur	52,2%	86,3%	28	222	579	6
Berau	52,6%	93,5%	15	212	109	0
Penajam Paser Utara	24,9%	76,8%	2	178	346	3
Mahakam Ulu	32,3%	80,3%	0	4	38	3
Kota Balikpapan	63,9%	81,3%	52	115	1.214	0
Kota Bontang	75,3%	83,2%	18	29	821	1
Kota Samarinda	77,9%	79,5%	100	157	1.074	0
Kalimantan Timur	**56,1%**	**82,0%**	**2.695**	**1.035**	**6.127**	**61**

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kaltim

Tabel 2.5.4 Jumlah Penderita dan Kematian Menurut Jenis Penyakit dan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur, 2025

Kabupaten/Kota	Demam Berdarah		*Tuberkulosis*		Diare	
	Penderita	Kematian	Penderita	Kematian	Penderita	Kematian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Paser	369	2	1.496	-	6.517	-
Kutai Barat	317	2	1.258	-	2.345	-
Kutai Kartanegara	1.260	1	3.423	-	7.563	-
Kutai Timur	579	0	2.341	-	2.405	-
Berau	109	1	1.342	-	4.456	-
Penajam Paser Utara	346	3	1.322	-	2.955	-
Mahakam Ulu	38	0	172	-	238	-
Kota Balikpapan	1.214	1	4.066	-	13.135	-
Kota Bontang	821	2	1.455	-	4.113	-
Kota Samarinda	1.074	2	4.770	-	4.013	-
Kalimantan Timur	**6.127**	**14**	**21.647**	**-**	**47.740**	**-**

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kaltim

Tabel 2.5.5 Jumlah Fasilitas Kesehatan di Provinsi Kalimantan Timur, 2024-2025

Pelayanan Kesehatan	2024	2025	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Jumlah Puskesmas Induk	188	188	Puskesmas
Jumlah Puskesmas Rawat Inap	88	76	Puskesmas
Jumlah Puskesmas non-Rawat Inap	100	112	Puskesmas
Jumlah Puskesmas Pembantu	457	697	Pusban
Jumlah Puskesmas Keliling	108	108	Pusling
Jumlah Puskesmas Terakreditasi	188	188	Puskesmas
Jumlah Puskesmas Akreditasi Paripurna	163	163	Puskesmas
Jumlah Puskesmas Akreditasi Utama	25	25	Puskesmas
Jumlah Puskesmas Akreditasi Madya	0	0	Puskesmas
Jumlah Puskesmas Akreditasi Dasar	0	0	Puskesmas
Persentase Puskesmas Terakreditasi	100	100	%
Jumlah Puskesmas dengan ketersediaan jaringan internet	188	188	Puskesmas
Total jumlah Puskesmas yang teregistrasi dan laik operasional pada tahun yang sama	188	188	Puskesmas
jumlah puskesmas yang ada diwilayah layanan santun lansia	188	188	Puskesmas
Jumlah Puskesmas yang ramah penyandang disabilitas	-	15	Puskesmas
Persentase Puskesmas yang ramah penyandang disabilitas	-	100	Puskesmas

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kaltim

Tabel 2.5. 6 Jumlah Ibu Hamil, Melakukan Kunjungan K1, Melakukan Kunjungan K4, Kurang Energi Kronis (KEK), dan Mendapat Tablet Zat Besi (Fe) di Provinsi Kalimantan Timur, 2018-2025

Tahun	Melakukan Kunjungan K1	Melakukan Kunjungan K4	Kurang Energi Kroning (KEK)	Mendapat Zat Besi (Fe)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2018	79.803	70.351	6.801	68.929
2019	79.458	69.746	6.766	63.038
2020	73.112	63.890	6.290	63.399
2021	67.255	59.881	5.996	54.073
2022	101.720	90.818	5.062	52.093
2023	60.067	58.998	4.838	52.444
2024	56.620	58.057	5.948	54.580
2025	58.244	57.433	-	37.549

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kaltim

Tabel 2.5.7 Jumlah Ibu Hamil dan Jumlah Persalinan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur, 2023

Kabupaten/Kota	Ibu Hamil	Jumlah Persalinan	Persalinan di Fasilitas Kesehatan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
Paser	5.224	4.986	95,01
Kutai Barat	2.503	2.389	83,93
Kutai Kartanegara	14.383	13.729	89,01
Kutai Timur	7.974	7.611	96,01
Berau	4.734	4.519	102,10
Penajam Paser Utara	2.827	2.699	96,48
Mahakam Ulu	457	436	109,40
Kota Balikpapan	10.944	10.446	98,77
Kota Bontang	3.595	3.431	88,60
Kota Samarinda	14.829	14.157	88,84
Kalimantan Timur	**67.470**	**64.403**	**94,82**

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kaltim

Tabel 2.5. 8 Jumlah Bayi Lahir, Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), dan Bergizi Kurang Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur, 2025

Kabupaten/Kota	Bayi Lahir	Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR)	Gizi Kurang
(1)	(2)	(3)	(4)
Paser	4.870	220	2.633
Kutai Barat	3.128	188	832
Kutai Kartanegara	12.440	922	3.963
Kutai Timur	8.228	358	1.017
Berau	4.615	304	2.284
Penajam Paser Utara	2.968	155	697
Mahakam Ulu	747	35	16
Kota Balikpapan	11.386	466	3.606
Kota Bontang	3.377	149	1.194
Kota Samarinda	12.447	574	1.706
Kalimantan Timur	**64.206**	**2.544**	**17.948**

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kaltim

Tabel 2.5.9 Jumlah Sarana Distribusi Alkes dan Industri Farmasi di Provinsi Kalimantan Timur, Tahun 2023-2025

Kabupaten/Kota2025	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)
Jumlah Toko Alat Kesehatan	-	209	209
Jumlah Sarana PKRT	2	3	3
Jumlah Apotek	1.039	1.135	1.139
Jumlah Toko Obat	77	65	60
Jumlah Gudang Farmasi	12	12	12
Jumlah Pedagang Besar Farmasi (PBF)	54	53	55
Jumlah Kabupaten/Kota dengan ketersediaan 90% dari 40 jenis obat esensial dan 7 jenis vaksin IRL	10	10	10
Jumlah Sarana Distribusi Alat Kesehatan	70	75	78
Jumlah Sarana Distribusi Alat Kesehatan Cabang	34	34	40
Pengembangan Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center	52	54	45

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kaltim

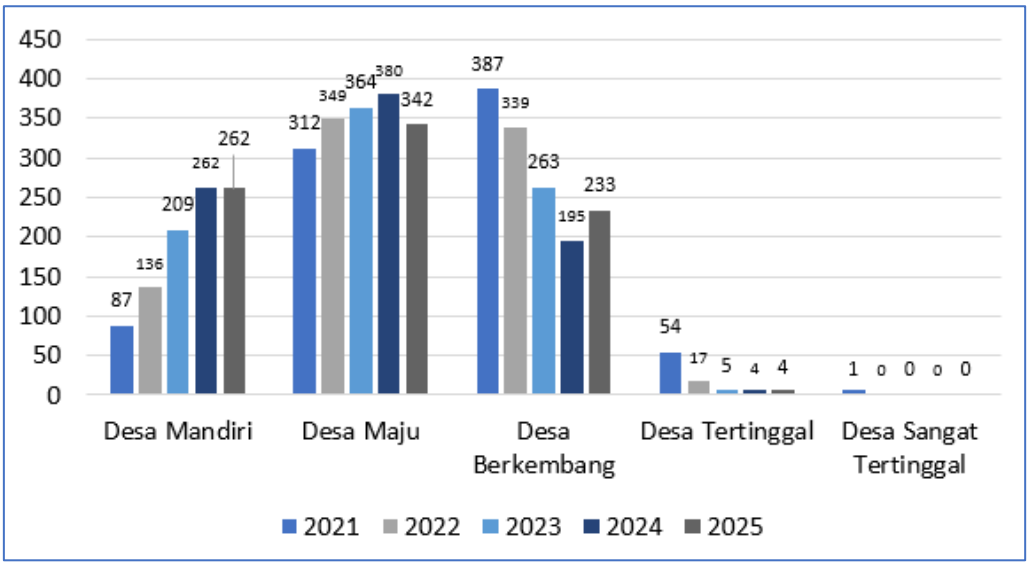
2.6 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Provinsi Kalimantan Timur

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa provinsi Kalimantan Timur ditetapkan berdasarkan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perangkat Daerah
3. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 9;
4. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 62 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur.

Tugas Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.

Grafik 2.6.1 Status Desa Menurut Indeks Desa Membangun di Provinsi Kalimantan Timur, 2021-2025



Dalam lima tahun terakhir, pembangunan desa di Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan perkembangan yang cukup baik berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM). Jumlah desa mandiri meningkat dari 87 desa pada tahun 2021 menjadi 262 desa pada tahun 2024 dan tetap sebanyak 262 desa pada tahun 2025. Sementara itu, jumlah desa maju mengalami peningkatan dari 312 desa pada tahun 2021 menjadi 380 desa pada tahun 2024, kemudian menurun menjadi 342 desa pada tahun 2025. Di sisi lain, jumlah desa berkembang menurun dari 387 desa pada tahun 2021 menjadi 195 desa pada tahun 2024, meskipun pada tahun 2025 kembali meningkat menjadi 233 desa. Perubahan tersebut menunjukkan adanya pergeseran status desa dari tahun ke tahun seiring dengan perkembangan kondisi dan capaian pembangunan di masing-masing wilayah.

Kemajuan pembangunan desa juga terlihat dari semakin sedikitnya desa dengan status tertinggal dan sangat tertinggal. Jika pada tahun 2021 masih terdapat 54 desa tertinggal dan 1 desa sangat tertinggal, maka pada tahun 2025 hanya terdapat 4 desa tertinggal dan tidak terdapat lagi desa sangat tertinggal. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar desa di Kalimantan Timur telah berada pada kategori berkembang, maju, dan mandiri. Secara umum, perkembangan tersebut mencerminkan semakin meratanya pembangunan desa di Kalimantan Timur, meskipun perubahan jumlah desa maju dan berkembang pada tahun 2025 menunjukkan bahwa peningkatan status desa masih perlu terus didorong.



Tabel 2.6.1 Status desa menurut Indeks Desa Membangun di Provinsi Kalimantan Timur, 2019-2025

Tahun	2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Jumlah Desa Mandiri	87	136	209	262	262
Jumlah Desa Maju	312	349	364	380	342
Jumlah Desa Berkembang	387	339	263	195	233
Jumlah Desa Tertinggal	54	17	5	4	4
Jumlah Desa Sangat Tertinggal	1	0	0	0	0

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 2.6.2 Jumlah Badan Usaha Milik Desa (Bumdes),Bumdes Yang Aktif Bumdes Yang Dibina,Pasar Desa, dan Pasar Desa Yang Dibina, 2021-2025

Tahun	2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Jumlah Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)	650	690	725	775	820
Jumlah Bumdes yang Aktif	390	425	470	500	525
Bumdes yang dibina	-	774	825	190	60

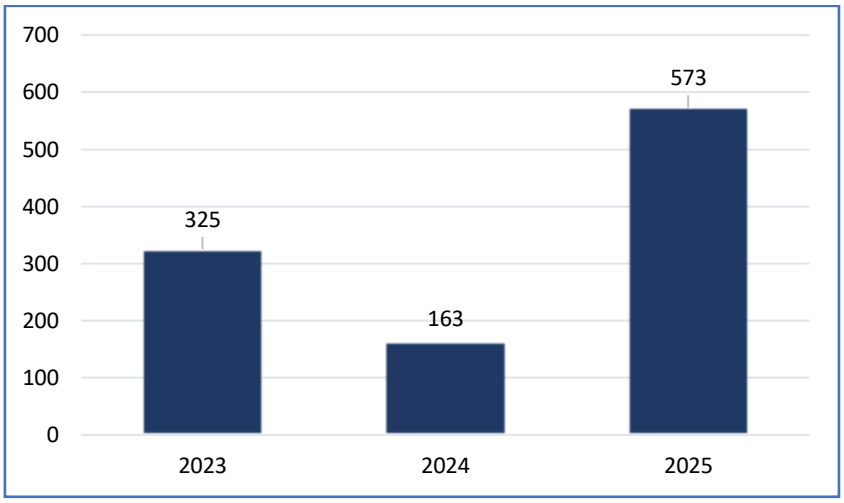
Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Provinsi Kalimantan Timur

2.7 Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur

Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur sebagai salah satu perangkat daerah dalam peningkatan prestasi olahraga dan potensi pemuda yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai katalisator dan dinamisator pelaksana pembangunan khususnya di bidang Kepemudaan dan Keolahragaan harus dapat menciptakan iklim masyarakat yang mampu memberdayakan dirinya sendiri untuk ikut serta berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan bidang Pemuda dan olahraga. Sehingga diharapkan dalam pelaksanaan pembangunan dapat berhasil guna dan berdaya guna dengan keterlibatan semua komponen masyarakat.



Grafik 2.7.1 Jumlah Atlet Bela Diri di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023–2025



Berdasarkan Grafik diatas, jumlah atlet bela diri di Provinsi Kalimantan Timur selama Tahun 2023–2025 menunjukkan perkembangan yang berfluktuasi. Pada Tahun 2023, jumlah atlet bela diri tercatat sebanyak 325 orang, kemudian menurun menjadi 163 orang pada Tahun 2024. Pada Tahun 2025, jumlah tersebut meningkat cukup signifikan menjadi 573 orang, sekaligus menjadi jumlah tertinggi selama periode pengamatan. Dibandingkan Tahun 2024, jumlah atlet bela diri pada Tahun 2025 bertambah sebanyak 410 orang.

Perkembangan jumlah atlet bela diri tersebut menggambarkan adanya dinamika dalam pembinaan olahraga bela diri di Kalimantan Timur. Peningkatan yang terjadi pada Tahun 2025 dapat mencerminkan semakin luasnya keterlibatan atlet dalam pembinaan dan kegiatan olahraga bela diri. Kondisi ini menunjukkan pentingnya dukungan yang berkelanjutan melalui pelatihan, pembinaan prestasi, penyediaan sarana dan prasarana, serta penyelenggaraan kompetisi agar potensi atlet bela diri di Kalimantan Timur dapat terus berkembang dan berprestasi.

Tabel 2.7.1 Jumlah Lembaga Atlet, dan Sarana Prasarana Cabang Olahraga di Provinsi Kalimantan Timur, 2020-2025

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jumlah Lembaga Cabang Cabor Bela Diri	11	15	15	15	16	5
Jenis Olahraga Unggulan Cabor Bela Diri	9	9	9	9	7	5
Jumlah Atlet Cabor Bela Diri	289	310	489	325	163	573
Sarana Prasaranan Olahraga Cabor Bela Diri	15	15	56	56	47	41
Jumlah Lembaga Cabor Terukur	19	14	20	20	16	9
Jenis Lembaga Unggulan Cabor Terukur	13	13	13	13	7	9
Jumlah Atlet Cabor Terukur	401	437	536	219	112	838
Sarana Prasarana Olahraga Permainan	24	24	63	63	59	59
Jumlah Lembaga Cabor Permainan	14	17	17	17	15	6
Jenis Olahraga Unggulan Cabor Permainan	3	3	15	11	3	6
Jumlah Atlet Cabor Permainan	215	312	724	512	655	311
Sarana Prasarana Olahraga Cabor Premium	5	5	136	56	205	205
Jumlah Lembaga Cabor Beregu	11	11	11	11	17	4
Jenis Olahraga Unggulan Cabor Beregu	6	7	7	7	5	4
Jumlah Atlet Cabor Beregu	315	330	1.080	1.080	925	537
Sarana Prasarana Olahraga Cabor Beregu	6	6	146	126	128	128

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 2.7.2 Jumlah Fasilitas, Organisasi, Kegiatan, dan Penghargaan dalam Bidang Olahraga dan Kepemudaan di Provinsi Kalimantan Timur, 2023-2025

Fasilitas	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)
Jumlah Klub Olahraga	1.087	875	886
Jumlah Lapangan/Gedung Olahraga	205	205	205
Jumlah kegiatan olahraga	20	20	35
Jumlah organisasi pemuda	305	75	191
Jumlah Organisasi Olahraga	4	4	3
Jumlah kegiatan kepemudaan	20	20	55
Jumlah gelanggang/balai remaja (selain milik swasta)	175	175	175
Penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi	29	232	752

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur

2.8 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur

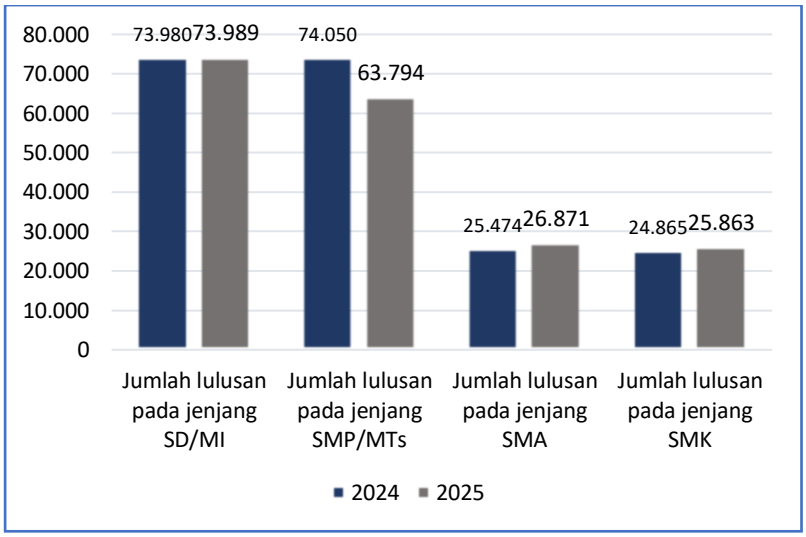


Penyelenggaraan pendidikan menjadi penting dan strategis dalam menentukan arah masa depan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Untuk itu sejalandengan peradigma baru penyelenggaraan otonomi daerah dengan tujuan memungkinkan daerah yang bersangkutan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, maka setiap Provinsi/Kabupaten/Kota memiliki kewenangan untuk mengelola urusan pemerintahan di daerah atas prakarsa sendiri, termasuk di dalamnya pengelolaan penyelenggaraan di bidang pendidikan dan kebudayaan. Proses pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur dilakukan disegala bidang satu diantaranya adalah bidang pendidikan, dan terkoordinasi melalui Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan

Timur yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Kepala Dinas Pendidikan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan bidang Pendidikan dan kebudayaan.



Grafik 2.8.1 Jumlah Lulusan pada Jenjang Pendidikan di Provinsi Kalimantan Timur, 2024-2025



Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus menunjukkan komitmen dalam meningkatkan kualitas pendidikan di seluruh jenjang. Hal ini terlihatdari meningkatnya jumlah lulusan pada tahun 2024 dibandingkan tahun sebelumnya. Lulusan SD/MI naik dari 72.980 menjadi 73.989 orang, lulusan SMP/MTs menurun dari 74.050 menjadi 63.794 orang, dan lulusan SMA meningkat dari 25.474 menjadi 26.871 orang, dan lulusan SMK meningkst dari 24.865 menjadi 25.863 orang.

Kenaikan ini mencerminkan hasil nyata dari berbagai upaya Pemprov Kaltim dalam memperluas akses pendidikan dan meningkatkan mutu pembelajaran. Dengan semakin banyaknya peserta didik yang berhasil menyelesaikan pendidikannya, diharapkan kualitas sumber daya manusia Kalimantan Timur akan semakin meningkat dan mampu mendukung keberlanjutan pembangunan daerah menuju masyarakat yang lebih sejahtera dan berdaya saing.

Tabel 2.8.1 Jumlah penerima beasiswa Pemprov Kalimantan Timur Tahun 2024

Uraian	2024	Satuan
(1)	(2)	(3)
Jumlah Penerima Beasiswa Kaltim	47.630	Orang
Jumlah Penerima Beasiswa Kaltim SD	16.853	Orang
Jumlah Penerima Beasiswa Kaltim SMP	4.680	Orang
Jumlah Penerima Beasiswa Kaltim SMA	3.817	Orang
Jumlah Penerima Beasiswa Kaltim S1	8.078	Orang
Jumlah Penerima Beasiswa Kaltim S2	538	Orang
Jumlah Penerima Beasiswa Kaltim S3	176	Orang

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 2.8.2 Persentase dan Jumlah kelulusan per Jenjang Pendidikan di Provinsi Kalimantan Timur, 2024-2025

Uraian		2024	2025
(1)		(2)	(3)
1.	Persentase Angka Kelulusan SD/MI	100	100
	Jumlah Lulusan pada Jenjang SD/MI	73.980	73.989
	Jumlah Siswa Tingkat Tertinggi pada Jenjang SD/MI pada tahun Sebelumnya	73.980	73.989
	Jumlah Siswa SD/MI yang Mengikuti Ujian	74.050	73.989
2.	Persentasi Angka Kelulusan SMP/MTs	100	100
	Jumlah Lulusan pada Jenjang SMP/MTs	74.050	63.794
	Jumlah Siswa Tingkat Tertinggi pada Jenjang SMP/MTs pada Tahun Sebelumnya	64102	63794
	Jumlah Siswa SMP/MTs yang Mengikuti Ujian	64.599	63.794
3.	Persentase Angka Kelulusan SMA/SMK/MA	100	100
	Jumlah Lulusan pada Jenjang SMA/SMK/MA	25.474	26.871
	Jumlah Siswa Tingkat Tertinggi pada Jenjang SMA/SMK/MA pada tahun Sebelumnya	24.865	25.863
	Jumlah Siswa SMA/SMK/MA yang Mengikuti Ujian	492	686

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 2.8.3 Penyelenggaraan Kebudayaan di Provinsi Kalimantan Timur, 2024-2025

Kebudayaan	2024	2025
(1)	(2)	(3)
1. Jumlah Group Kesenian	25	25
- Rasio Jumlah Grup Kesenian per 10.000 Penduduk	0	0
2. Jumlah Gedung Kesenian	4	4
- Rasio Jumlah Gedung Kesenian per 10.000 Penduduk	0	0
3. Museum dan Pusat Kebudayaan	14	14
4. Penyelenggaraan Festifal Seni dan Budaya	12	12
5. Jumlah Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya	0	0
6. Benda Cagar Budaya yang dilestarikan	7	7
7. Situs Cagar Budaya yang dilestarikan	39	39
8. Kawasan cagar budaya yang dilestarikan	5	5
9. Jumlah total Benda, Situs dan kawasan cagar budaya yg dimiliki	51	51
10. Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	51	75
11. Jumlah sekolah mengembangkan budaya lokal	75	75
12. Pembinaan dan Pelestarian Seni dan Budaya Prov. Kaltim	119	119
Jumlah Monumen Sejarah	76	76
Upacara Adat	96	96
Upacara Tradisi	127	127
Jenis Busana Tradisional	4	4
Lembaga Budaya	11	11

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur



2.9 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut DP3A Provinsi Kalimantan Timur, merupakan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang pada periode kelembagaan DP3A melaksanakan urusan pemerintahan sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

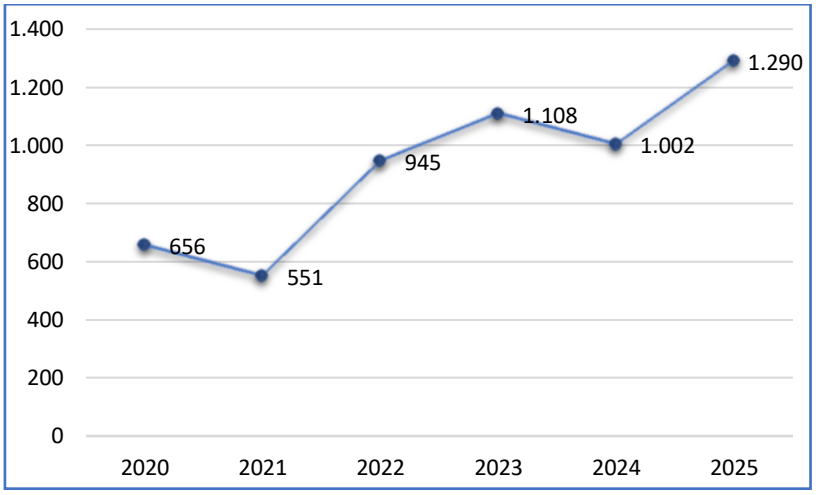
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi Kalimantan Timur berdiri pada tahun 2023 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang ditindaklanjuti melalui Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 43 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

Ruang lingkup kegiatan DP3A Provinsi Kalimantan Timur pada periode kelembagaan DP3A mencakup penyelenggaraan urusan kependudukan, pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan, pemenuhan hak anak, perlindungan khusus anak serta urusan pemerintahan lainnya yang menjadi kewenangan perangkat daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

DP3A Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan tugas pemerintahan daerah sesuai urusan yang menjadi kewenangannya serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah melalui perumusan kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan, koordinasi

pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan sesuai bidang tugasnya.

Grafik 2.9.1 Jumlah Kasus Kekerasan di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2025



Berdasarkan data diatas, menunjukkan bahwa jumlah kasus kekerasan di Provinsi Kalimantan Timur selama periode Tahun 2020–2025 cenderung meningkat. Pada Tahun 2020 tercatat 656 kasus dan menurun menjadi 551 kasus pada Tahun 2021. Setelah itu, jumlah kasus meningkat menjadi 945 kasus pada Tahun 2022 dan 1.108 kasus pada Tahun 2023.

Pada Tahun 2024, jumlah kasus sempat menurun menjadi 1.002 kasus. Namun, pada tahun 2025 kembali meningkat menjadi 1.290 kasus dan menjadi angka tertinggi selama periode pengamatan. Secara umum, jumlah kasus pada Tahun 2025 hampir dua kali lipat dibandingkan Tahun 2020.

Peningkatan kasus yang tercatat dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kejadian kekerasan serta semakin terbukanya akses terhadap layanan pengaduan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan upaya pencegahan, edukasi masyarakat, perlindungan korban, serta kerja sama antara pemerintah, keluarga, sekolah, dan masyarakat untuk menekan terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Tabel 2.9.1 Jumlah Kasus Kekerasan Menurut Kab/Kota di Provinsi Kalimantan TimurTahun 2020-2025

Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Paser	45	37	37	43	28	44
Kutai Barat	28	13	28	57	62	80
Kutai Kartanegara	33	27	77	113	141	178
Kutai Timur	23	15	69	65	89	90
Berau	31	13	37	67	70	103
Penajam Paser Utara	18	34	37	32	44	76
Mahakam Ulu	0	0	5	1	7	6
Kota Balikpapan	52	66	80	135	177	215
Kota Bontang	135	106	117	101	139	88
Kota Samarinda	291	240	458	494	245	410
Kalimantan Timur	**656**	**551**	**945**	**1.108**	**1.002**	**1.290**

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kalimantan Timur

Tabel 2.9.2 Jumlah Anak Korban Kekerasan Menurut Kab/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025

Kabupaten/Kota	2025
(1)	(2)
Paser	21
Kutai Barat	44
Kutai Kartanegara	151
Kutai Timur	54
Berau	75
Penajam Paser Utara	56
Mahakam Ulu	3
Kota Balikpapan	162
Kota Bontang	67
Kota Samarinda	222
Kalimantan Timur	**855**

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kalimantan Timur

Tabel 2.9.3 Predikat Layak Anak Menurut Kab/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025

Kabupaten/Kota	Predikat
(1)	(2)
Paser	Madya
Kutai Barat	Madya
Kutai Kartanegara	Madya
Kutai Timur	Madya
Berau	Madya
Penajam Paser Utara	Madya
Mahakam Ulu	Tidak Mendapat Predikat
Kota Balikpapan	Madya
Kota Bontang	Madya
Kota Samarinda	Madya

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kalimantan Timur

Tabel 2.9.4 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Menurut Kab/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024

Kabupaten/Kota	2024
(1)	(2)
Paser	65.98
Kutai Barat	70.26
Kutai Kartanegara	72.29
Kutai Timur	55.87
Berau	60.9
Penajam Paser Utara	50.52
Mahakam Ulu	82.2
Kota Balikpapan	75.04
Kota Bontang	42.51
Kota Samarinda	62.57

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kalimantan Timur

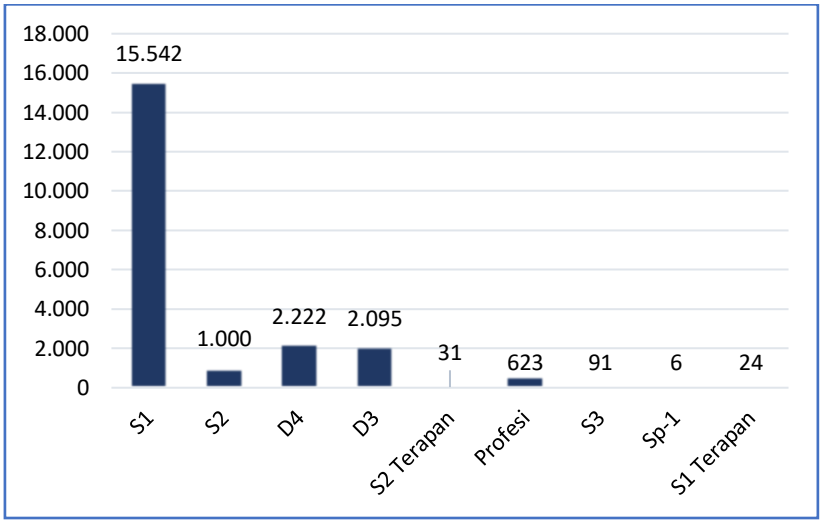
2.10 Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur



Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur memiliki peran dalam membantu pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesejahteraan rakyat melalui koordinasi, fasilitasi, sinkronisasi, serta evaluasi program yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan nonpelayanan dasar. Ruang lingkup koordinasinya mencakup berbagai sektor, antara lain pendidikan, kesehatan, sosial, kepemudaan dan olahraga, kebudayaan dan pariwisata, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, hingga pembinaan mental spiritual. Pada Tahun 2025, seluruh kegiatan fasilitasi, koordinasi, dan monitoring pada 11 sektor yang menjadi lingkup koordinasi Biro Kesra dapat dilaksanakan, dengan capaian indikator perumusan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat yang difasilitasi sebesar 100 persen.

Pada Tahun 2025, salah satu fokus program kesejahteraan rakyat adalah peningkatan akses pendidikan serta penguatan kehidupan keagamaan masyarakat. Melalui Program Pendidikan Gratispol, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memberikan dukungan biaya pendidikan bagi mahasiswa jenjang S1, S2, dan S3, baik yang menempuh pendidikan di dalam maupun di luar Kalimantan Timur. Di bidang pembinaan mental spiritual, Biro Kesra juga melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana spiritual, fasilitasi kelembagaan bina spiritual, serta program perjalanan religi bagi penjaga rumah ibadah.

Grafik 2.10.1 Jumlah Total Penerima Beasiswa Gratispol dalam Kaltim Tahun 2025



Berdasarkan data diatas, jumlah penerima Beasiswa Gratispol dalam Kalimantan Timur Tahun 2025 mencapai 21.634 orang. Penerima terbanyak berasal dari jenjang S1 sebanyak 15.542 orang atau sekitar 71,84 persen dari total penerima. Selanjutnya, penerima pada jenjang D4 sebanyak 2.222 orang dan D3 sebanyak 2.095 orang, sedangkan jenjang S2 tercatat sebanyak 1.000 orang. Pada pendidikan profesi terdapat 623 penerima, S3 sebanyak 91 penerima, S2 Terapan sebanyak 31 penerima, S1 Terapan sebanyak 24 penerima, dan Sp-1 sebanyak 6 penerima. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penerima manfaat Gratispol Tahun 2025 didominasi oleh mahasiswa jenjang sarjana, terutama S1, namun dukungan pendidikan juga telah menjangkau berbagai jenjang pendidikan tinggi hingga program profesi dan pascasarjana.

Program Gratispol merupakan salah satu upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan tinggi dengan membantu meringankan beban biaya pendidikan. Melalui program ini, kesempatan untuk melanjutkan pendidikan diharapkan semakin terbuka bagi masyarakat dari berbagai latar belakang ekonomi sekaligus mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kalimantan Timur. Ke depan, keberlanjutan dan pemerataan penerima manfaat diharapkan dapat terus ditingkatkan sehingga program tidak hanya memperluas akses pendidikan, tetapi juga mampu mendorong lahirnya sumber daya manusia yang berkualitas dan dapat berkontribusi terhadap pembangunan daerah.

Tabel 2.10.1 Proporsi penduduk Berusia 15 Tahun ke atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi Menurut Kab/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025

Kab/Kota	Diploma I/II/III	Universitas DIV	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Paser	3.689	15.883	19.572
Kutai Barat	3279	13.619	16.898
Kutai Kartanegara	15.014	47.775	62.789
Kutai Timur	5.615	40.354	45.969
Berau	5.045	20.763	25.808
Penajam Paser Utama	5.356	14.739	20.095
Mahakam Ulu	598	2.920	3.518
Balikpapan	28.385	87.404	115.789
Samarinda	27.501	95.757	123.258
Bontang	6.896	20.180	27.076
Jumlah	**101.378**	**359.394**	**460.772**

Sumber: Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 2.10.2 Rincian Penerima Program Perjalanan Religi Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2025

Kab/Kota	Islam	Kristen	Katolik	Hindu	Budha	Khonghucu	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Paser	112	9	4	2	-	-	127
Kutai Barat	25	14	3	1	1	-	44
Kutai Kartanegara	168	9	5	4	1	-	187
Kutai Timur	107	5	4	1		-	117
Berau	38	10	-	1	1	-	50
Penajam Paser Utama	44	4	5	1	-	-	54
Mahakam Ulu	3	-	2	-	-	-	5
Balikpapan	87	18	3	2	1	-	111
Samarinda	118	9	3	4	3	3	140
Bontang	31	5	3	1	1	-	41
Jumlah	**733**	**83**	**32**	**17**	**8**	**3**	**876**

Sumber: Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 2.10.3 Jumlah Mahasiswa Penerima Manfaat Gratispol Tahun 2025

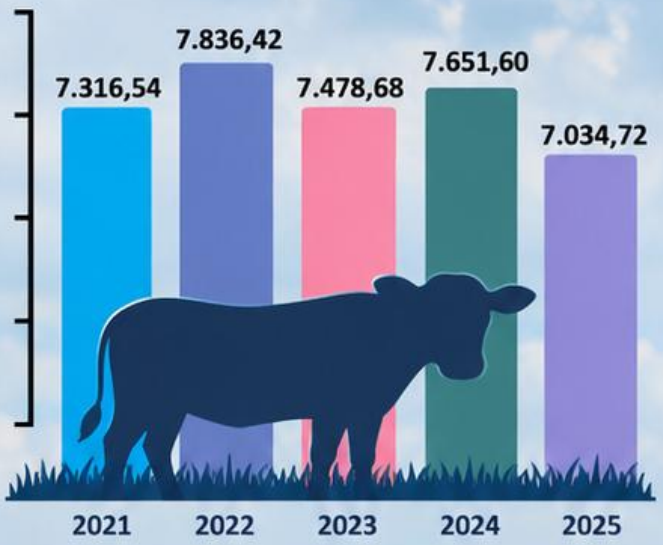
Jenjang	Pendidikan GratisPol Dalam Kaltim	Pendidikan GratisPol Luar Kaltim	Pendidikan GratisPol Kerjasama
(1)	(2)	(3)	(4)
S1	15.542	1.239	403
S2	1.000	411	60
D4	2.222	113	0
D3	2.095	33	14
S2 Terapan	31	0	0
Profesi	623	117	0
S3	91	61	0
Sp-1	6	38	0
S1 Terapan	24	0	0
Sp-2	0	1	0
Jumlah	**21.634**	**2.013**	**477**

Sumber: Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur

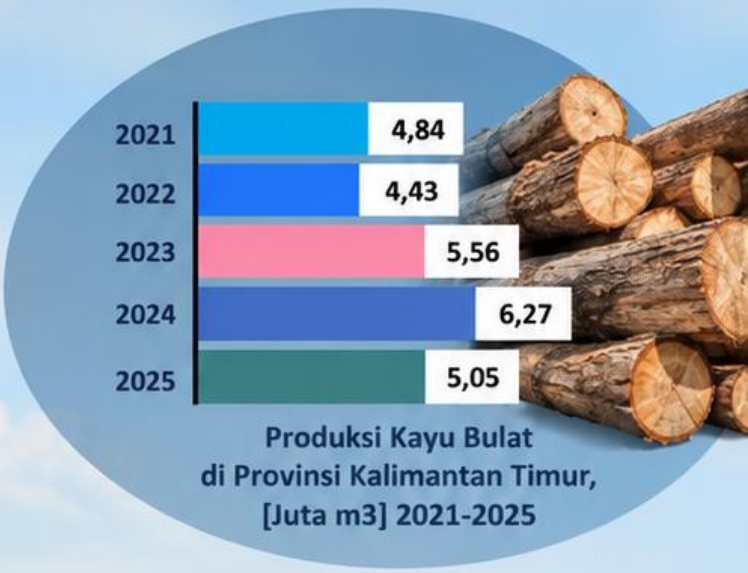


PROFIL DATA STATISTIK SEKTORAL PROVINSI

Kalimantan Timur Tahun 2026



Produksi Daging Sapi
di Provinsi Kalimantan Timur
(Ton), 2021–2025



Produksi Kayu Bulat
di Provinsi Kalimantan Timur,
[Juta m3] 2021-2025

Perkembangan Luas Panen dan Produksi Padi
di Provinsi Kalimantan Timur, 2024 dan 2025





63,04 Ribu Ha

Luas Panen
2024



66,52 Ribu Ha

Luas Panen
2025



249,64
Ribu Ton

Produksi Padi
2024



270,87
Ribu Ton

Produksi Padi
2025

BAB III

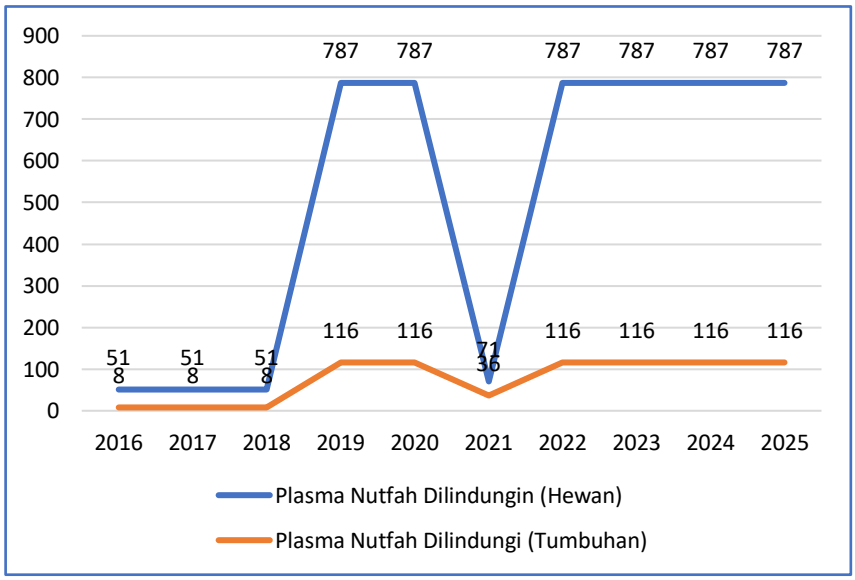
PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

3.1 Dinas Lingkungan Hidup Prov. Kalimantan Timur

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur merupakan perangkat daerah yang menjalankan urusan pemerintah di bidang lingkungan hidup. Pelaksanaan tugas dan fungsinya mengacu pada Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 61 Tahun 2016 tentang susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur. Dalam pelaksanaannya, kepala dinas bertugas membantu gubernur dalam menyelenggarakan urusan lingkungan hidup yang menjadi kewenangan daerah serta bertanggung jawab kepada gubernur melalui sekretaris daerah.



Grafik 3.1.1 Jumlah Plasma Nutfah dilindungi di Provinsi Kalimantan Timur, 2016-2025





Grafik di atas menggambarkan perkembangan jumlah nutfah yang dilindungi di Provinsi Kalimantan Timur selama periode 2016 hingga 2025, yang dikelompokkan menjadi plasma nutfah hewan dan tumbuhan. Perkembangan kedua kategori tersebut menunjukkan pola yang cukup berbeda. Jumlah plasma nutfah hewan mengalami perubahan yang cukup berbeda. Jumlah plasma nutfah hewan mengalami perubahan yang cukup tajam pada beberapa tahun tertentu, sedangkan plasma nutfah tumbuhan cenderung berada pada jumlah yang lebih rendah dan relatif stabil.

Pada periode 2016 hingga 2018, jumlah plasma nutfah hewan dilindungi tercatat sebanyak 51, sementara plasma nutfah tumbuhan hanya sebanyak 8. Perubahan cukup besar mulai terlihat pada 2019, ketika jumlah plasma nutfah hewan meningkat menjadi 787 dan plasma nutfah tumbuhan menjadi 116. Kondisi tersebut kemudian relatif bertahan hingga 2020.

Perubahan kembali terjadi pada tahun 2021, ketika jumlah plasma nutfah yang dilindungi mengalami penurunan cukup tajam dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan tersebut terlihat pada kedua kategori, baik hewan maupun tumbuhan. Tahun 2021 menjadi titik terendah setelah peningkatan yang terjadi pada 2019-2020.

Memasuki tahun 2022 jumlah plasma nutfah kembali meningkat, dengan kategori hewan mencapai 787 dan kategori tumbuhan sebanyak 116. Jumlah tersebut kemudian tidak banyak mengalami perubahan hingga 2025. Secara keseluruhan grafik menunjukkan adanya peningkatan besar dalam jumlah plasma nutfah yang dilindungi dibandingkan periode awal, meskipun sempat mengalami penurunan pada 2021 sebelum kembali stabil pada tahun-tahun berikutnya.

Tabel 3.1.1 Jumlah Plasma Nutfah dilindungi di Provinsi Kalimantan Timur, 2016-2025

Tahun	Plasma Nutfah dilindungi (Hewan)	Plasma Nutfah dilindungi (Tanaman)
(1)	(2)	(3)
2016	51	8
2017	51	8
2018	51	8
2019	787	116
2020	787	116
2021	71	36
2022	787	116
2023	787	116
2024	787	116
2025	787	116

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 3.1.2 Jumlah Sarana dan Pengendalian Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur, 2021-2025

Daftar Data	2020	2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jumlah Laboratorium Penguji Lingkungan Milik Pemda	12	12	1	1	1	1
Jumlah Laboratorium Penguji Lingkungan Milik Swasta	13	13	9	10	10	10
Sarana Monitoring Polusi Udara	4	4	2	2	2	5
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	75,25	75,06	74,46	75,47	76,63	81,88
Indeks Kualitas Air (IKA)	53,70	51,92	53,02	52,64	52,64	71,26
Indeks Kualitas Udara (IKU)	89,06	88,84	87,59	89,64	91,43	87,22
Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	83,51	85,4	81,45	81,36	85,16	86,18
Indeks Kualitas Lahan (IKL)	79,76	82,21	81,85	83,86	84,03	88,63

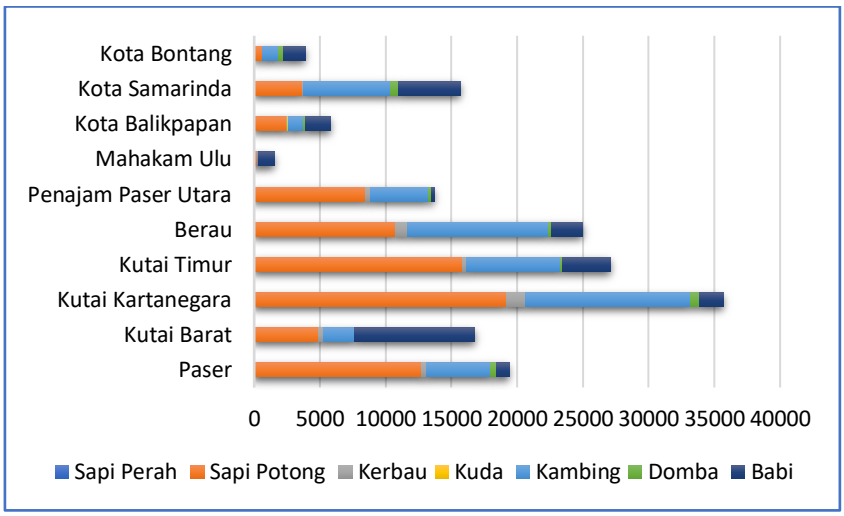
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur

3.2 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur merupakan perangkat daerah yang menjalankan urusan pemerintahan di bidang peternakan dan kesehatan hewan sebagai bagian dari pelaksanaan otonomi daerah. Dalam kedudukannya, dinas ini berada di bawah gubernur dan bertanggung jawab melalui sekretaris daerah. Dari sisi teknis, pelaksanaan pembangunan peternakan juda dilakukan melalui koordinasi dengan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementrian Pertanian Republik Indonesia.

Pembentukan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur mengacu pada peraturan penerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah dan selanjutnya diperkuat melalui peraturan daerah provinsi Kalimantan Timur nomor 8 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan peraturan gubernur Kalimantan Timur Nomor 77 Tahun 2016 tentang organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur, dinas ini mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah bidang pertanian, khususnya pada suburusan peternakan dan kesehatan hewan yang menjadi kewenangan daerah, serta menjalankan tugas pembantuan yang diberikan kepada pemerintah daerah.

Grafik 3.2.1 Populasi Ternak Potong Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Ternak di Provinsi Kalimantan Timur (ekor), 2025

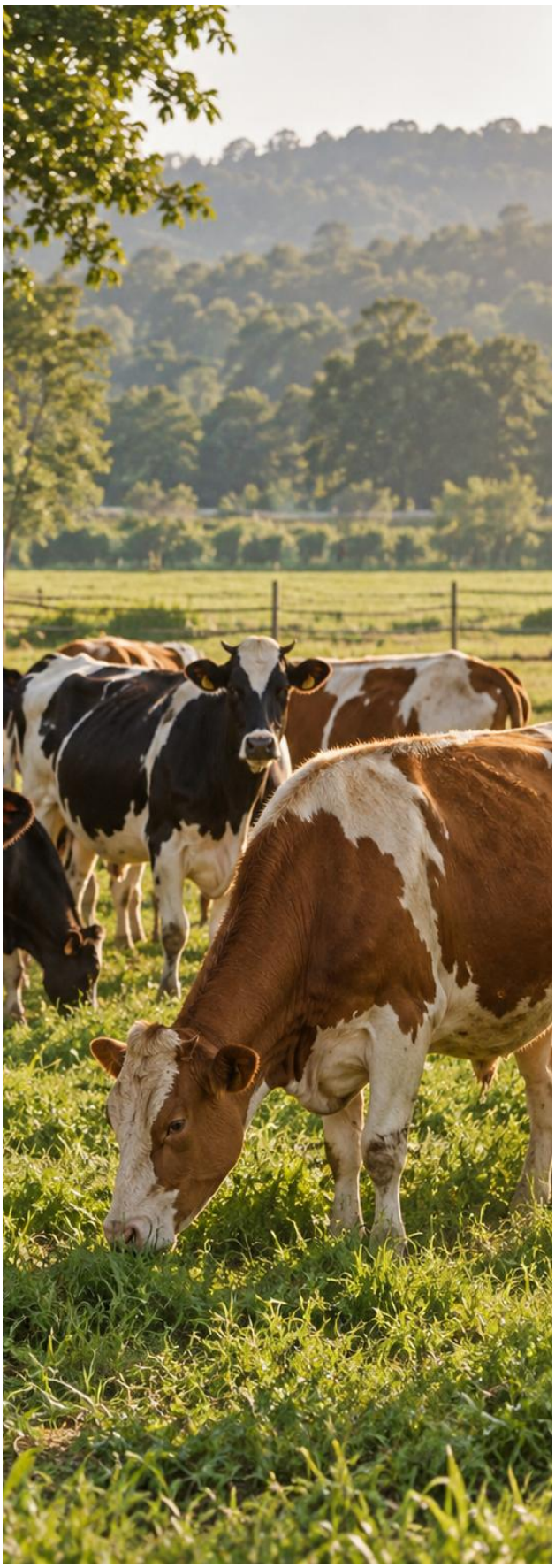


Pada tahun 2025, sebaran populasi ternak di Provinsi Kalimantan Timur memperlihatkan perbedaan yang cukup nyata antar kabupaten/kota. Sapi potong menjadi jenis ternak dengan populasi terbesar, terutama di Kabupaten Kutai Kartanegara yang mencapai 19.176 ekor. Selanjutnya, Kabupaten Kutai Timur memiliki 15.790 ekor dan Kabupaten Paser sebanyak 12.747 ekor. Besarnya populasi sapi potong di ketiga wilayah tersebut menunjukkan bahwa Kutai Kartanegara, Kutai Timur, dan Paser menjadi wilayah dengan populasi sapi potong yang cukup menonjol di Kalimantan Timur.

Selain sapi potong, kerbau juga tersebar di sejumlah kabupaten/kota, meskipun jumlahnya jauh lebih kecil. Kabupaten Kutai Kartanegara mencatat populasi kerbau tertinggi sebanyak 1.468 ekor, disusul Kabupaten Berau sebanyak 911 ekor dan Kabupaten Kutai Barat sebanyak 384 ekor. Sementara itu, populasi kuda relatif sedikit dan hanya terdapat di beberapa wilayah, dengan jumlah tertinggi di Kota Balikpapan sebanyak 82 ekor, kemudian Kota Samarinda 18 ekor, Kabupaten Kutai Timur 8 ekor, Kota Bontang 4 ekor, dan Kabupaten Mahakam Ulu 1 ekor.

Pada kelompok ternak kecil, populasi kambing cukup besar di beberapa wilayah. Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki populasi kambing tertinggi sebanyak 12.566 ekor, diikuti Kabupaten Berau sebanyak 10.771 ekor dan Kabupaten Kutai Timur sebanyak 7.129 ekor. Populasi domba paling banyak terdapat di Kabupaten Kutai Kartanegara sebanyak 649 ekor, disusul Kota Samarinda sebanyak 573 ekor dan Kota Bontang sebanyak 396 ekor. Sementara itu, untuk ternak babi, Kabupaten Kutai Barat

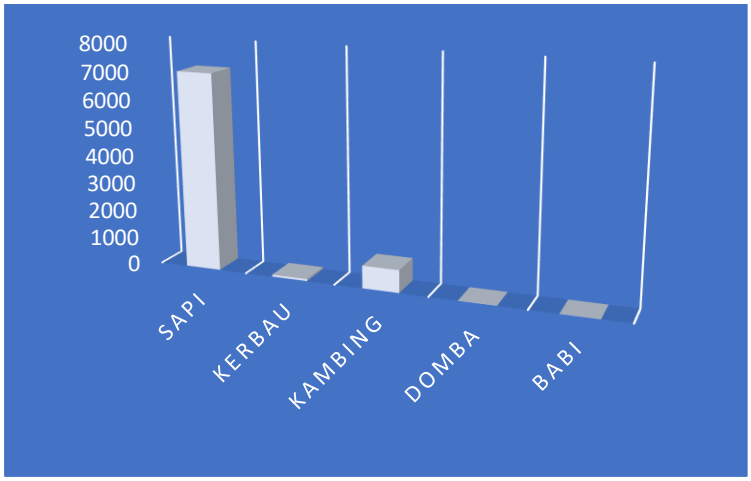




mencatat populasi tertinggi sebesar 9.109 ekor, kemudian Kota Samarinda sebanyak 4.734 ekor dan Kabupaten Kutai Timur sebanyak 3.671 ekor.

Secara keseluruhan, Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kutai Timur tampak memiliki populasi ternak yang paling besar pada grafik, terutama didukung oleh tingginya jumlah sapi potong dan kambing. Kabupaten Berau juga memiliki populasi yang cukup besar, khususnya pada sapi potong dan kambing, sedangkan Kutai Barat terlihat menonjol pada populasi babi. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa komposisi ternak di masing-masing kabupaten/kota di Kalimantan Timur cukup beragam sesuai dengan jenis ternak yang berkembang di wilayahnya.

Grafik 3.2.2 Produksi Daging Ternak Menurut Jenis Ternak di Provinsi Kalimantan Timur (ton), 2024



Pada tahun 2025, produksi daging ternak di Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan perbedaan yang cukup besar antarjenis ternak. Daging sapi menjadi komoditas dengan produksi tertinggi, yaitu mencapai 7.034,72 ton yang masih menjadi penyumbang utama

produksi daging ternak di Kalimantan Timur. Posisi berikutnya ditempati oleh daging kambing dengan produksi sebesar 810,47 ton dan daging kerbau sebesar 70,75 ton.

Sementara itu, produksi daging domba masih jauh lebih rendah dibandingkan ketiga komoditas tersebut, yaitu sebsar 7,49 ton. Produksi daging babi menjadi yang paling sedikit dengan jumlah sekitar 7,04 ton. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa struktur produksi daging ternak pada tahun 2025 masih sangat didominasi oleh sapi, sedangkan kambing dan kerbau memberikan kontribusi pada tingkat yang lebih rendah.

Secara keseluruhan, kondisi tahun 2025 memperlihatkan bahwa sapi masih menjadi komoditas utama dalam penyediaan daging ternak di Kalimantan Timur. Di sisi lain, keberadaan kambing, babi, kerbau, dan domba menunjukkan adanya keragaman komoditas peternakan yang dapat terus dikembangkan untuk mendukung ketersediaan pangan hewani daerah.



Tabel 3.2.1 Populasi Ternak Sapi Perah dan Sapi Potong Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Ternak di Provinsi Kalimantan Timur (ekor), 2023-2025

Kabupaten/Kota	Sapi Perah			Sapi Potong			Satuan
	2023	2024	2025	2023	2024	2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Paser	-	-	-	9.126	11.854	12.747	Ekor
Kutai Barat	-	-	-	3.623	4.334	4.917	Ekor
Kutai Kartanegara	-	-	-	13.421	13.500	19.176	Ekor
Kutai Timur	3	20	20	12.223	15.496	15.790	Ekor
Berau	-	-	-	5.665	11.948	10.730	Ekor
Penajam Paser Utara	-	2	-	8.075	8.401	8.463	Ekor
Mahakam Ulu	-	-	-	129	280	282	Ekor
Kota Balikpapan	-	-	-	2.21	2.039	2.433	Ekor
Kota Samarinda	-	19	17	2.724	3.503	3.664	Ekor
Kota Bontang	9	-	-	561	594	611	Ekor
Kalimantan Timur	**12**	**41**	**37**	**57.757**	**71.949**	**78.813**	**Ekor**

Sumber: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 3.2.2 Populasi Ternak Kerbau dan Kuda Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Ternak di Provinsi Kalimantan Timur (ekor), Tahun 2023 - 2025

Kabupaten/Kota	Kerbau			Kuda			Satuan
	2023	2024	2025	2023	2024	2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Paser	38	403	344	-	-	-	Ekor
Kutai Barat	172	325	384	-	-	-	Ekor
Kutai Kartanegara	855	1.442	1.468	-	-	-	Ekor
Kutai Timur	57	479	330	14	5	8	Ekor
Berau	36	955	911	-	7	-	Ekor
Penajam Paser Utara	98	379	379	-	-	-	Ekor
Mahakam Ulu	1	-	-	4	-	-	Ekor
Kota Balikpapan	13	71	80	5	70	82	Ekor
Kota Samarinda	9	154	53	-	10	18	Ekor
Kota Bontang	46	46	39	1	2	4	Ekor
Kalimantan Timur	**1.325**	**4.254**	**3.988**	**24**	**94**	**112**	**Ekor**

Sumber: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 3.2.3 Populasi Ternak Kambing, Domba, dan Babi Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Ternak di Provinsi Kalimantan Timur (ekor), 2023-2025

Kabupaten/ Kota	Kambing			domba			Babi			Satuan
	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Paser	2.427	5.481	4.911	30	272	404	658	793	985	Ekor
Kutai Barat	854	1.538	2.339	-	-	20	5.389	13.058	9.109	Ekor
Kutai Kartanegara	7.462	11.213	12.566	131	-	649	1.722	1.204	1.838	Ekor
Kutai Timur	2.734	4.609	7.129	111	36	180	1.612	3.514	3.671	Ekor
Berau	4.837	6.861	10.771	35	63	212	1.377	2.596	2.368	Ekor
Penajam Paser Utara	3.219	4.734	4.401	58	-	213	471	218	247	Ekor
Mahakam Ulu	21	23	73	-	-	-	786	652	1.174	Ekor
Kota Balikpapan	1.154	1.095	1.144	135	126	129	1.731	1.453	1.923	Ekor
Kota Samarinda	3.462	4.511	6.623	90	325	573	2.856	3.167	4.734	Ekor
Kota Bontang	808	718	1.180	21	113	396	2.355	2.177	1.641	Ekor
Kalimantan Timur	**26.978**	**40.783**	**51.137**	**611**	**935**	**2.776**	**18.957**	**28.832**	**27.690**	**Ekor**

Sumber: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 3.2.4 Populasi Unggas Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Ternak di Provinsi Kalimantan Timur (ekor), 2023-2025

Kabupaten/ Kota	Ayam Kampung			Itik			Itik Manila			Satuan
	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Paser	95.672	117,138	118,991	6,011	13,696	13,688	3,393	1,410	1,296	Ekor
Kutai Barat	37.364	77,872	232,152	946	5,781	8,321	1,294	1,307	3,565	Ekor
Kutai Kartanegara	210.643	364,986	279,894	18,863	52,420	52,076	15,055	15,206	15,316	Ekor
Kutai Timur	60.545	64,816	66,256	3,477	14,175	13,361	4,009	6,598	6,664	Ekor
Berau	74.801	189,899	167,247	3,581	23,898	21,754	4,405	4,449	4,851	Ekor
Penajam Paser Utara	94.729	362,007	330,476	4,335	4,457	4,445	8,919	2,443	2,471	Ekor
Mahakam Ulu	3.466	57,866	17,263	138	585	591	-	-	343	Ekor
Kota Balikpapan	48.005	67,706	58,633	1,788	2,778	3,584	2,484	2,889	-	Ekor
Kota Samarinda	37.686	250,710	275,689	7,181	29,012	29,302	4,254	4,239	4,351	Ekor
Kota Bontang	24.005	89,777	85,312	970	1,248	569	1,978	4,180	5,070	Ekor
Kalimantan Timur	**686.916**	**1,642,777**	**1,631,913**	**47,290**	**148,050**	**147,691**	**45,791**	**42,721**	**43,927**	**Ekor**

Sumber: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 3.2.5 Produksi Daging Ternak Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Ternak di Provinsi Kalimantan Timur (ton), 2025

Kabupaten/Kota	Sapi	Kerbau	Kambing	Domba	Babi	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Paser	538,01	3,52	29,60	2,86	2,88	Ton
Kutai Barat	203,08	6,79	21,12	-	-	Ton
Kutai Kartanegara	597,48	1,66	81,76	-	-	Ton
Kutai Timur	1.292,44	12,21	80,33	0,10	0,10	Ton
Berau	564,23	-	48,97	0,47	-	Ton
Penajam Paser Utara	541,28	-	33,24	0,39	0,39	Ton
Mahakam Ulu	12,29	-	1,37	-	-	Ton
Kota Balikpapan	1.183,21	18,08	42,66	1,46	1,46	Ton
Kota Samarinda	1.495,39	24,15	373,16	0,95	0,95	Ton
Kota Bontang	607,30	4,35	98,26	1,26	1,26	Ton
Kalimantan Timur	**7.034,72**	**70,75**	**810,47**	**7,49**	**7,04**	**Ton**

Sumber: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 3.2.6 Produksi Daging Unggas menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Unggas di Provinsi Kalimantan Timur (ton), 2025

Kabupaten/Kota	Ayam Kampung	Ayam Pedaging	Ayam Petelur	Itik	Itik Manlia	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Paser	102.41	2,015.18	17.47	7.30	-	Ton
Kutai Barat	264.56	2,878.82	23.71	3.43	2.68	Ton
Kutai Kartanegara	318.97	6,333.41	298.78	21.48	10.29	Ton
Kutai Timur	75.51	4,440.30	64.15	5.51	4.40	Ton
Berau	190.59	13,351.99	150.37	8.97	2.99	Ton
Penajam Paser Utara	376.61	1,439.41	31.42	1.83	1.63	Ton
Mahakam Ulu	11.64	8.54	2.03	0.24	0.23	Ton
Kota Balikpapan	66.82	18,652.48	61.72	1.48	-	Ton
Kota Samarinda	224.02	24,763.07	300.56	36.08	2.31	Ton
Kota Bontang	102.31	4,894.00	-	0.24	3.35	Ton
Kalimantan Timur	**1,733.44**	**78,777.20**	**950.22**	**86.58**	**27.87**	**Ton**

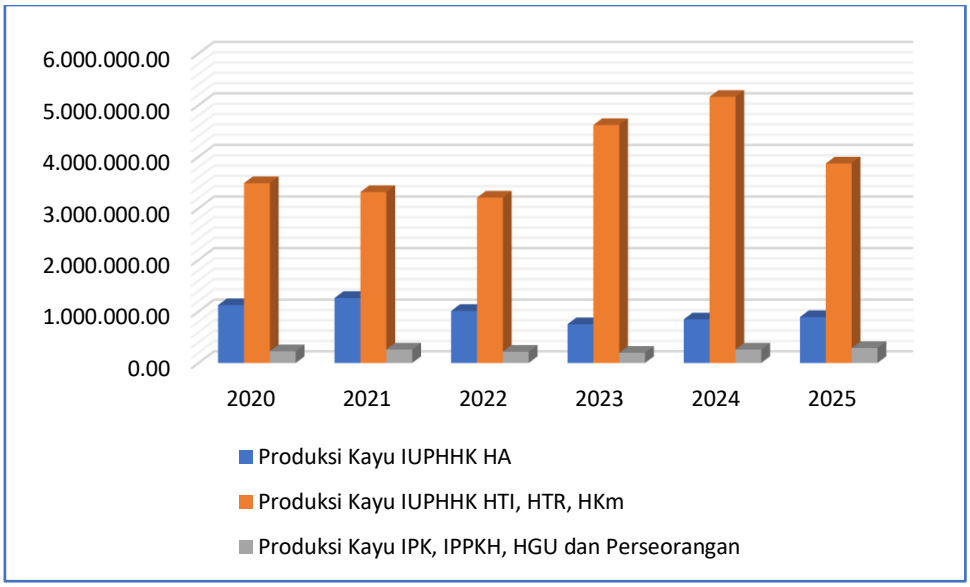
Sumber: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur

3.3 Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur merupakan perangkat daerah yang menjalankan urusan pemerintahan di bidang kehutanan. Susunan organisasi dan tata kerjanya ditetapkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja dimas Provinsi Kalimantan Timur, sedangkan pelaksanaan tugas pokok, fungsi, serta tata kerjanya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 45 Tahun 2008. Berdasarkan ketentuan tersebut, Dinas Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kehutanan dalam rangka otonomi daerah, tugas pembantuan, serta tugas dekonsentrasi. Dalam menjalankan tugas tersebut, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan fungsi sebagai berikut:

1. Menyusun kebijakan teknis di bidang kehutanan sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah
2. Melaksanakan perencanaan, pembinaan, serta pengendalian kebijakan teknis di bidang kehutanan
3. Merumuskan, merencanakan, membina, dan mengendalikan kebijakan teknis yang berkaitan dengan perencanaan serta tata guna hutan
4. Merumuskan, merencanakan, membina, dan mengendalikan kebijakan teknis di bidang produksi dan pemanfaatan hasil hutan
5. Menyusun dan mengendalikan kebijakan teknis mengenai peredaran serta industri hasil hutan
6. Melaksanakan perumusan, perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis dalam perlindungan hutan
7. Melaksanakan kegiatan administrasi dan kesekretariatan dinas
8. Melaksanakan kegiatan melalui unit pelaksana teknis dinas
9. Melaksanakan pembinaan terhadap kelompok jabatan fungsional
10. Menjalankan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dinas kehutanan

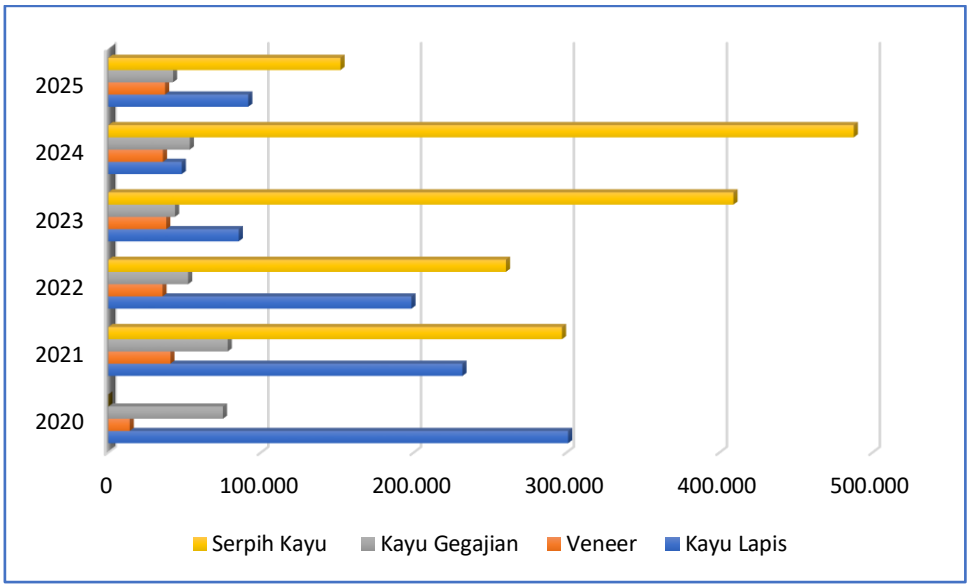
Grafik 3.3.1 Produksi Kayu Bulat menurut Jenis Produksi di Provinsi Kalimantan Timur, Tahun 2020-2025



Produksi kayu di Provinsi Kalimantan Timur selama periode 2020-2025 memperlihatkan perkembangan yang berbeda pada masing-masing kelompok perizinan. Produksi kayu dari IUPHHK-HA cenderung berfluktuasi, dengan capaian tertinggi terjadi pada tahun 2021 sekitar 1,26 juta m^3. Setelah itu, produksinya mengalami penurunan hingga 2024, kemudian terlihat sedikit meningkat kembali pada tahun 2025. Sementara itu, kelompok IUPHHK-HTI, HTR, dan HKm menjadi penyumbang produksi terbesar sepanjang periode tersebut. Produksinya meningkat dari sekitar 3,48 juta m^3 pada tahun 2020 mencapai hingga puncak sekitar 5,16 juta m^3 pada tahun 2024, sebelum mengalami penurunan cukup nyata pada 2025 menjadi sekitar 3,9 juta m^3.

Berbeda dengan dua kelompok tersebut, produksi kayu dari IPK, IPPKH, HGU, dan Perseorangan berada pada tingkat yang jauh lebih rendah dan relatif stabil dari tahun ke tahun, meskipun tetap mengalami sedikit perubahan. Secara keseluruhan, produksi kayu Kalimantan Timur hingga tahun 2025 masih didominasi oleh kelompok IUPHHK-HTI, HTR, dan HKm. Namun, penurunan yang terjadi pada tahun 2025 menunjukkan bahwa produksi kayu tidak selalu berberak meningkat setiap tahun, melainkan dipengaruhi oleh perubhana kegiatan pemanfaatan, perizinan, serta pengelolaan kawasan hutan.

Grafik 3.3.2 Produksi Kayu Olahan Menurut Jenis Produksi di Provinsi Kalimantan Timur, Tahun 2020-2025



Produksi kayu olahan di Provinsi Kalimantan Timur selama 2020–2025 menunjukkan adanya perubahan komposisi antarjenis produk. Pada awal periode, kayu lapis masih menjadi salah satu produk utama, tetapi produksinya terus melemah hingga 2024 sebelum kembali menunjukkan pemulihan pada 2025. Sebaliknya, serpih kayu berkembang sangat pesat sejak 2021 dan kemudian menjadi jenis kayu olahan yang paling dominan, terutama pada 2023–2024. Namun, dominasi tersebut tidak berlanjut pada 2025 karena produksinya mengalami penurunan yang cukup besar.

Berbeda dengan dua jenis tersebut, veneer menunjukkan pola yang relatif stabil setelah mengalami peningkatan pada awal periode. Produksinya tidak mengalami perubahan yang terlalu tajam dari tahun ke tahun. Sementara itu, kayu gergajian cenderung mengalami penurunan dalam jangka panjang, meskipun sempat mengalami sedikit peningkatan pada 2024 sebelum kembali melemah pada 2025.

Secara keseluruhan, pola tersebut memperlihatkan adanya pergeseran struktur produksi kayu olahan, dari yang semula lebih didominasi kayu lapis menuju serpih kayu pada pertengahan periode. Perubahan kembali terlihat pada 2025, ketika produksi serpih kayu menurun sementara kayu lapis mulai meningkat, menunjukkan bahwa komposisi produksi kayu olahan di Kalimantan Timur masih bersifat dinamis dan dapat berubah dari tahun ke tahun.

Tabel 3.3.1 Luas Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan di Provinsi Kalimantan Timur (ha), 2025

Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan	Luas		Satuan
	2024	2025	
(1)	(2)	(3)	(4)
Luas Kawasan Hutan Lindung	1,785,089	1,748,792	Hektare
Luas Pengelolaan Kawasan Hutan Lindung	1,785,089	1,748,792	Hektare
Luas Lahan Hutan Lindung	1,785,089	1,748,792	Hektare
Suka Margasatwa	97,46	-	Hektare
Luas Lahan Hutan Produksi Tetap	2.885.957	-	Hektare
Luas Lahan Hutan Produksi Terbatas	2.927.898	-	Hektare
Luas Lahan Tubuh Air	3.119	-	Hektare
Luas Lahan Hutan Produksi yang dapat di Konservasi (HPK)	261.964	-	Hektare
Luas Lahan Areal Penggunaan lain	4.313.729	-	Hektare

Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 3.3.2 Produksi Kayu Bulat Menurut Jenis Produksi di Provinsi Kalimantan Timur, 2020-2025

Tahun	Kayu Bulat			Jumlah Total	Satuan
	Produksi Kayu IUPHHK HA	Produksi Kayu IUPHHK HTI, HTR, HKm	Produksi Kayu IPK, IPPKH, HGU dan Perseorangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2020	1.122.077.09	3.484.923.24	227.444.17	4.834.444.50	m^3
2021	1.259.939.63	3.314.494.10	260.724	4.835.157.73	m^3
2022	1.009.177.57	3.206.086.34	218.807.27	4.434.071.18	m^3
2023	751.957.25	4.613.355.95	197.295.88	5.562.609.08	m^3
2024	845.255.11	5.160.496.66	259.812.64	6.265.564.41	m^3
2025	890.558.31	3.867.671.85	290.307.07	5.048.525.23	m^3

Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 3.3.3 Produksi Kayu Olahan Menurut Jenis Produksi di Provinsi Kalimantan Timur, 2020-2025

Tahun	Kayu Olahan				Satuan
	Kayu Lapis	Veneer	Kayu Gegajian	Serpih Kayu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2020	300.922	13.954	75.005	0	m^3
2021	231.841	40.641	78.127	296.919	m^3
2022	198.430,17	35.453,37	52.232,94	260.330,08	m^3
2023	85.369,60	37.886,99	43.649,50	409.017,85	m^3
2024	48.055,91	35.746,47	53.320,99	487.726,97	m^3
2025	91.568,66	37.164,31	42.367,23	151.998,27	m^3

Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 3.3.4 Jumlah Perusahaan Pemegang IUPHHK-HA dan IUPHHK-HT serta Luasnya menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur, 2022

Kabupaten/Kota	IUPHHK-HA		IUPHHK-HT	
	Jumlah Perusahaan	Luas (Ha)	Jumlah Perusahaan	Luas (Ha)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Paser	4	293.920,00	6	147.336,00
Kutai Barat	7	299.330,00	8	166.920,00
Kutai Kartanegara	6	432.115,00	8	493.970,00
Kutai Timur	12	990.030,00	17	585.005,00
Berau	16	847.852,68	6	280.261,00
Penajam Paser Utara	-	-	3	218.514,00
Mahakan Ulu	12	962.999,45	-	-
Kota Balikpapan	-	-	-	-
Kota Samarinda	-	-	-	-
Kota Bontang	-	-	-	-

Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 3.3.5 Luas Lahan yang Direboisasi dan Direhabilitas di Wilayah Hutan di Provinsi Kalimantan Timur, 2020-2024

Kegiatan	2020	2021	2022	2023	2024	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Luas lahan dan Lahan Kritis yang di Rehabilitas	38.737	39.900	38.866	38.861	38.165	Hektare
Data Realisasi Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Luar kawasan hutan	400	29	200	450	612	Hektare
Luas penanaman rehabilitas lahan	2.159	147	414	1.638	2.588	Hektare
Luas Reboisasi Hutan dan Laham berdasarkan Provinsi	1.486	-	-	163	850	Hektare

Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur

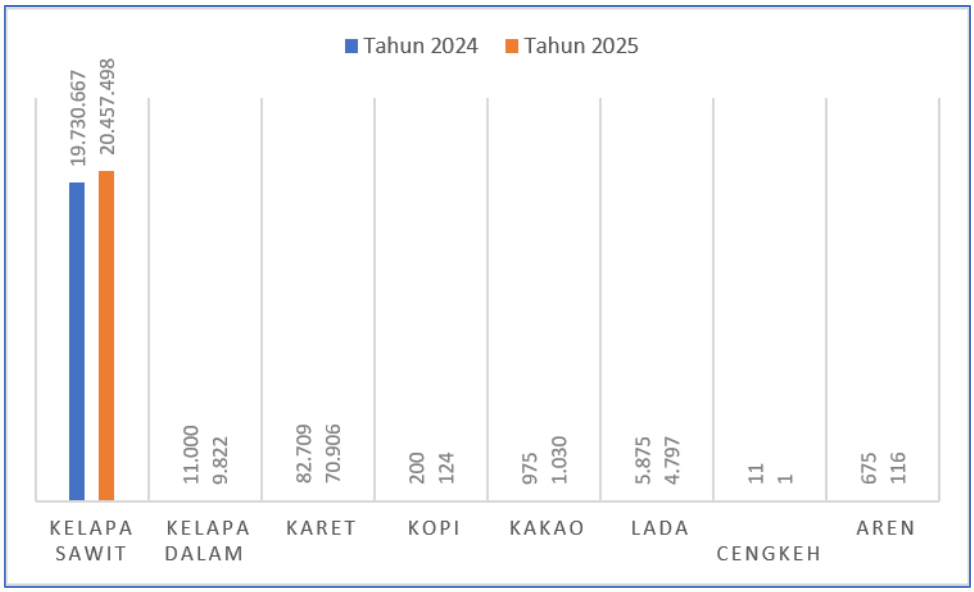


3.4 Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur

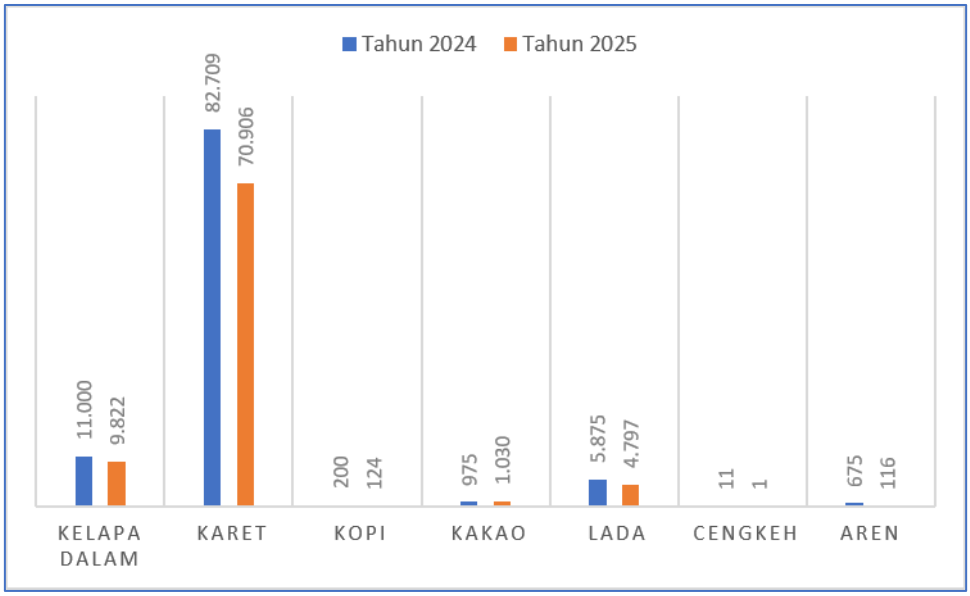
Perkembangan kelembagaan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur telah melalui perjalanan yang cukup panjang. Cikal bakalnya dimulai pada tahun 1952 dengan pembentukan kantor keret cabang Kalimantan Timur, kemudian disusul oleh pembentukan Yayasan Karet Kalimantan Timur yang merupakan cabang Kalimantan Selatan pada tahun 1957. Kedua lembaga tersebut selanjutnya digabungkan pada tahun 1963 dan membentuk Dinas Karet. Memasuki awal Pelita I pada April 1969, Dinas Karet kemudian mengalami perubahan nama menjadi Dinas Perkebunan Rakyat Kalimantan Timur.

Seiring perkembangan organisasi pemerintahan daerah, kelembagaan tersebut kembali mengalami penyesuaian. Melalui Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 1978 yang kemudian disempurnakan dengan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 1984, organisasi ini berubah menjadi Dinas Perkebunan Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur. Perubahan berikutnya terjadi melalui Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 03 dan Nomor 16 Tahun 2001. Selanjutnya, struktur organisasi Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur kembali disempurnakan melalui Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2003 serta Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 03 Tahun 2004.

Grafik 3.4.1 Produksi Perkebunan Menurut Jenis Tanaman di Provinsi Kalimantan Timur (ton), 2024 dan 2025



Grafik 3.4.2 Produksi Perkebunan Menurut Jenis Tanaman (Selain Kelapa Sawit) di Provinsi Kalimantan Timur (ton), 2024 dan 2025



Produksi tanaman perkebunan di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2024–2025 memperlihatkan dominasi yang sangat kuat dari komoditas kelapa sawit. Produksi kelapa sawit meningkat dari 19.730.667 ton pada 2024 menjadi 20.457.498 ton pada 2025. Besarnya produksi tersebut jauh melampaui komoditas perkebunan lainnya. Sementara itu, sebagian besar komoditas lain justru mengalami penurunan produksi, seperti kelapa dalam, karet, kopi, lada, cengkeh, dan aren. Kakao menjadi salah satu komoditas yang menunjukkan peningkatan, yaitu dari 975 ton menjadi 1.030 ton.

Jika kelapa sawit tidak diperhitungkan, karet menjadi komoditas dengan produksi terbesar, meskipun jumlahnya menurun dari 82.709 ton pada 2024 menjadi 79.906 ton pada 2025. Produksi kelapa dalam juga turun dari 11.000 ton menjadi 9.822 ton, sedangkan lada berkurang dari 5.875 ton menjadi 4.797 ton. Penurunan juga terjadi pada kopi, cengkeh, dan aren. Di tengah kecenderungan tersebut, kakao menjadi satu-satunya komoditas pada grafik yang mencatat peningkatan produksi pada 2025. Secara umum, kondisi ini menunjukkan bahwa perkembangan produksi perkebunan di Kalimantan Timur berbeda antarjenis komoditas, dengan kelapa sawit tetap menjadi komoditas yang paling dominan.



Tabel 3.4.1 Luas Areal, Luas Tanam, Produksi, Produktivitas, dan Tenaga Kerja Perkebunan Kelapa Sawit dan Kelapa Dalam di Provinsi Kalimantan Timur, 2024-2025

Perkebunan	Kelapa Sawit		Kelapa dalam		Satuan
	2024	2025	2024	2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Luas Areal	1.332.115	1.506.834	19.624	18.953	Ha
Luas Tanam	1.332.115	1.248.956	19.624	18.953	Ha
Jumlah Produksi	19.730.667	20.457.498	11.000	9.822	ton
Produktivitas	17.301	17.095	718	644	ton/Ha
Jumlah Tenaga Kerja	215.035	42.704	19.829	17.531	orang

Sumber: Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 3.4.2 Luas Areal, Luas Tanam, Produksi, Produktivitas, dan Tenaga Kerja Perkebunan Karet dan Kopi di Provinsi Kalimantan Timur, 2024-2025

Perkebunan	Karet		Kopi		Satuan
	2024	2025	2024	2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Luas Areal	139.195	112.900	1.350	1.294	Ha
Luas Tanam	139.195	112.900	1.350	596	Ha
Jumlah Produksi	82.709	70.906	200	124	ton
Produktivitas	1.550	1.432	300	264	ton/Ha
Jumlah Tenaga Kerja	58.900	48.382	1.971	1.976	orang

Sumber: Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 3.4.3 Luas Areal, Luas Tanam, Produksi, Produktivitas, dan Tenaga Kerja Perkebunan Kakao dan Lada di Provinsi Kalimantan Timur, 2024-2025

Perkebunan	Kakao		Lada		Satuan
	2024	2025	2024	2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Luas Areal	7.755	7.833	7.779	6.193	Ha
Luas Tanam	7.755	7.216	7.779	6.193	Ha
Jumlah Produksi	975	1.030	5.875	4.797	ton
Produktivitas	393	400	1.036	1.042	ton/Ha
Jumlah Tenaga Kerja	2.691	2.687	6.348	6.212	orang

Sumber: Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 3.4.4 Luas Areal, Luas Tanam, Produksi, Produktivitas, dan Tenaga Kerja Perkebunan Cengkeh dan Aren di Provinsi Kalimantan Timur, 2024-2025

Perkebunan	Cengkeh		Aren		Satuan
	2024	2025	2024	2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Luas Areal	22	7	1.157	1.129	Ha
Luas Tanam	22	7	1.157	1.129	Ha
Jumlah Produksi	11	1	675	116	ton
Produktivitas	566	16	1.461	231	ton/Ha
Jumlah Tenaga Kerja	18	3	1.705	1.588	orang

Sumber: Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 3.4.5 Luas Tanam, Produksi, Produktivitas, dan Jumlah Tenaga Kerja Karet dan Kelapa Sawit Perkebunan Besar Pemerintah di Provinsi Kalimantan Timur, 2024-2025

Perkebunan Pemerintah	Karet		Kelapa Sawit		Satuan
	2024	2025	2024	2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Luas Tanam Perkebunan Besar	399	399	14.402	15.562	Ha
Jumlah Produksi Perkebunan Besar	330	33	195.509	205.394	ton
Produktivitas Perkebunan Besar	827	827	14.854	14.809	ton/Ha
Jumlah Tenaga Kerja Perkebunan Besar	148	148	5.728	5.728	orang

Sumber: Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 3.4.6 Luas Tanam, Produksi, Produktivitas, dan Jumlah Tenaga Kerja Karet dan Kelapa Sawit Perkebunan Besar Swasta di Provinsi Kalimantan Timur, 2024-2025

Perkebunan Swasta	Karet		Kelapa Sawit		Satuan
	2024	2025	2024	2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Luas Tanam Perkebunan Besar	23.978	24.154	1.239.232	1.267.103	Ha
Jumlah Produksi Perkebunan Besar	1.325	2.075	18.181.627	17.878.049	ton
Produktivitas Perkebunan Besar	506	438	17.460	14.809	ton/Ha
Jumlah Tenaga Kerja Perkebunan Besar	8.358	5.651	126.087	193.364	orang

Sumber: Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 3.4.7 Luas Tanam, Produksi, dan Produktivitas Kelapa Sawit, Kelapa Dalam dan Karet Perkebunan Kecil/Rakyat di Provinsi Kalimantan Timur, 2024-2025

Perkebunan Kecil/Rakyat	Kelapa Sawit		Kelapa Dalam		Karet		Satuan
	2024	2025	2024	2025	2024	2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Luas Tanam Perkebunan	220.245	224.169	19.624	18.953	91.440	88.347	Ha
Jumlah Produksi Perkebunan	1.353.531	1.916.451	11.000	9.822	80.284	68.798	ton
Produktivitas Perkebunan	8.267	11.116	718	645	1.576	1.364	ton/Ha

Sumber: Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 3.4.8 Luas Tanam, Produksi, dan Produktivitas Kakao, Lada dan Kopi Perkebunan Kecil/Rakyat di Provinsi Kalimantan Timur, 2024-2025

Perkebunan Kecil/Rakyat	Kakao		Lada		Kopi		Satuan
	2024	2025	2024	2025	2024	2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Luas Tanam Perkebunan	7.755	7.832	7.779	6.193	1.350	1.294	Ha
Jumlah Produksi Perkebunan	975	1.030	5.875	4.797	200	124	ton
Produktivitas Perkebunan	393	400	1.036	1.042	300	264	ton/Ha

Sumber: Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 3.4.9 Luas Tanam, Produksi, dan Produktivitas Cengkeh, Aren dan Kemiri Perkebunan Kecil/Rakyat di Provinsi Kalimantan Timur, 2024-2025

Perkebunan Kecil/Rakyat	Cengkeh		Aren		Kemiri		Satuan
	2024	2025	2024	2025	2024	2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Luas Tanam Perkebunan	22	7	1.157	1.171	979	908	Ha
Jumlah Produksi Perkebunan	11	1	675	571	210	175	ton
Produktivitas Perkebunan	566	311	1.461	1.116	340	306	ton/Ha

Sumber: Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 3.4.10 Luas Tanam, Produksi, dan Produktivitas Kayu Manis, Panili dan Sagu Perkebunan Kecil/Rakyat di Provinsi Kalimantan Timur, 2024-2025

Perkebunan Kecil/Rakyat	Kayu Manis		Panili		Sagu		Satuan
	2024	2025	2024	2025	2024	2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Luas Tanam Perkebunan	1	0	9	6	32	31	Ha
Jumlah Produksi Perkebunan	0	0	8	3	8	12	ton
Produktivitas Perkebunan	0	0	2.143	857	800	850	ton/Ha

Sumber: Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 3.4.11 Luas Tanam, Produksi, dan Produktivitas Pala, Pinang dan Tebu Perkebunan Kecil/Rakyat di Provinsi Kalimantan Timur, 2024-2025

Perkebunan Kecil/Rakyat	Pala		Pinang		Tebu		Satuan
	2024	2025	2024	2025	2024	2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Luas Tanam Perkebunan	433	411	3	7	3	2	Ha
Jumlah Produksi Perkebunan	5	5	1	0	2	1	ton
Produktivitas Perkebunan	116	114	167	0	500	227	ton/Ha

Sumber: Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur

3.5 Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur



Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur merupakan perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pangan, serta urusan pertanian pada sub urusan tanaman pangan dan hortikultura. Dalam pelaksanaan tugasnya, dinas berperan dalam mendukung pembangunan sektor pangan melalui pembinaan, pengembangan produksi, peningkatan ketersediaan pangan, serta penguatan ketahanan pangan daerah.

Sebagai upaya mewujudkan kemandirian dan ketahanan pangan di Kalimantan Timur, Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura terus mendorong pengembangan kawasan sentra produksi pangan yang terpadu, modern, produktif, dan berkelanjutan. Upaya tersebut juga didukung melalui pengembangan diversifikasi pangan, peningkatan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura, serta penguatan kapasitas petani agar mampu meningkatkan hasil produksi dan daya saing.

Melalui berbagai program dan kegiatan yang terarah, Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura diharapkan dapat mendukung terwujudnya swasembada pangan, peningkatan kesejahteraan petani, serta pembangunan pertanian yang berkelanjutan menuju Kalimantan Timur yang maju dan berdaya saing.



Adapun tujuan jangka menegah Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur meliputi:

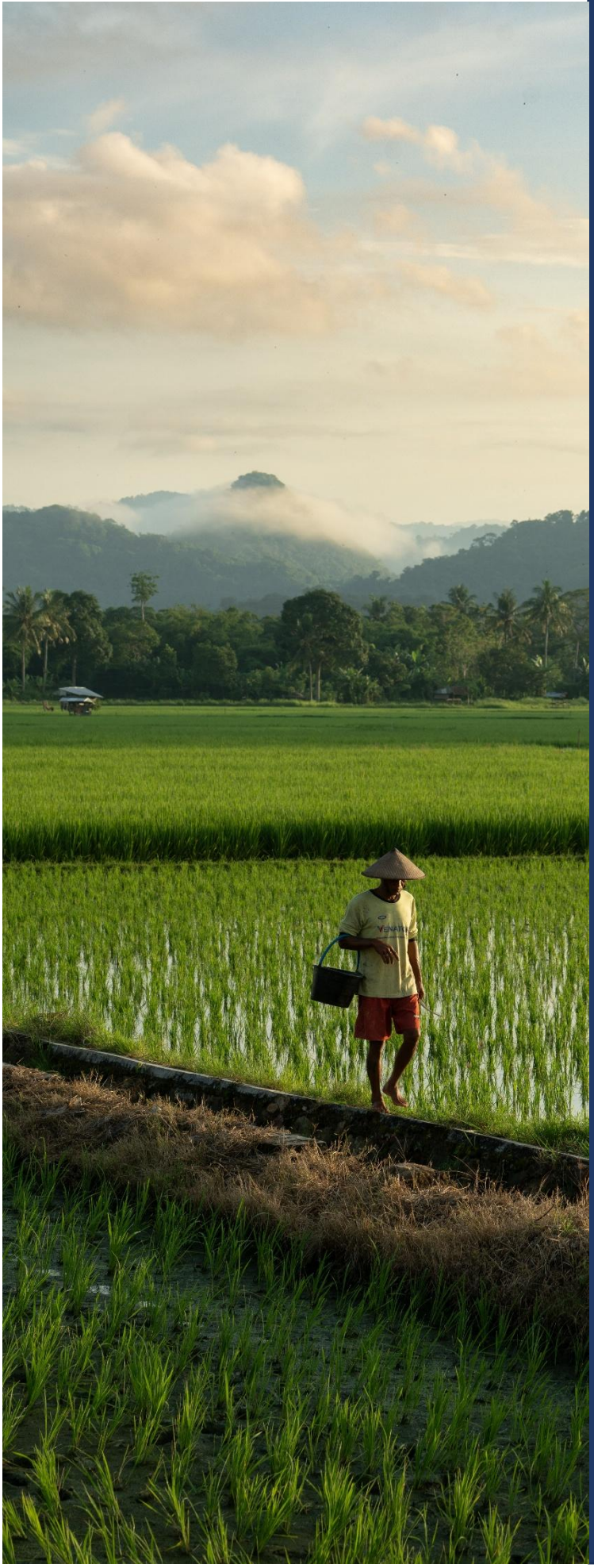
1. Tujuan: Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang inklustif dan berkelanjutan pada sektor pangan dan pertanian

   Strategi:

   - Pengembangan kawasan sentra produksi padi, jagung, kedelai berbasis potensi wilayah
   - Modernisasi budidaya melalui pemanfaatan alat dan mesin pertanian
   - Varietas unggul, dan irigasi
   - Penataan kawasan hortikultura seperti cabai, bawang, sayuran dataran tinggi, dan buah tropis; penyediaan benih unggul dan sarana produksi pertanian
   - Perlindungan usaha melalui asuransi dan mitigasi iklim
   - Peningkatan produksi pangan domestik
   - Diversifikasi pangan lokal
   - Penguatan cadangan dan distribusi pangan
   - Pengendalian konsumsi dan edukasi gizi
   - Penguatan data dan sistem informasi pangan
   - Pengembangan pertanian rendah emisi

   Arah Kebijakan: Meningkatkan produktivitas dan komoditas unggulan melalui peningkatan serta perluasan areal berbasis pertanian modern, mewujudkan pembangunan subsektor tanaman pangan dan hortikultura yang berkelanjutan,





memenuhi kebutuhan konsumsi pangan masyarakat, serta meningkatkan upaya penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK).

2. Tujuan/Sasaran: Meningkatnya daya saing dan kesejahteraan petani tanaman pangan dan hortikultura.

   Strategi:

   - Penguatan diversifikasi pangan
   - peningkatan penanganan kerawanan pangan
   - peningkatan pengawasan keamanan pangan
   - peningkatan produktivitas dan efisiensi usaha tani tanaman pangan
   - pengurangan biaya produksi dan risiko kegagalan panen
   - penguatan akses pasar dan tata niaga hasil pertanian
   - pengembangan hilirisasi dan nilai tambah produk tanaman pangan
   - peningkatan daya saing dan kelembagaan petani
   - pembangunan sistem informasi harga dan pasar berbasis digital

   Arah Kebijakan: Mewujudkan pembangunan subsektor tanaman pangan dan hortikultura yang berkelanjutan serta memenuhi kebutuhan konsumsi pangan masyarakat.

3. Tujuan/Sasaran: Tercukupinya kebutuhan pangan secara kuantitas dan kualitas

Strategi: Meningkatkan akses dan ketersediaan pangan serta memperbaiki pola konsumsi pangan masyarakat.

Arah Kebijakan: Mewujudkan pembangunan subsektor tanaman pangan dan hortikultura yang berkelanjutan serta memenuhi kebutuhan konsumsi pangan bagi masyarakat.

4. Tujuan/Sasaran: Meningkatnya upaya penurunan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) pada subsektor tanaman pangan dan hortikultura.

   Strategi: Mengembangkan pertanian rendah emisi (*low carbon agriculture*).

   Arah Kebijakan**:** Meningkatkan upaya penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) pada subsektor tanaman pangan dan hortikultura.

5. Tujuan/Sasaran: Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan layanan publik perangkat daerah.

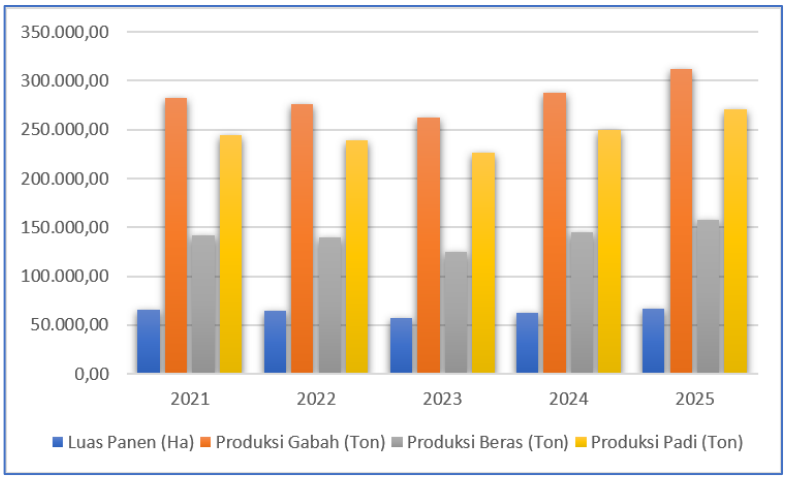
   Strategi: Meningkatkan efisiensi dan kualitas ketatalaksanaan perangkat daerah.

   Arah Kebijakan: Mewujudkan birokrasi pemerintahan yang akuntabel dan memiliki pelayanan publik berkualitas serta meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

Dalam Kerangka tersebut, sasaran Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur disusun sebagai bentuk hasil yang ingin dicapai dari setiap tujuan yang telah ditetapkan. Setiap sasaran dilengkapi dengan indikator yang terukur serta target yang jelas, sehingga pencapaiannya dapat dipantau dan dievaluasi secara lebih terarah. Oleh karena itu, sasaran dirumuskan secara rinci, spesifik, dan fokus agar pelaksanaan program dapat berjalan sesuai dengan arah pembangunan yang telah direncanakan.



Grafik 3.5.1 Grafik Perkembangan Luas Panen dan Produksi Padi di Kalimantan Timur, 2021-2025



Perkembangan luas panen dan produksi padi di Provinsi Kalimantan Timur selama periode 2021–2025 menunjukkan pola yang sempat menurun sebelum kembali mengalami peningkatan. Luas panen tercatat sebesar 66.269,50 hektare pada tahun 2021, kemudian menurun hingga mencapai titik terendah sebesar 57.082,01 hektare pada tahun 2023. Setelah itu, luas panen kembali meningkat menjadi 63.041,76 hektare pada tahun 2024 dan mencapai 66.517,91 hentare pada tahun 2025. Perubahan tersebut sejalan dengan produksi gabah yang turun dari 282.309,87 ton pada tahun 2021 menjadi 261.880,78 ton pada tahun 2023, kemudian meningkat menjadi 288.038,76 pada tahun 2024 dan 312.526,73 ton pada tahun 2025.

Perkembangan serupa juga terlihat pada produksi beras dan produksi padi. Produksi beras menurun dari 142.321,38 ton pada 2021 menjadi 125.227,66 ton pada 2023, sebelum meningkat menjadi 145.209,53 ton pada 2024 dan 157.554,69 ton pada 2025. Sementara itu, produksi padi turun hingga 226.972,07 ton pada 2023, kemudian naik menjadi 249.643,19 ton pada 2024 dan mencapai 270.866,92 ton pada 2025. Secara keseluruhan, tahun 2025 menunjukkan capaian tertinggi selama periode

tersebut, baik dari sisi luas panen maupun produksi, yang mencerminkan adanya pemulihan dan peningkatan hasil pertanian padi setelah penurunan yang terjadi hingga tahun 2023.

Tabel 3.5.1 Perkembangan Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Tanaman Pangan menurut Jenis di Provinsi Kalimantan Timur, 2024 dan 2025

Tanaman Pangan	Luas Panen (M^2)		Produksi (Ton)		Produktivitas (Kw/Ha)	
	2024	2025	2024	2025	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Padi						
1. Produksi Gabah			288.038,76	312.526,73		
2. Produksi Beras	63.041,76	66.517,91	145.209,53	157.554,69	39,60	40,72
3. Produksi Padi			249.643,19	270.866,92		
Jagung	919,00	2.108,00	3,955,00	10.292,00	43,04	48,82
Kacang Kedelai	11,30	11,00	18,46	18,28	16,34	16,61
Kacang Hijau	56,10	9,45	64,00	10,05	11,41	10,63
Kacang Tanah	445,10	327,20	718,38	396,64	16,14	12,12
Ubi Kayu	1.958,10	1.650,70	61.322,10	48.014,74	313,17	290,87
Ubi Jalar	661,90	573,10	10.064,31	9.362,72	152,05	163,37

Sumber : Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 3.5.2 Perkembangan Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Tanaman Sayuran dan Buah-buahan Semusim menurut Jenis di Provinsi Kalimantan Timur, 2024 dan 2025

Tanaman Sayuran	Luas Areal (Ha)		Produksi (Ton)		Produktivitas (Ton/Ha)	
	2024	2025	2024	2025	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Bawang Daun	183,09	214,00	542,19	801,00	2,96	3,74
Bawang Merah	55,81	22,00	344,46	91,00	6,17	4,16
Bayam	1.013,57	999,00	4.825,50	3.891,00	4,76	3,89
Buncis	452,16	333,00	2.862,50	2.644,00	6,33	7,94
Cabai Besar	839,91	679,00	4.786,38	4.424,00	5,70	6,52
Cabai Besar/TW/ Teropong	230,83	202,00	1.007,35	1.103,00	4,36	5,47
Cabai Keriting	609,08	477,00	3.779,03	3.321,00	6,20	6,96
Cabai Rawit	1.218,70	1.153,00	6.467,57	7.236,00	5,31	6,28
Jamur Tiram	4,39	1,00	195,99	203,00	0,02	165,85
Jengkol	14.851,00	14.175,00	1.087,84	684,00	0,07	4,83
Kacang Panjang	866,03	731,00	5.500,04	6.093,00	6,35	8,34
Kangkung	1.172,18	1.199,00	9.094,36	7.095,00	7,76	5,92
Kembang Kol	40,10	26,00	122,43	81,00	3,05	3,09
Kubis	0,30	1,00	5,16	5,00	17,20	6,93
Labu Siam	64,51	70,00	341,90	424,00	5,30	6,07
Melinjo	9.044,00	9.623,00	419,54	452,00	0,05	13,96
Melon	92,30	134,00	822,65	1.369,00	8,91	10,19
Mentimun	766,61	700,00	9471,11	7.457,00	12,35	10,65
Paprika	-	-	-	-	-	-
Petai	14.867,00	13.035,00	969,36	896,00	0,07	6,87
Petsai/Sawi	1.077,29	1.112,00	5.760,99	5.332,00	5,35	4,80
Semangka	1.047,56	897,00	10.449,52	8.478,00	9,98	9,45
Terung	838,03	735,00	8.862,31	7.743,00	10,58	10,54
Tomat	669,65	573,00	6.526,94	3.390,00	9,75	9,75

Sumber : Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 3.5.3 Perkembangan Produksi, Produktivitas, dan Tanaman Menghasilkan Tanaman Buah-buahan menurut Jenis di Provinsi Kalimantan Timur, 2024 dan 2025

Tanaman Buah-buahan	Produksi (Ton)		Produktivitas (Ton/Pohon)		Tanaman Menghasilkan (Pohon)	
	2024	2025	2024	2025	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Alpukat	1.145,93	1.546,00	0,07	8,64	16.284,00	17.903,00
Belimbing	1.134,19	1.052,00	0,08	20,54	14.229,00	15.363,00
Buah Naga	10.528,34	18.155,00	0,04	60,32	280.765,00	300.982,00
Duku/Langsat	4.244,91	2.161,00	0,07	9,18	60.608,00	23.548,00
Durian/Lai	9.869,51	10.539,00	0,07	11,54	146.028,00	91.322,00
Jambu Air	2.738,08	2.619,00	0,10	11,00	27.380,81	23.809,00
Jambu Biji	8.068,87	4.067,00	0,18	34,66	43.765,00	35.200,00
Jeruk	7.349,35	9.518,00	0,05	0,06	149.581,00	151.951,00
Jeruk Lemon	875,92	790,00	0,06	35,05	14.161,00	18.025,00
Jeruk Pamelo	187,27	259,00	0,05	1818	3.406,00	2.222,00
Jeruk Siam/Keprok	5.779,08	8.469,00	0,04	25,72	138.299,00	131.704,00
Lengkeng	2.580,27	4.192,00	0,10	23,20	24.785,00	36.136,00
Mangga	7.498,55	4.803,00	0,11	8,77	65.507,00	54.750,00
Manggis	431,87	365,00	0,06	10,40	6.796,00	3.511,00
Melinjo	419,54	452,00	0,05	13,06	9.044,00	9.623,00
Nanas	70.988,24	79.209,00	0,01	180,30	13.198.430,00	10.938.044,00
Nangka/ Cempedak	25.213,92	12.631,00	0,19	15,50	133.972,00	81.486,00
Pepaya	12.882,31	14.480,00	0,07	74,56	185.695,00	194.191,00
Pisang	159.119,69	129.386,00	0,10	41,93	1.653.444,00	1.234.354,00
Rambutan	12.064,94	12.784,00	0,05	7,79	245.267,00	1.641.97,00
Salak	15.546,20	9.923,00	0,02	37,24	716.718,00	53.2952,00
Sawo	1.446,40	1.038,00	0,08	6,19	18.106,00	16.761,00
Sirsak	1.103,20	695,00	0,04	8,01	26.260,00	26.003,00
Sukun	1.838,43	1.961,00	0,08	8,98	21.665,00	21.839,00

Sumber : Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 3.5.4 Perkembangan Luas Areal, Produktivitas, dan Produksi Tanaman Bio Farmaka di Provinsi Kalimantan Timur, 2024 dan 2025

Tanaman Bio Farmaka	Luas Areal (Ha)		Produksi (Ton)		Produktivitas (Ton/Ha)	
	2024	2025	2024	2025	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jahe	20,550	28,450	422,890	275,050	20,580	9,670
Jeruk Nipis	149.994,000	93.405,000	2.424,900	1.853,000	0,020	0,020
Kapulaga	0,130	0,020	1,760	0,240	13,840	14,390
Kencur	5,380	3,350	79,800	76,710	14,840	22,880
Kunyit	8,160	6,910	197,890	217,820	24,250	31,520
Laos/Lengkuas	7,030	8,200	229,290	203,450	32,600	24,820
Lempuyang	0,080	0,090	2,620	1,950	34,110	22,930
Lidah Buaya	0,140	0,110	4,830	1,220	35,240	11,150
Mahkota Dewa	2.227,000	561,000	61,820	7,930	0,030	0,010
Mengkudu/Pace	3.862,000	2.823,000	60,910	18,740	0,020	0,007
Sambiloto	0,040	0,004	0,480	0,020	11,900	4,860
Serai Hijau	21,260	17,970	1.319,320	718,170	62,050	39,970
Temu Ireng	0,370	0,170	20,060	4,810	54,540	27,500
Temu Kunci	0,140	0,100	4,810	3,140	35,470	32,430
Temu Lawak	1,180	1,000	45,250	27,650	38,250	35,770

Sumber : Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 3.5.5 Perkembangan Luas Areal, Produktivitas, dan Produksi Tanaman Hias di Provinsi Kalimantan Timur, 2024 dan 2025

Tanaman Hias	Luas Areal (M2)		Produksi (Pohon)		Produktivitas (Pohon/M2)	
	2024	2025	2024	2025	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aglonema	1.346,00	738,00	11.123,00	1.308,00	8,26	1,77
Anggrek Pot	2.655,00	196,00	16.796,00	203,00	6,33	1,04
Anggrek Potong	3.165,00	221,00	40.803,00	370,00	12,89	1,67
Anthurium Bunga	1.136,00	58,00	10.468,00	101,00	9,21	1,74
Bromelia	107,00	40,00	532,00	40,00	4,97	1,00
Bugenvil	1.630,00	107,00	8.286,00	354,00	5,08	3,31
Cordyline	90,00	35,00	984,00	35,00	10,93	1,00
Dracaena	720,00	124,00	2.655,00	124,00	3,69	1,00
Gerbera (Herbras)	330,00	10,00	585,00	50,00	1,77	5,00
Heliconia (Pisang-Pisangan)	567,00	281,00	2.719,00	981,00	4,80	3,49
Ixora (Soka)	3.679,00	42,00	40.499,00	147,00	11,01	3,50
Krisan	231,00	40,00	376,00	80,00	1,63	2,00
Mawar	23.142,00	4.618,00	149.120,00	5.009,00	6,44	1,08
Melati	42.922,00	206,00	48.912,00	393,00	1,14	1,91
Pakis	938,00	137,00	16.306,00	366,00	17,38	2,67
Palem	939,00	396,00	2.657,00	952,00	2,83	2,40
Phylodendron	529,00	30,00	3.925,00	30,00	7,42	1,00
Puring	861,00	185,00	3.887,00	248,00	4,51	1,34
Sansevieria (Lidah Mertua)	432,00	99,00	2.491,00	99,00	5,77	1,00
Sedap Malam	170,00	45,00	906,00	81,00	5,33	1,80

Sumber : Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur

3.6 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur



Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2001 yang kemudian ditindaklanjuti melalui Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 03 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Provinsi Kalimantan Timur. Dinas ini merupakan unsur pelaksana Pemerintah Provinsi yang memiliki tugas utama melaksanakan kewenangan desentralisasi serta tugas dekonsentrasi di bidang pembangunan kelautan dan perikanan. Dalam menjalankan tugasnya, Dinas Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa dan aspirasi masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 10, Pemerintah Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama.

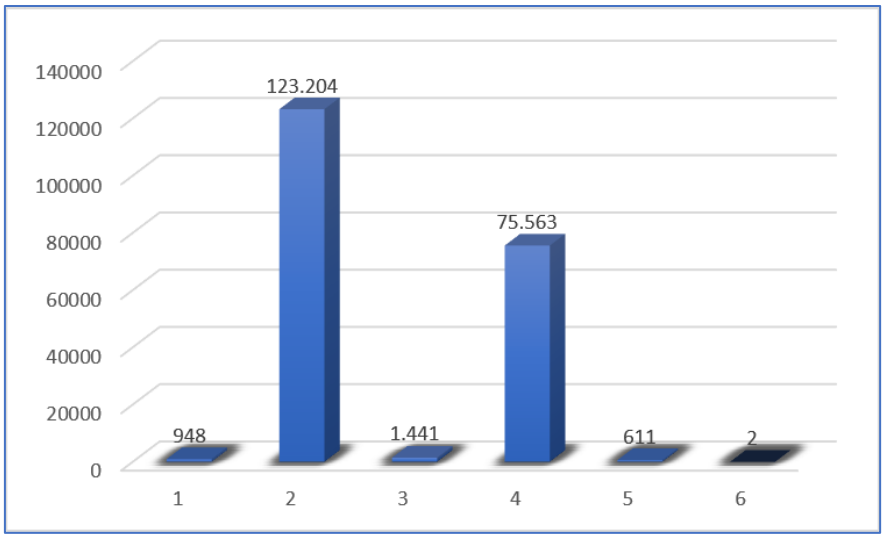


Selanjutnya, Pasal 11 ayat (3) menyebutkan bahwa kewenangan pemerintah daerah terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) mencakup urusan pemerintahan yang secara nyata terdapat di daerah dan berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, karakteristik, serta potensi unggulan daerah. Atas dasar tersebut, pembentukan Dinas Kelautan dan Perikanan diarahkan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan potensi dan keunggulan sektor kelautan dan perikanan di Kalimantan Timur.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Dinas Kelautan dan Perikanan ditetapkan sebagai Organisasi Perangkat Daerah tipe A. Struktur organisasinya terdiri atas empat bidang dan satu sekretariat, dengan kantor yang beralamat di Jalan Kesuma Bangsa Nomor 1, Samarinda.



Grafik 3.6.1 Produksi Perikanan Budidaya Menurut Jenis di Provinsi Kalimantan Timur, Tahun 2025



Grafik ini memberikan gambaran mengenai produksi perikanan budidaya menurut jenis usaha di Provinsi Kalimantan Timur pada Tahun 2025. Produksi perikanan budidaya terbesar berasal dari tambak dengan jumlah mencapai 123.204 ton, diikuti oleh keramba sebesar 75.563 ton. Sementara itu, produksi dari kolam air tawar tercatat sebesar 1.441 ton dan jaring apung tawar sebesar 948 ton. Produksi budidaya laut/pantai mencapai 611 ton, sedangkan produksi melalui sawah menjadi yang paling rendah, yaitu hanya 2 ton.

Berdasarkan data tersebut, produksi perikanan budidaya di Kalimantan Timur Tahun 2025 masih sangat didominasi oleh usaha tambak dan keramba. Kedua jenis budidaya tersebut memiliki produksi yang jauh lebih besar dibandingkan jenis budidaya lainnya, menunjukkan besarnya peran tambak dan keramba dalam mendukung produksi perikanan budidaya daerah. Di sisi lain, budidaya melalui kolam, jaring apung tawar, laut/pantai, dan sawah masih memberikan kontribusi yang relatif lebih kecil.

Secara keseluruhan, produksi dari enam jenis usaha perikanan budidaya tersebut mencapai sekitar 201.769 ton pada Tahun 2025. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengembangan sektor perikanan budidaya di Kalimantan Timur memiliki potensi yang besar, khususnya pada usaha tambak dan keramba. Pengembangan budidaya perikanan perlu terus didorong untuk meningkatkan produksi dan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 3.6.1 Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Budidaya Menurut Jenis Usaha di Provinsi Kalimantan Timur, 2024 dan 2025

Kategori	Produksi (ton)		Nilai Produksi (Rp)	
	2024	2025	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Budidaya Jaring Apung	575	948*	16.789.859	14.221.397
Budidaya Tambak	142	123.204*	3.614.612.739	4.359.996.714*
Budidaya Kolam	5,681	1.441*	168.498.225	257.584.741*
Budidaya Keramba	87,25	75.563*	2.880.343.686	3.088.049.838*
Budidaya Laut/Pantai	7,155	611*	41.232.320	40.189.893*
Budidaya Sawah	9	2	312,615	276.69*

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur

*):Angka Sementara, Menunggu Validasi Nasional 2025 Pusdatin KKP RI

Tabel 3.6.2 Jumlah Nelayan dan Pembudidaya Ikan di Provinsi Kalimantan Timur, 2024 dan 2025

Kategori	Tahun		Satuan
	2024	2025	
(1)	(2)	(3)	(4)
Nelayan Laut Perikanan Tangkap	67,85	37,144	Orang
Nelayan Perairan Umum Daratan	74,45	39,247	Orang
Jumlah Nelayan	142,3	76,391	Orang

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 3.6.3 Rumah Tangga Perikanan Menurut Jenis Usaha di Provinsi Kalimantan Timur, 2024 dan 2025

Kategori	Tahun		Satuan
	2024	2025	
(1)	(2)	(3)	(4)
Perikanan Laut	6,306	21,131	RTP
Perairan Umum	45,02	39,247	RTP
Perikanan Armada/kapal	1.137.734	1.237.243	RTP
Budidaya Jaring Apung	191	231*	RTP
Budidaya Tambak	9.418	9.765*	RTP
Budidaya Kolam	7.224	7.345*	RTP
Budidaya Keramba	11,19	11.244*	RTP
Budidaya Laut/Pantai	650	710*	RTP
Budidaya Sawah	56	57	RTP
Perikanan Budidaya	28,77	28.773*	RTP

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur

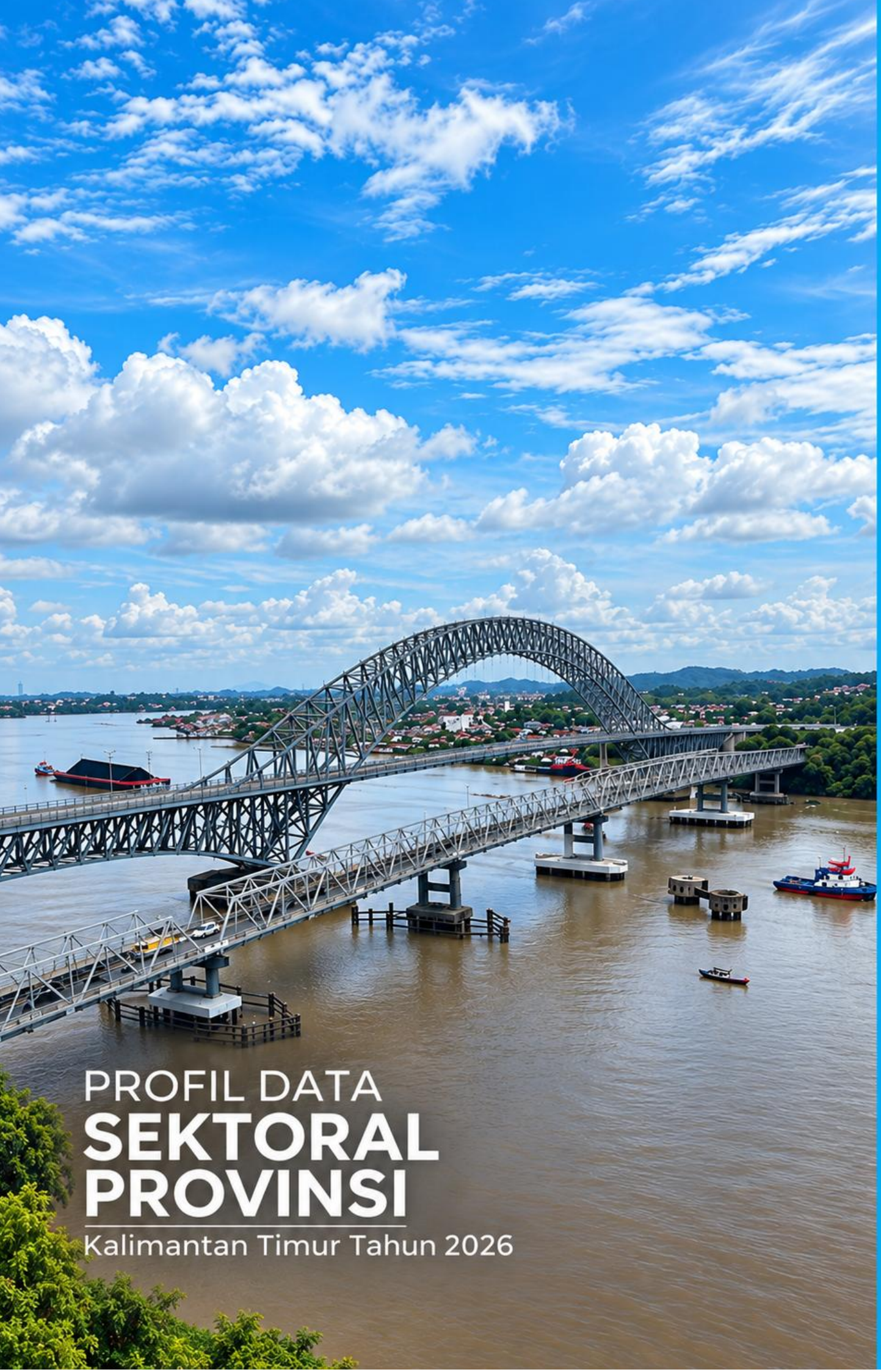
*):Angka Sementara, Menunggu Validasi Nasional 2025 Pusdatin KKP RI

Tabel 3.6.4 Luas Wilayah, Ekosistem, dan Lahan Perikanan di Provinsi Kalimantan Timur, 2024 dan 2025

Kategori	Tahun		Satuan
	2024	2025	
(1)	(2)	(3)	(4)
Luas Wilayah penangkapan	2.004.709,31	2.004.709,31*	ha
Luas Lahan Ekosistem Laut	322,859	322.859*	ha
Luas Hutan Bakau/Mangrove (wilayah Pesisir)	244,437	244,437	ha
Luas Terumbu Karang	105,577	105,577	ha
Luas Padang Lamun	13,123	13,123	ha
Luas Perikanan Budidaya	99,652	101,124	ha
Luas Perairan Umum	1.005.601,227	1.026.876.324	ha
Luas Lahan Jaring Apung Tawar	11,80	11,80	ha
Luas Lahan Keramba	165,32	165,32	ha
Luas Lahan Kolam Air Tawar	542	554	ha
Luas Lahan Tambak Ikan	140	165	ha
Luas Lahan Budidaya Laut/Pantai	140	142	ha
Luas Laut	4,54	4,54	Juta ha

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur

*):Angka Sementara, Menunggu Validasi Nasional 2025 Pusdatin KKP RI



PROFIL DATA SEKTORAL PROVINSI

Kalimantan Timur Tahun 2026

Pada tahun 2025
di Kalimantan Timur terdapat

6 BANDARA
YANG SUDAH BEROPERASI



13 PELABUHAN LAUT

BAB IV
PERHUBUNGAN DAN INFRASTRUKTUR

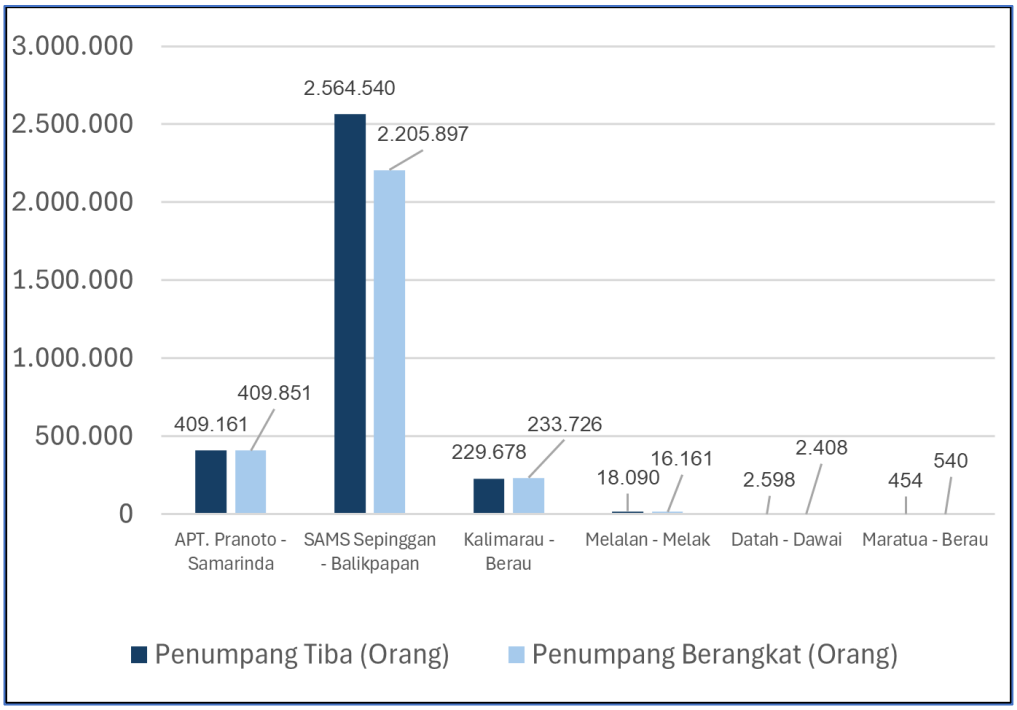
4.1 Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur

Dinas Perhubungan memiliki peran penting dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang perhubungan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan tugas pembantuan. Mengacu pada Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 63 Tahun 2016, Dinas Perhubungan bertanggung jawab dalam menyusun, merencanakan, mengarahkan, serta mengendalikan pelaksanaan kebijakan teknis di sektor perhubungan sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah. Ruang lingkup tugas Dinas Perhubungan mencakup bidang lalu lintas dan angkutan jalan, pelayaran, pengembangan transportasi, serta perkeretaapian. Selain menjalankan fungsi teknis, Dinas Perhubungan juga melaksanakan pengelolaan administrasi, Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), serta pembinaan kelompok jabatan fungsional. Berbagai tugas tersebut dilaksanakan untuk mendukung terciptanya pelayanan transportasi yang aman, tertib, lancar, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta pembangunan daerah.



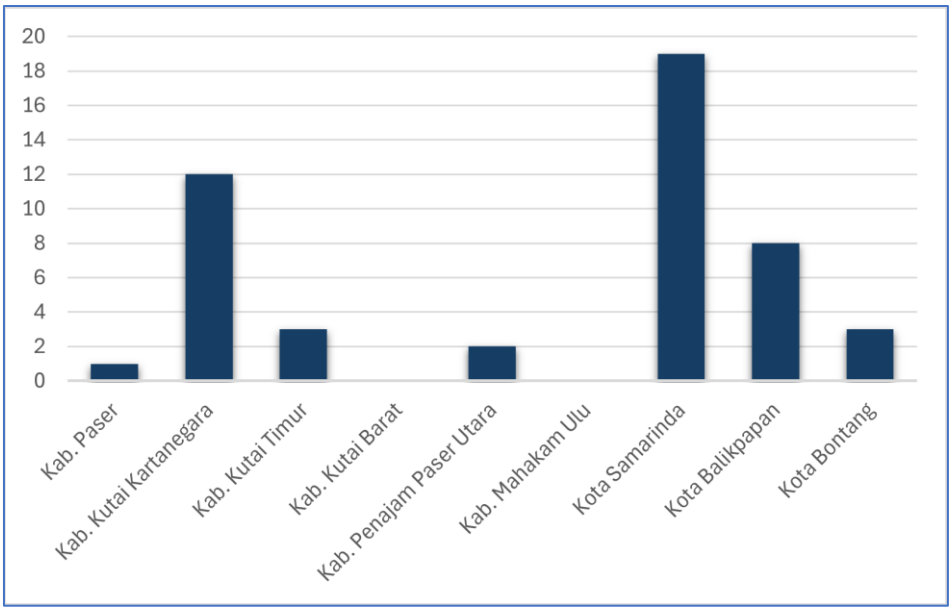


Grafik 4.1.1 Jumlah Penumpang Pesawat Udara Menurut Bandara di Kalimantan Timur, 2025



Pada tahun 2025, jumlah penumpang pesawat udara di Kalimantan Timur tercatat sebanyak 6,09 juta orang, yang terdiri atas 3,22 juta penumpang tiba dan 2,87 juta penumpang berangkat. Bandara SAMS Sepinggan Balikpapan menjadi bandara dengan jumlah penumpang terbesar, yaitu sekitar 4,77 juta orang atau 78% dari keseluruhan penumpang. Selanjutnya, Bandara APT. Pranoto Samarinda melayani sekitar 819 ribu penumpang, disusul Bandara Kalimarau Berau dengan sekitar 463 ribu penumpang. Sementara itu, Bandara Melalan Melak, Datah Dawai, dan Maratua Berau mencatat jumlah penumpang yang lebih rendah. Kondisi ini menunjukkan bahwa pergerakan penumpang udara di Kalimantan Timur masih terpusat pada beberapa bandara utama. Peningkatan konektivitas serta pengembangan infrastruktur transportasi udara diharapkan dapat memperluas jangkauan pelayanan penerbangan antarwilayah di Kalimantan Timur.

Grafik 4.1.2 Sebaran Izin Trayek Perkotaan Menurut Kabupaten/ Kota di Kalimantan Timur, 2025



Pada tahun 2025, jumlah izin trayek perkotaan di Provinsi Kalimantan Timur tercatat sebanyak 48 trayek yang tersebar di beberapa kabupaten/kota. Kota Samarinda memiliki jumlah izin trayek terbanyak dengan 19 trayek, disusul oleh Kabupaten Kutai Kartanegara sebanyak 12 trayek dan Kota Balikpapan sebanyak 8 trayek. Sementara itu, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang masing-masing memiliki 3 trayek, Kabupaten Penajam Paser Utara sebanyak 2 trayek, serta Kabupaten Paser sebanyak 1 trayek. Adapun Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Mahakam Ulu belum memiliki izin trayek perkotaan yang tercatat pada tahun ini. Kondisi ini memperlihatkan bahwa izin trayek perkotaan masih lebih banyak terdapat di wilayah dengan aktivitas perkotaan dan mobilitas masyarakat yang tinggi, sedangkan di beberapa kabupaten lainnya jumlah trayek masih terbatas atau belum tersedia.

Tabel 4.1.1 Jumlah Penumpang Pesawat Udara Menurut Bandara di Kalimantan Timur, 2025

Bandara	Penumpang Tiba (Orang)	Penumpang Berangkat (Orang)	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
APT. Pranoto - Samarinda	409.161	409.851	819.012
SAMS Sepinggan - Balikpapan	2.564.540	2.205.897	4.770.437
Kalimarau - Berau	229.678	233.726	463.404
Melalan - Melak	18.090	16.161	34.251
Datah - Dawai	2.598	2.408	5.006
Maratua - Berau	454	540	994
Jumlah	**3.224.521**	**2.868.583**	**6.093.104**

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 4.1.2 Jumlah Barang yang Dimuat dan Dibongkar Melalui Bandara di Kalimantan Timur, 2025

Bandara	Barang Dimuat (Kg)	Barang Dibongkar (Kg)	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
APT. Pranoto - Samarinda	589.478	3.851.620	4.441.098
SAMS Sepinggan - Balikpapan	15.086.524	39.286.043	54.372.567
Kalimarau - Berau	380.710	1.380.508	1.761.218
Melalan - Melak	22.819	970	23.789
Datah - Dawai	176	5.251	5.427
Maratua - Berau	36	-	36
Jumlah	**16.079.743**	**44.524.392**	**60.604.135**

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 4.1.3 Jumlah Angkutan Umum di Provinsi Kalimantan Timur, 2025

Jenis Kendaraan	Jumlah
(1)	(2)
Mobil Penumpang Umum	1057
Mobil Bus	908
-- Bus Besar	121
-- Bus Sedang	692
-- Bus Kecil	95
Mobil Barang	366
Jumlah Angkutan Umum	**2644**

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 4.1.4 Sebaran Izin Trayek Perkotaan Menurut Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur, 2025

Kabupaten/Kota	Jumlah Trayek
(1)	(2)
Paser	1
Kutai Barat	-
Kutai Kartanegara	12
Kutai Timur	3
Berau	-
Penajam Paser Utara	2
Mahakam Ulu	-
Kota Balikpapan	8
Kota Samarinda	19
Kota Bontang	3
Kalimantan Timur	**48**

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 4.1.5 Jumlah Izin Trayek Angkutan Umum di Provinsi Kalimantan Timur, 2025

Jenis Trayek	Jumlah (Trayek)
(1)	(2)
Antarkota Antarprovinsi	4
Antarkota Dalamprovinsi	261
Perkotaan	48
Jumlah Izin Trayek	**265**

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur

4.2 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur

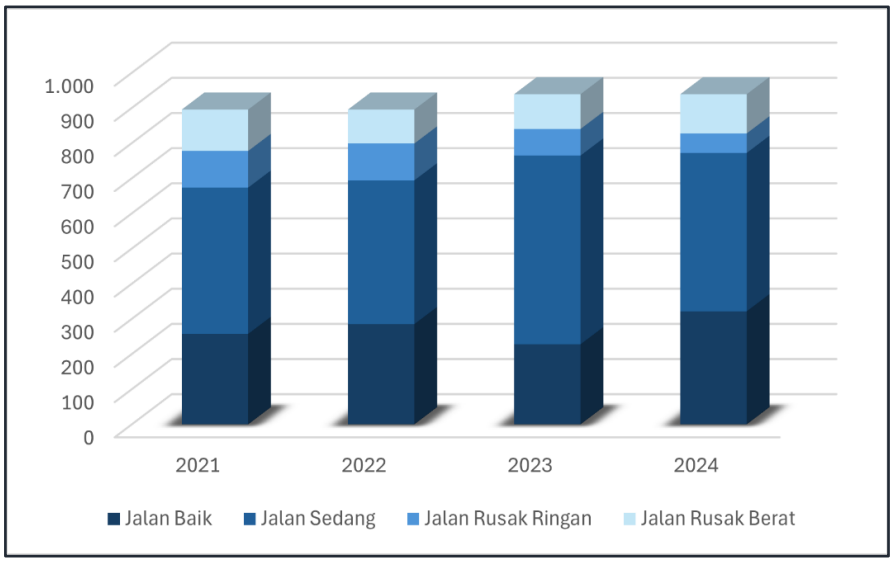
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur memiliki tugas dan fungsi yang berpedoman pada Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 56 Tahun 2016. Dalam pelaksanaan tugasnya, dinas ini berperan dalam penyusunan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, serta pengembangan teknis pada bidang sumber daya air, cipta karya, tata ruang, pemanfaatan ruang, dan perumahan. Setiap bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan membawahi beberapa seksi sesuai dengan lingkup tugasnya. Melalui pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, dinas ini memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan infrastruktur, penataan wilayah, pengelolaan sumber daya, serta pengembangan kawasan permukiman di Provinsi Kalimantan Timur.

Grafik 4.2.1 Panjang Jalan Nasional di Provinsi Kalimantan Timur menurut Kondisinya (km),2021-2024



Pada tahun 2024, kondisi jalan nasional di Provinsi Kalimantan Timur masih didominasi oleh kategori sedang sepanjang 1.143,13 km, kemudian diikuti jalan dalam kondisi baik sepanjang 477,23 km, rusak ringan 147,39 km, dan rusak berat 39,01 km. Jika dibandingkan dengan tahun 2023, panjang jalan berkondisi baik mengalami peningkatan, sementara jalan dengan kondisi sedang mengalami penurunan. Di sisi lain, jalan rusak ringan sedikit bertambah, sedangkan jalan rusak berat mengalami penurunan yang cukup besar. Secara keseluruhan, perubahan tersebut menunjukkan adanya peningkatan kondisi jaringan jalan nasional di Kalimantan Timur pada tahun 2024.

Grafik 4.2.2 Panjang Jalan Provinsi Timur menurut Kondisinya (km) di Provinsi Kalimantan, 2021-2024



Pada tahun 2024, jalan provinsi di Kalimantan Timur didominasi oleh kondisi sedang sepanjang 450,46 km, kemudian diikuti jalan dalam kondisi baik sepanjang 321,38 km. Adapun jalan rusak berat tercatat sepanjang 111,46 km, sedangkan jalan rusak ringan mencapai 55,55 km. Dibandingkan dengan tahun 2023, panjang jalan berkondisi baik mengalami peningkatan, sementara jalan berkondisi sedang dan rusak ringan mengalami penurunan. Di sisi lain, jalan dengan kondisi rusak berat mengalami peningkatan pada tahun 2024.

Selama periode 2021–2024, kondisi jalan provinsi di Kalimantan Timur mengalami perubahan yang cukup beragam. Panjang jalan rusak ringan cenderung menurun setiap tahun, yang mencerminkan adanya upaya pemeliharaan dan perbaikan jalan. Sementara itu, jalan rusak berat kembali meningkat pada tahun 2024 setelah sebelumnya sempat menurun pada tahun 2022. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penanganan pada ruas jalan dengan tingkat kerusakan berat masih perlu ditingkatkan. Secara keseluruhan, perkembangan kondisi jalan provinsi menunjukkan kecenderungan perbaikan dari tahun ke tahun.





Tabel 4.2.1 Capaian Penanganan Air Baku di Provinsi Kalimantan Timur, 2024

Paket	"Target Outcome" lt/dtk	Jumlah (unit)	TW IV Outcome lt/dtk
(1)	(2)	(3)	(4)
Pembangunan Sumur Dalam (Deep Well) Jl. Siagian Kel. Api Api Kota Bontang	20	1	20
Pembangunan Sumur Dalam Jl. Bhayangkara Kota Bontang	20	1	20
Pembangunan Sumur Dalam Gudang Tanjung Laut Indah Kota Bontang	20	1	20
Pembangunan Sumur Dalam Muara Jawa Kab. Kutai Kartanegara	19	1	19
Pembangunan Sumur Dalam STD Tanjung Laut Bontang	19	1	19
Penyediaan Air Baku Kota Bontang	0	1	0
Sumur Loa Janan Kukar	4		5
Penyediaan Air Baku dan Rehabilitasi Bendung Babulu beserta Jaringannya Kab. Penajam Paser Utara (Swakelola Tipe II) (Pergeseran 4)	12		10
Penyediaan Air Baku dan Rehabilitasi Bendung Babulu beserta Jaringannya Kab. Penajam Paser Utara (Swakelola Tipe II)	12	1	20
Jumlah	**126**		**133**

Sumber: Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 4.2.2 Luas Sawah Terlayani Irigasi di Provinsi Kalimantan Timur, 2025

Nama Daerah Irigasi	Luas Areal (Ha)	Lokasi	Sumber Air
(1)	(2)	(3)	(4)
D.I. Biatan	142,82	Kab. Berau	Mata Air Tumbit dan Sungai Tumbit
D.I. Labanan	270,13	Kab. Berau	Sei. Penjaringan dan Sei. Niram
D.I. Semurut	380,42	Kab. Berau	Sei. Semurut
D.I. Merancang	330,91	Kab. Berau	Sei. Selubuk
D.I. Marangkayu	503,48	Kab. Berau	Sei. Marangkayu
D.I. Kaliorang	165,12	Kab. Kutai Timur	Sei. Progo
D.I. Sei Buluh	163,76	Kab. Kukar	Sei. Buluh
D.I. Selangkau	195,55	Kab. Kutai Timur	Sei. Selangkau
Total	**2.152,19**		

Sumber: Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 4.2.3 Panjang Jalan Nasional dan Jalan Provinsi di Provinsi Kalimantan Timur Menurut Kondisi (km), 2021-2024

Jenis Jalan	Tahun			
	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Jalan Nasional	1.706,23	1.707,86	1.806,75	1.806,76
1. Kondisi Baik	305,83	442,50	285,30	477,23
2. Kondisi Sedang	1,097,78	988,11	1,284,46	1,143,13
3. Kondisi Rusak Ringan	224,43	179,11	136,41	147,39
4. Kondisi Rusak Berat	78,19	98,14	100,58	39,01
Jalan Provinsi	895,10	895,09	938,85	938,85
1. Kondisi Baik	257,03	284,86	227,51	321,38
2. Kondisi Sedang	416,10	409,00	536,84	450,46
3. Kondisi Rusak Ringan	104,30	104,81	75,72	55,55
4. Kondisi Rusak Berat	117,67	96,42	98,78	111,46

Sumber: Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 4.2.4 Panjang Jalan Nasional dan Jalan Provinsi di Provinsi Kalimantan Timur Menurut Jenis Permukaan Jalan (km), 2021-2024

Jenis Jalan	Tahun			
	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Jalan Nasional	1.706,23	1.707,86	1.806,75	1.806,76
1. Aspal	1.418,83	1.420,46	1.442,02	1.447,54
2. Kerikil	-	-	0,20	0,20
3. Tanah	-	-	-	-
4. Cor Beton	287,40	287,40	364,53	359,02
Jalan Provinsi	895,09	895,09	938,85	938,85
1. Aspal	475,11	465,29	467,00	412,16
2. Kerikil	141,65	127,59	83,51	81,97
3. Tanah	29,19	27,17	1,38	0,65
4. Cor Beton	249,14	275,04	386,96	444,07

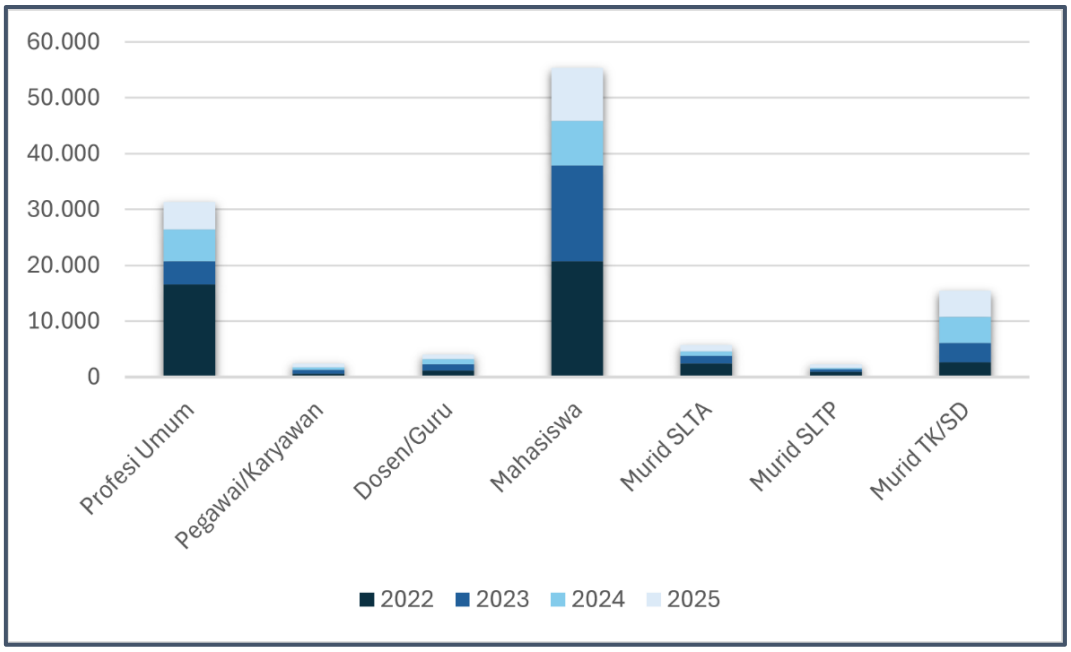
Sumber: Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Timur



4.3 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kalimantan Timur memiliki tugas dalam membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perpustakaan dan kearsipan. Dalam menjalankan tugas tersebut, dinas menyediakan berbagai jenis layanan kepada masyarakat. Pada bidang kearsipan, layanan yang diberikan antara lain pemantauan dan audit eksternal kearsipan, penilaian kinerja jabatan fungsional arsiparis, kunjungan wisata arsip, serta akuisisi arsip. Sementara itu, pada bidang perpustakaan tersedia layanan baca di tempat untuk berbagai koleksi, GOBOOK, koleksi audio visual, surat keterangan bebas pustaka, perpustakaan digital Kaltim, pojok buku elektronik (PaDi), perpustakaan keliling, layanan mendongeng (*story telling*), serta layanan sirkulasi berupa peminjaman dan pengembalian buku. Selain itu, tersedia pula layanan penitipan barang (*locker*), keanggotaan perpustakaan, kunjungan atau wisata perpustakaan, serta layanan informasi dan pengaduan masyarakat. Melalui berbagai layanan tersebut.

Grafik 4.3.1 Jumlah Pengunjung Perpustakaan Daerah Provinsi Kaltim Berdasarkan segmentasi Pengunjung, 2022-2025



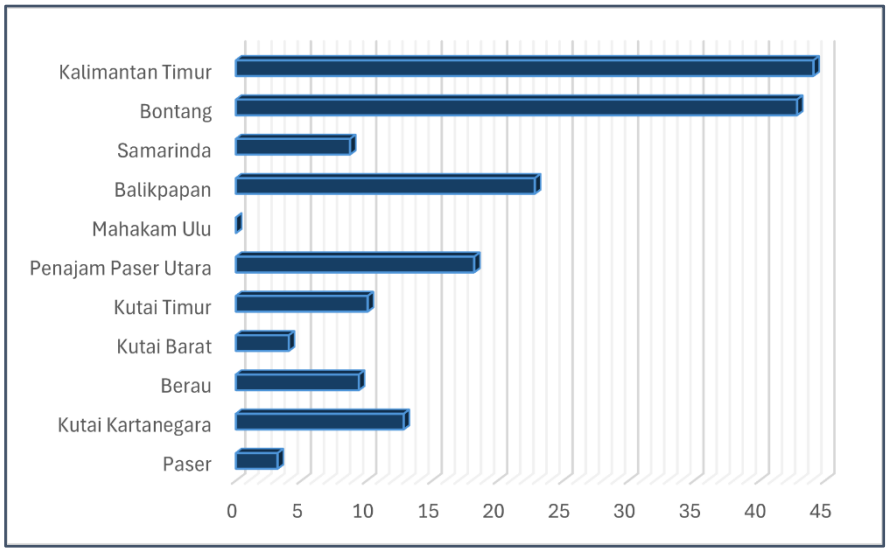
Grafik jumlah pengunjung Perpustakaan Daerah Provinsi Kalimantan Timur menurut segmentasi pengunjung tahun 2022–2025 menunjukkan perubahan dari tahun ke tahun. Kelompok mahasiswa menjadi pengunjung terbanyak, yaitu 20.664 orang pada tahun 2022 dan 17.160 orang pada tahun 2023, kemudian menurun menjadi 7.992 orang pada tahun 2024 dan meningkat kembali menjadi 9.544 orang pada tahun 2025. Kelompok profesi umum juga mengalami fluktuasi, dari 16.644 orang pada tahun 2022 menjadi 4.898 orang pada tahun 2025.





Sementara itu, jumlah pengunjung pegawai/karyawan, dosen/guru, murid SLTA, dan murid SLTP relatif lebih sedikit dan sebagian kembali meningkat pada tahun 2025. Berbeda dengan kelompok lainnya, murid TK/SD cenderung meningkat, dari 2.703 orang pada tahun 2022 menjadi 4.652 orang pada tahun 2025. Secara keseluruhan, total kunjungan menurun dari 45.082 orang pada tahun 2022 menjadi 20.870 orang pada tahun 2024, kemudian meningkat menjadi 22.358 orang pada tahun 2025.

Grafik 4.3.2 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) di Provinsi Kaltim, Tahun 2025



Grafik Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan bahwa tingkat literasi masyarakat bervariasi antar kabupaten/kota. Kota Bontang mencatat nilai tertinggi sebesar 42,86, diikuti oleh Balikpapan 22,83 dan Penajam Paser Utara 18,20. Nilai IPLM Provinsi Kalimantan Timur sendiri tercatat sebesar 44,11. Sebaliknya, beberapa daerah memiliki nilai IPLM yang relatif lebih rendah, seperti Paser sebesar 3,18, Kutai Barat 4,04, dan Samarinda 8,71, sedangkan data Mahakam Ulu belum tersedia. Perbedaan capaian tersebut menunjukkan perlunya penguatan program literasi,

terutama pada daerah dengan nilai di bawah capaian provinsi, agar pembangunan literasi masyarakat dapat lebih merata di seluruh wilayah Kalimantan Timur.

Tabel 4.3.1 Jumlah Koleksi Buku Di Perpustakaan Daerah Provinsi Kaltim Tahun 2019-2025

Variabel	Tahun						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Jumlah Koleksi Judul Buku Yang Tersedia di Perpustakaan Daerah (Eksemplar)	202.458	208.214	211.268	216.218	218.649	237.852	114.939
Jumlah Buku Yang Tersedia di perpustakaan daerah (Judul)	91.885	95.292	97.601	100.748	102.635	110.312	130.484
Rasio Koleksi Buku Yang Tersedia di Per-pustakaan Daerah (%)	0,450	0,450	0,460	0,470	0,470	0,460	1,140
Jumlah Koleksi Judul Buku Elektronik Yang Tersedia di Perpus takaan Daerah (Eksemplar)	101.990	101.990	103.330	104.530	104.530	107.542	41.936
Jumlah Buku Elektronik Yang Tersedia (Judul)	16.331	16.561	16.604	17.116	17.116	18.637	93.936

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 4.3.2 Jumlah Pengunjung Perpustakaan Daerah Provinsi Kaltim Berdasarkan Segmentasi Pengunjung, 2019-2025

Segmentasi Pengunjung	Tahun						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Umum	6.103	2.706	6.914	16.644	5.994	5.787	4.898
Pegawai/Karyawan	2.474	496	109	606	803	432	659
Dosen/Guru	3.440	687	100	1.128	1.728	886	884
Mahasiswa	62.895	26.311	7.227	20.664	22.354	7.992	9.544
Murid SLTA	3.952	1.579	212	2.405	1.992	897	1.131
Murid SLTP	1.164	211	60	932	707	253	590
Murid TK/SD	3.302	1.552	194	2.703	6.197	4.623	4.652
Total	**83.330**	**33.542**	**14.816**	**45.082**	**39.774**	**69.480**	**22.358**

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 4.3.3 Jumlah Peminjam Buku dan Jumlah Buku yang Dipinjam dari Perpustakaan Daerah Provinsi Kaltim, 2019-2025

Uraian	Tahun						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Jumlah Peminjam Buku (orang)	52.819	15.437	2.130	12.383	15.755	10.051	16.343
Jumlah Buku yang Dipinjam (eksemplar)	48.329	19.173	8.119	16.099	14.572	6.240	11.342

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 4.3.4 Jumlah Perpustakaan di Provinsi Kaltim Menurut Klasifikasinya, 2019-2025

Uraian	Tahun						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Perpustakaan Umum							
1. Provinsi	1	1	1	1	1	10	1
2. Kab/Kota	9	9	9	9	9	9	9
3. Kecamatan	90	90	90	90	90	-	13
4. Desa/Kelurahan	648	648	648	648	648	24	652
Perpustakaan Sekolah							
1. SD/Sederajat	670	670	670	670	670	101	1810
2. SMP/Sederajat	214	214	214	214	214	96	569
3. SMA/Sederajat	446	446	446	502	502	68	258
Perpustakaan Perguruan Tinggi							
1. PT Negeri	5	5	5	6	6	5	13
2. PT Swasta	45	45	45	73	73	5	45

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 4.3.5 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) di Provinsi Kaltim Menurut Kabupaten/Kota, 2023-2025

Uraian	Tahun		
	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)
Paser	61,75	76,67	3,18
Kutai Kartanegara	54,06	62,52	12,81
Berau	57,28	70,51	9,39
Kutai Barat	58,08	51,14	4,04
Kutai Timur	73,35	74,54	10,06
Penajam Paser Utara	64,59	79,23	18,2
Mahakam Ulu	51,06	67,05	-
Kota Balikpapan	64,80	72,98	22,83
Kota Samarinda	59,14	68,67	8,71
Kota Bontang	82,05	84,70	42,86
Kalimantan Timur	**67,56**	**78,34**	**44,11**

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 4.3.6 Tingkat Kegemaran Membaca (TGM) di Provinsi Kaltim Menurut Kabupaten/Kota, 2023-2025

Uraian	Tahun		
	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)
Paser	54,02	59,74	-
Kutai Kartanegara	50,62	60,45	55,02
Berau	65,17	68,17	57,65
Kutai Barat	51,16	67,59	55,53
Kutai Timur	51,10	67,54	57,76
Penajam Paser Utara	52,04	66,41	-
Mahakam Ulu	51,14	59,46	-
Kota Balikpapan	51,76	81,04	68,76
Kota Samarinda	59,90	84,86	55,55
Kota Bontang	71,40	75,83	60,47
Kalimantan Timur	**55,83**	**69,53**	**57,86**

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur

4.4 Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Timur

Biro Organisasi memiliki tugas membantu Asisten Administrasi Umum dalam pelaksanaan pengelolaan kebijakan daerah. Tugas tersebut meliputi penyiapan dan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, serta pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan, analisis jabatan, reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja, dan tatalaksana.

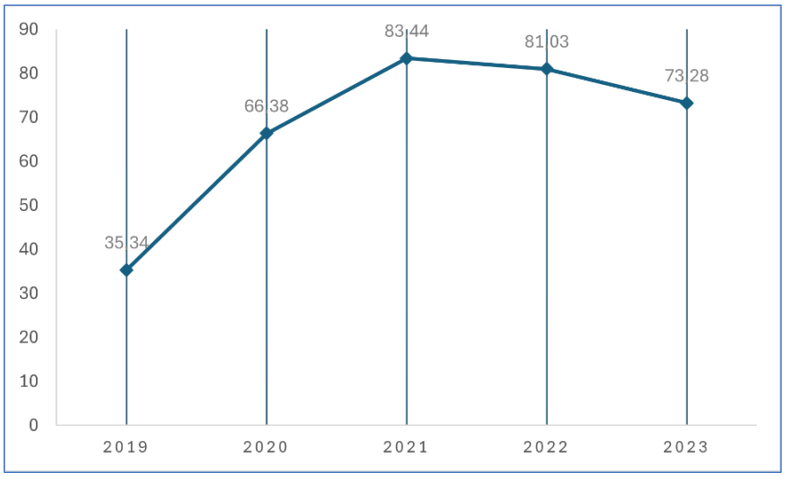
Dalam melaksanakan tugas tersebut, Biro Organisasi menjalankan fungsi penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian proses perumusan kebijakan, serta pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah pada bidang terkait. Selain itu, Biro Organisasi juga melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan daerah, serta menjalankan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum sesuai dengan tugas dan kewenangannya.





Dengan mengemban berbagai tugas dan fungsi ini, Biro Organisasi menjadi bagian penting dalam mendukung efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kebijakan daerah di berbagai aspek yang terkait dengan struktur organisasi, analisis jabatan, peningkatan birokrasi, akuntabilitas kinerja, dan tata kelola.

Grafik 4.4.1 Persentase Perangkat Daerah di Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang telah melaksanakan survey kepuasan masyarakat (SKM) sesuai standar (%), 2019-2023

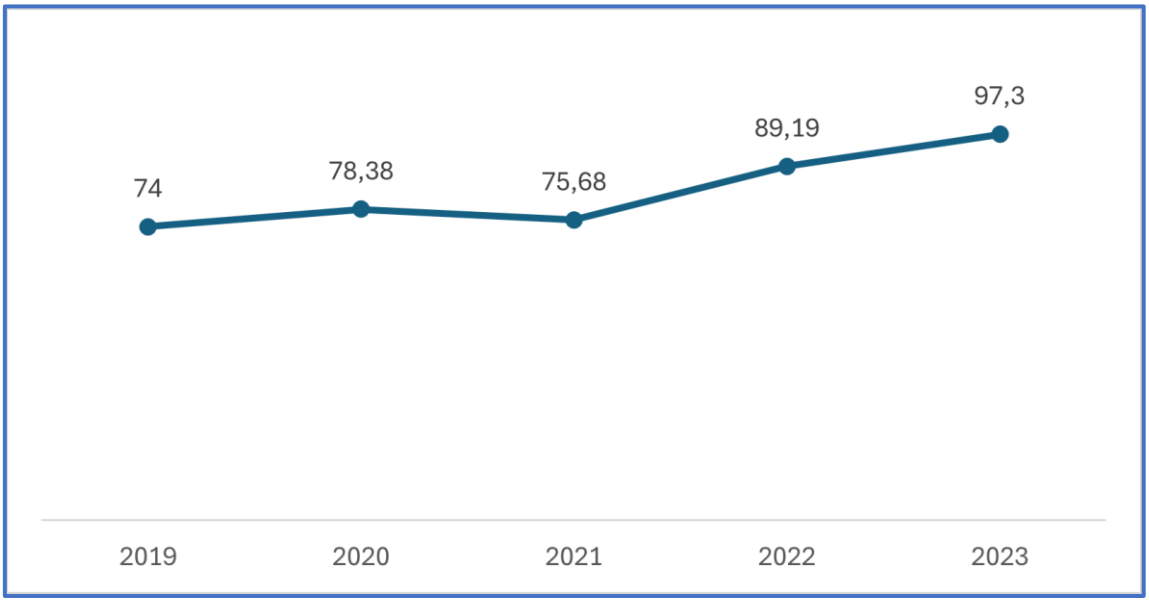


Sumber: Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Timur

Grafik di atas menunjukkan persentase perangkat daerah di Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang telah melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sesuai standar selama periode 2019–2023. Persentase pelaksanaan SKM mengalami peningkatan hingga mencapai nilai tertinggi pada tahun 2021 sebesar 83,44%. Selanjutnya, capaian tersebut mengalami penurunan menjadi 81,03% pada tahun 2022 dan kembali turun menjadi 73,28% pada tahun 2023.

Penurunan yang terjadi pada tahun 2022 dan 2023 menunjukkan adanya tantangan dalam mempertahankan tingkat pelaksanaan SKM pada perangkat daerah. Kondisi tersebut dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti perubahan prioritas kegiatan, pergantian pejabat, maupun belum meratanya pemahaman mengenai pentingnya SKM sebagai salah satu bentuk evaluasi terhadap kualitas pelayanan publik.

Grafik 4.4.2 Persentase Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah di Provinsi Kalimantan Timur yang Memperoleh Predikat Minimal B (BAIK) (%), 2019-2023



Sumber: Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Timur

Grafik persentase perangkat daerah di Provinsi Kalimantan Timur yang memperoleh predikat minimal B (Baik) dalam penilaian akuntabilitas kinerja menunjukkan perkembangan yang cenderung meningkat selama periode 2020–2023. Setelah sempat mengalami sedikit penurunan pada tahun 2021, persentasenya kembali meningkat pada tahun 2022 dan mencapai capaian tertinggi pada tahun 2023. Perkembangan ini menunjukkan adanya upaya pemerintah daerah dalam memperkuat kualitas kinerja dan akuntabilitas perangkat daerah.

Peningkatan tersebut dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti penguatan penerapan sistem akuntabilitas kinerja, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta dukungan dari pimpinan daerah dalam mendorong perbaikan kinerja organisasi.

Tabel 4.4.1 Indikator SDGs Biro Organisasi, 2021-2025

Variabel	Tahun				
	2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Provinsi Kalimantan Timur	0,12	0,28	-0,21	-0,01	-1,17

Sumber: Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 4.4.2 Indikator RPJMD Biro Organisasi, 2021-2025

Variabel	Tahun				
	2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Predikat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi	76,55	77,67	77,82	78,10	77,89
Persentase Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah yang memperoleh predikat minimal B (BAIK)	74,00	78,38	75,68	89,19	97,3
Nilai Reformasi Birokrasi	69,50	68,1	68,47	67,7	73,87
Presentase Perangkat Daerah yang dibentuk sesuai dengan NSPK	87,00	90,00	92,00	91,89	100,00
Persentase Perangkat Daerah yg telah Menyusun SOP Sesuai Ketentuan / Aturan	68,42	63,04	63,04	93,33	93,33
Persentase Perangkat Daerah yang telah melaksanakan survey kepuasan masyarakat (SKM) sesuai standar	35,34	66,38	83,44	81,03	73,28

Sumber: Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 4.4.3 Jumlah Organisasi Daerah Menurut Jenisnya di Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (lembaga), 2021-2024

Variabel	Tahun				
	2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Jumlah Biro Sekretariat Daerah	9	9	9	9	9
Sekretariat DPRD	1	1	1	1	1
Jumlah Dinas Daerah	21	21	21	22	22
Satuan Polisi Pamong Praja	1	1	1	1	1
Jumlah Badan Daerah	9	9	9	9	9
Inspektorat	1	1	1	1	1
Rumah Sakit Daerah	3	3	5	5	5
Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)	72	73	74	73	74
Jumlah Perangkat Daerah	38	37	34	35	35
Jumlah Biro Sekretariat Daerah	9	9	9	9	9

Sumber: Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Timur

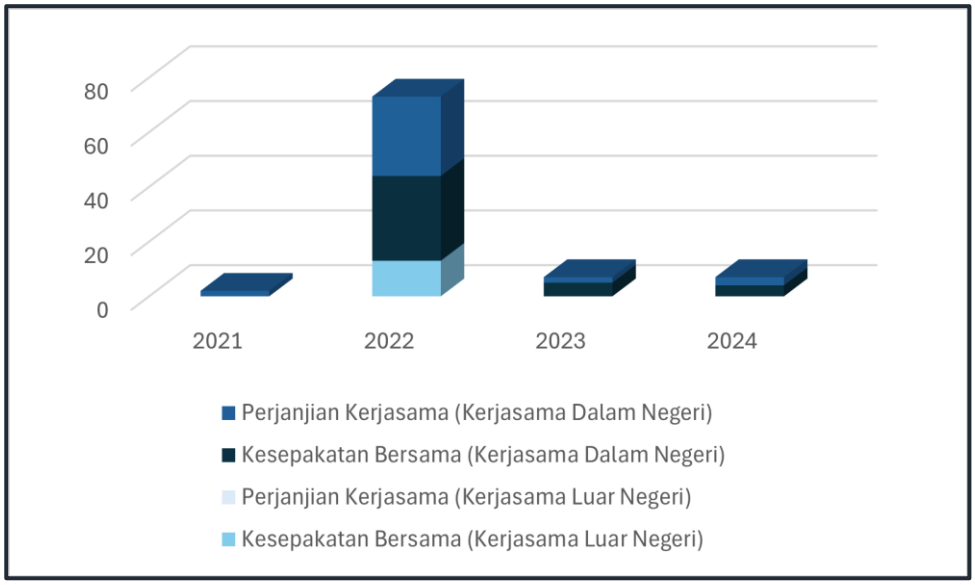
4.5 Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Kalimantan Timur

Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah memiliki tugas dalam memberikan dukungan kepada Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada berbagai aspek yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Tugas tersebut mencakup penyiapan perumusan kebijakan daerah, koordinasi terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, serta pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kebijakan di bidang pemerintahan, otonomi daerah, dan kerja sama.

Dalam menjalankan tugasnya, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah melaksanakan sejumlah fungsi penting. Fungsi tersebut meliputi penyiapan perumusan kebijakan daerah yang berkaitan dengan bidang pemerintahan, otonomi daerah, dan kerja sama. Selain itu, biro ini juga berperan dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas Perangkat Daerah agar pelaksanaan kegiatan pada masing-masing bidang dapat berjalan sesuai dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah juga melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan, otonomi daerah, dan kerja sama sebagai bagian dari upaya memastikan pelaksanaan kebijakan daerah berjalan dengan baik.

Selain fungsi tersebut, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah juga melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sepanjang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawabnya. Melalui pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah memiliki peran dalam mendukung proses penyusunan serta pelaksanaan kebijakan daerah yang berkaitan dengan pemerintahan, otonomi daerah, dan kerja sama antardaerah. Keberadaan biro ini juga penting dalam menjaga koordinasi antarperangkat daerah serta memastikan pelaksanaan kebijakan dapat dipantau dan dievaluasi secara berkelanjutan. Dengan demikian, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah turut mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah, pelaksanaan otonomi daerah, serta penguatan kerja sama yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Grafik 4.5.1 Jumlah Perjanjian Kerjasama dan Nota Kesepakatan Dalam dan Luar Negeri Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, 2021-2024





Data menunjukkan bahwa kegiatan kerja sama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur selama periode 2021–2024 mengalami perkembangan yang berfluktuasi. Pada kerja sama dalam negeri, jumlah kesepakatan bersama mencapai angka tertinggi pada tahun 2023 sebanyak 31 kesepakatan, kemudian menurun cukup besar menjadi 5 kesepakatan pada tahun 2024. Pola serupa terlihat pada perjanjian kerja sama dalam negeri yang meningkat menjadi 29 perjanjian pada tahun 2023 setelah hanya tercatat 2 perjanjian pada tahun 2022, kemudian menjadi 3 perjanjian pada tahun 2024.

Sementara itu, kerja sama luar negeri masih relatif terbatas. Kesepakatan bersama luar negeri tercatat sebanyak 13 kesepakatan pada tahun 2023, sedangkan pada tahun lainnya belum terdapat kesepakatan yang tercatat. Kondisi ini menunjukkan bahwa kerja sama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur masih didominasi oleh kerja sama dalam negeri, meskipun pada tahun 2023 mulai terlihat adanya peluang pengembangan kerja sama pada tingkat internasional.

Tabel 4.5.1 Jumlah Perjanjian Kerjasama dan Nota Kesepakatan Dalam dan Luar Negeri Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, 2018-2024

Variabel	Tahun						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Kesepakatan Bersama (Kerjasama Dalam Negeri)	33	29	10	8	31	12	12
Perjanjian Kerjasama (Kerjasama Dalam Negeri)	1	-	13	2	29	18	21
Kesepakatan Bersama (Kerjasama Luar Negeri)	1	-	-	-	13	1	1
Perjanjian Kerjasama (Kerjasama Luar Negeri)	1	1	-	-	-	-	-

Sumber: Biro Pemerintah dan Otonomi Setda Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 4.5. 2 Indikator RPJMD Biro Pemerintah dan Otonomi, 2021-2023

Indikator	Tahun		
	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)
Jumlah Unsur Nama Rupabumi yang dibakukan (Gazertir Nasional)	485	485	485
Persentase Batas Administrasi Wilayah yang disele saikan (%)	76,74	76,74	76,74
Jumlah Penetapan Lokasi dan Pendelegasian Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum	8	13	10

Sumber: Biro Pemerintah dan Otonomi Setda Provinsi Kalimantan Timur

4.6 Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Timur

Biro Hukum bertanggung jawab dalam memberikan dukungan kepada Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam beberapa aspek yang berkaitan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan. Tugas ini mencakup persiapan perumusan kebijakan daerah, koordinasi pelaksanaan tugas dari Perangkat Daerah, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan provinsi, peraturan perundang-undangan kabupaten/ kota, dan bantuan hukum.

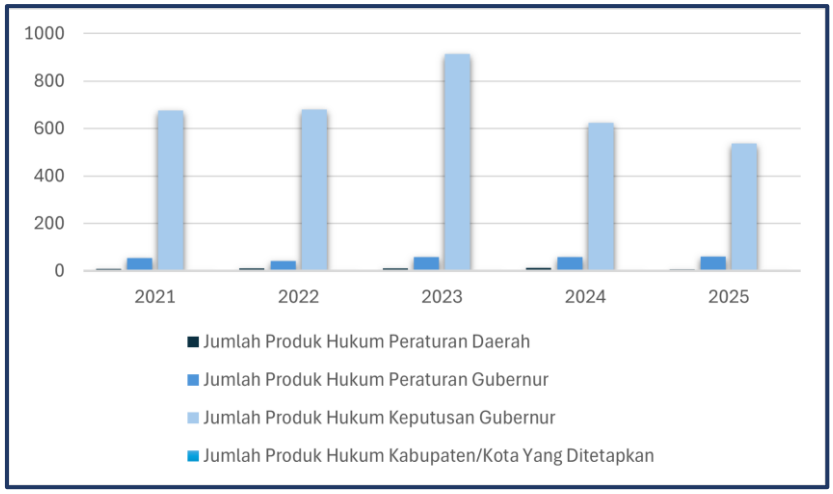
Dalam menjalankan tugasnya, Biro Hukum memiliki fungsi yang penting. Pertama, mempersiapkan perumusan kebijakan daerah terkait dengan peraturan perundang-undangan provinsi, peraturan perundang-undangan kabupaten/kota, dan bantuan hukum. Kedua, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dari Perangkat Daerah dalam ranah peraturan perundang-undangan provinsi, peraturan perundang-undangan kabupaten/kota, dan bantuan hukum. Ketiga, melakukan pemantauan dan evaluasi



pelaksanaan kebijakan di bidang tersebut. Terakhir, menjalankan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.

Melalui peran dan fungsi ini, Biro Hukum memiliki peran penting dalam menjaga kepatuhan terhadap peraturan perundang undangan di tingkat provinsi dan kabupaten/ kota serta memberikan bantuan hukum yang diperlukan. Biro ini berkontribusi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang mengikuti landasan hukum yang berlaku, serta mendukung efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas pemerintahan di sektor hukum.

Grafik 4.6.1 Jumlah Produk Hukum yang diterbitkan di Provinsi Kalimantan Timur, Tahun 2021-2025



Selama periode 2021–2025, jumlah produk hukum yang diterbitkan di Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan perkembangan yang berfluktuasi. Jumlah Peraturan Daerah berubah dari 8 produk pada tahun 2021 menjadi 11 pada tahun 2022, 10 pada tahun 2023, meningkat menjadi 13 pada tahun 2024, lalu menurun menjadi 7 pada tahun 2025. Sementara itu, Peraturan Gubernur sempat turun dari 55 produk pada tahun 2021 menjadi 41 pada tahun 2022, kemudian meningkat secara bertahap hingga mencapai 60 produk pada tahun 2025. Keputusan Gubernur menjadi jenis produk hukum dengan jumlah terbanyak setiap tahunnya. Jumlahnya meningkat dari 676 keputusan pada tahun 2021 menjadi 913 keputusan pada tahun 2023, kemudian menurun menjadi 624 keputusan pada

tahun 2024 dan 537 keputusan pada tahun 2025. Secara umum, data tersebut menunjukkan bahwa pembentukan produk hukum di Kalimantan Timur tetap berlangsung setiap tahun, dengan Keputusan Gubernur sebagai jenis yng paling dominan.

Tabel 4.6.1 Daftar Data Indeks Kualitas kebijakan Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Timur, 2025

Prioritas	2025	Satuan
(1)	(2)	(3)
Indeks Kualitas Kebijakan	92,44	Indeks
Jumlah Instansi dengan Nilai IKK Kategori Baik	3,00	Terbuka
Persentase Intansi Pemerintah yang Menerapkan Tata Kelola Kualitas Kebijakan yang Baik	90,00	Terbuka

Sumber: Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 4.6.2 Jumlah Produk Hukum yang Diterbitkan di Provinsi Kalimantan Timur, 2018-2025

Variabel	Tahun							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Peraturan Daerah	11	10	4	8	11	10	13	7
Peraturan Gubernur	58	78	76	55	41	58	59	60
Keputusan Gubernur	604	676	637	676	679	913	624	537
Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	0	311	99	-	-	-	-	-

Sumber: Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Timur

4.7 Biro Administrasi Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur

Biro Administrasi Pembangunan merupakan salah satu biro di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang memiliki peran dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan daerah. Biro ini membantu pelaksanaan koordinasi perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, serta pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur.

Dalam menjalankan tugasnya, Biro Administrasi Pembangunan melaksanakan pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah dan wilayah serta penyusunan laporan pelaksanaan pembangunan. Kegiatan tersebut dilakukan melalui koordinasi, monitoring, evaluasi, serta pengendalian terhadap perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

Keberadaan Biro Administrasi Pembangunan mendukung tersedianya informasi mengenai perkembangan dan capaian pelaksanaan pembangunan daerah. Informasi tersebut dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dalam mengidentifikasi kendala, memantau kemajuan kegiatan, serta mendukung pengambilan kebijakan agar pelaksanaan pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur dapat berjalan lebih efektif, terarah, dan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.



Tabel 4.7. 1 Capaian Indikator Kinerja, 2024–2025

Uraian	Target		Realisasi		Capaian	
	2024	2025	2024	2025	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Persentase Rekomendasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah oleh Perangkat Daerah	80,00	85,00	100,00	100,00	125,00	117,65
Persentase Pelaksanaan Program Unggulan Sesuai Dengan Target waktu dan capaian fisik	-	83,00	-	86,71	-	104,47

Sumber: Biro Administrasi Pembangunan Provinsi Kalimantan Timu



PROFIL DATA

STATISTIK SEKTORAL
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

2026



BAB V
PERDAGANGAN, INDUSTRI, KOPERASI DAN MODAL

5.1 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur



Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi memiliki tanggung jawab dalam membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang berkaitan dengan tenaga kerja dan transmigrasi. Dalam menjalankan tugasnya, dinas ini bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Untuk mendukung pelaksanaan tugas tersebut, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi menjalankan berbagai fungsi penting.

Fungsi yang dilaksanakan oleh dinas ini meliputi perumusan kebijakan teknis di bidang tenaga kerja dan transmigrasi sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Selain itu, dinas ini juga bertanggung jawab dalam perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis di bidang tenaga kerja dan transmigrasi. Pelayanan umum di bidang tenaga kerja dan transmigrasi juga menjadi bagian dari tanggung jawab dinas ini.

Dalam upaya pengembangan tenaga kerja, dinas ini berperan dalam perumusan, perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pengembangan tenaga kerja. Di samping itu, dinas juga bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengawasan kerja, hubungan industrial, dan jaminan sosial tenaga kerja. Dinas ini juga berperan dalam perumusan, perencanaan, pembinaan, serta pengendalian kebijakan teknis di bidang transmigrasi.

Melalui pelaksanaan berbagai fungsi tersebut, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi memiliki peran penting dalam mengelola berbagai aspek yang berkaitan dengan tenaga kerja dan transmigrasi di tingkat provinsi. Dinas ini turut berkontribusi dalam memastikan pelaksanaan kebijakan berjalan sesuai dengan rencana strategis dan kebutuhan daerah, serta memberikan pelayanan yang efektif di bidang tenaga kerja dan transmigrasi.



Grafik 5.1.1 Jumlah Pencari kerja yang Mendaftar dan yang Ditempatkan di Provinsi Kalimantan Timur, 2019-2025



Jumlah pencari kerja yang mendaftar di Provinsi Kalimantan Timur selama periode tahun 2019-2025 menunjukkan perkembangan yang cukup berfluktuasi. Pada tahun 2019, jumlah pencari kerja yang terdaftar mencapai 26.148 orang dan meningkat menjadi 30.719 orang pada tahun 2020. Jumlah tersebut kemudian menurun menjadi 22.358 orang pada tahun 2021. Pada tahun 2022 terjadi peningkatan yang cukup tajam hingga mencapai 47.254 orang, sebelum kembali menurun menjadi 37.435 orang pada tahun 2023, 34.036 orang pada tahun 2024, dan 21.101 orang pada tahun 2025. Perubahan tersebut menggambarkan adanya dinamika jumlah masyarakat yang memasuki pasar kerja dari tahun ke tahun.

Jumlah pencari kerja yang ditempatkan juga mengalami perubahan selama periode yang sama. Pada tahun 2019, sebanyak 7.690 pencari kerja berhasil ditempatkan, kemudian jumlahnya menurun menjadi 5.538 orang pada tahun 2020 dan 3.531 orang pada tahun 2021. Pada tahun 2022, jumlah pencari kerja yang ditempatkan tercatat sebesar 12.334 orang, kemudian menurun menjadi 10.185 orang pada tahun 2023, 8.638 orang pada tahun 2024, dan 6.148 orang pada tahun 2025. Kondisi ini menunjukkan bahwa penempatan tenaga kerja mengalami perubahan dari tahun ke tahun sejalan dengan perkembangan jumlah pencari kerja yang mendaftar, sehingga upaya peningkatan penempatan dan penyerapan tenaga kerja tetap diperlukan untuk mendukung kesempatan kerja di Kalimantan Timur.

Tabel 5.1.1 Data Pelayanan Ketenagakerjaan, 2019-2025

Nama Variabel	Tahun						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Pelayanan Ketenagakerjaan (Unit)	4	4	4	6	6	-	-
Balai Pelatihan Kerja (BLK) (Unit)	2	2	2	2	2	-	-
Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) (Unit)	297	297	139	148	110	169	169
Perizinan Ketenagakerjaan (Unit)	1	1	1	1	1	-	-
Jumlah Perselisihan Buruh dan Pengusaha (Kasus)	281	35	230	285	2	199	659
Jumlah Penyelesaian Perselisihan Buruh dan Pengusaha (Kasus)	281	7	94	269	2	111	424
Perselisihan Buruh dan Pengusaha Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah (Persen)	100,00	57,14	40,87	94,39	-	-	-
Kasus Pemogokan Kerja/Unjuk Rasa	15	5	10	-	48	-	-
Jumlah Perusahaan yang menerapkan K3 Pada Tahun Berjalan	6.292	8.074	10.489	17.822	33.676	35.203	979
Jumlah Perusahaan di Wilayah Kabupaten/Kota Pada Tahun Berjalan	6.292	8.074	10.489	17.822	33.676	35.203	34
Tingkat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Persen)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	89,57	-

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 5.1.2 Data Prioritas Nasional Bidang Pengawasan, 2024-2025

Nama Variabel	2024	2025
(1)	(2)	(3)
Data Lembaga K3	38	54
Data Perusahaan yang Terdaftar di WLKP Online	35.203	86.116
Data Lembaga Pengawasan di Pusat (Direktorat Teknis) dan Daerah (Korwil, Satwasker, UPTD)	-	-
Data Perusahaan yang Disidik	18	5
Jumlah Perusahaan yang Berperan Memperkerjakan Penyandang Disabilitas	-	-
Jumlah Perusahaan yang Menerapkan SMK3	54	-
Data Peserta BPJS Ketenagakerjaan	9.102	-
Jumlah Perusahaan yang Mendapatkan Uji K3	9.102	397
Persentase Perusahaan yang Menerapkan Peraturan Perundangan Bidang Ketenagakerjaan	100	100
Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Kebebasan Berserikat.	35.203	86.116
Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Waktu Kerja dan Waktu Istirahat (WKWI)	35.203	86.116
Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Pengupahan.	35.203	86.116
Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Jaminan Sosial.	35.203	86.116
Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Kerja Perempuan	35.203	86.116
Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja	35.203	86.116
Jumlah Penyidikan Tindak Pidana Ketenagakerjaan	18	5
Jumlah Perusahaan yang Mendaftar Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP) online	35.203	10.489

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 5.1.3 Data Prioritas Nasional Bidang Pengembangan, 2024-2025

Nama Variabel	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)
Data Lowongan Pekerjaan Terdaftar pada Sistem Informasi dan Aplikasi Pelayanan Ketenagakerjaan	15.738	-	-
Data Pencari Kerja Terdaftar pada Sistem Informasi dan Aplikasi Pelayanan Ketenagakerjaan	37.992	-	-
Data Tenaga Kerja Terdaftar yang Ditempatkan pada Sistem Informasi dan Aplikasi Pelayanan Ketenagakerjaan	10.438	-	-
Data Tenaga Kerja Tersertifikasi	36.739	247	-
Data Lembaga Pelatihan Kerja	110	-	17
Data Peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK)	160	320	352
Data Peserta Pemagangan Dalam Negeri	216	136	352
Data Peserta Pelatihan Peningkatan Produktivitas	25	45	23
Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	1,99%	1,22%	-
Persentase Instruktur Bersertifikat Kompetensi	0,00%	100,00%	100,00%
Jumlah Rekomendasi Persetujuan Penempatan Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah(AKAD) yang Diberikan Oleh Dinas Provinsi	12.314	7.600	13.531
Jumlah Surat Persetujuan Penempatan Antar Kerja Lokal (SPP AKL) Kabupaten/Kota dalam Satu Wilayah Provinsi yang Diterbitkan Oleh Dinas Provinsi	1	-	-
Jumlah Lowongan Pekerjaan yang Tersedia Dalam Satu Wilayah Provinsi	15.738	22.094	13.691
Jumlah Pejabat Fungsonal Pengantar Kerja	10	34	33
Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) yang Mendapatkan Izin dari Pemerintah Daerah Provinsi	14	15	15
Jumlah Penempatan Tenaga Kerja Melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online/Sistem Informasi Ketenagakerjaan (SISNAKER).	10.438	-	-

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 5.1.4 Pencari Kerja Terdaftar, Lowongan Kerja Terdaftar, dan Penempatan/ Pemenuhan Tenaga Kerja Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Kalimantan Timur, 2023

Kabupaten/Kota	Pencari Kerja Terdaftar			Lowongan Kerja Terdaftar			Penempatan/Pemenuhan Tenaga Kerja		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Paser	1.957	598	2.555	395	171	566	434	81	515
Kutai Barat	2.270	1.023	3.293	1.152	48	1.200	26	-	26
Kutai Kartanegara	2.310	612	2.922	2.185	312	2.497	1.193	140	1.333
Kutai Timur	3.476	627	4.103	1.587	516	2.103	1.116	35	1.151
Berau	5.035	1.822	6.857	1.570	18	1.588	1.570	18	1.588
Penajam Paser Utara	822	337	1.159	190	125	315	199	53	252
Mahakam Ulu	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kota Balikpapan	2.858	1.563	4.421	1.378	471	1.849	542	273	815
Kota Samarinda	2.096	2.042	4.138	1.528	1.398	2.926	1.116	1.220	2.336
Kota Bontang	5.497	3.047	8.544	2.201	493	2.694	2.083	339	2.422
KalimantanTimur	**26.321**	**11.671**	**37.992**	**12.186**	**3.552**	**15.738**	**8.279**	**2.159**	**10.438**

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 5.1.5 Pencari Kerja Terdaftar Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin, 2023

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Tidak/belum pernah sekolah	-	-	-
Tidak/belum tamat SD	405	76	481
Sekolah Dasar	414	54	468
Sekolah Menengah Pertama	846	240	1.086
Sekolah Menengah Atas (Umum)	11.857	4.685	16.542
Sekolah Menengah Atas (Kejuruan)	7.450	2.006	9.456
Diploma I/II/III/Akademi	1.469	1.050	2.519
Universitas	3.880	3.560	7.440
Jumlah	**26.321**	**11.671**	**37.992**

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 5.1.6 Upah Minimum Kabupaten/Kota/Provinsi di Provinsi Kalimantan Timur, 2024

Kabupaten/Kota	UMK/UMP	Kenaikan dari Tahun Sebelumnya	
		Rupiah	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)
Paser	3.591.565,53	219.203,53	6,5
Kutai Barat	3.952.233,98	241.216,16	6,5
Kutai Kartanegara	3.766.379,19	229.872,91	6,5
Kutai Timur	3.743.820,00	228.496,00	6,5
Berau	4.081.396,31	249.099,31	6,5
Penajam Paser Utara	3.957.345,89	241.528,15	6,5
Mahakam Ulu	3.952.233,98	241.216,16	6,5
Kota Balikpapan	3.701.508,68	225.913,68	6,5
Kota Samarinda	3.724.437,20	227.313,07	6,5
Kota Bontang	3.780.012,66	230.704,99	6,5
Kalimantan Timur	**3.579.313,77**	**218.455,77**	**6,5**

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 5.1. 7 Data Pelatihan pada BLKI Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023-2025

Daftar Data	Tahun		
	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)
Persentase Lulusan Pelatihan Kerja yang dimagangkan dan bekerja	39,04%	50,90%	53,22%
Daya tampung Fasilitas Pelatihan Kerja	480	480	480
Instruktur pemerintah	11	10	10
Kapasitas terpasang pemerintah	480	480	480
Lulusan pelatihan pemerintah	176	512	672
Nama Program Pelatihan	1	1	1

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 5.1.8 Data Ketenagakerjaan, 2019-2025

Nama Variabel	Tahun						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Pencari Kerja yang Mendaftar	26.148	30.719	22.358	47.254	37.992	34.036	32.512
Pencari Kerja yang Ditempatkan	7.690	5.538	3.531	12.334	10.438	8.545	6.148
Persentase Pencari Kerja Ditempatkan	29,41	18,03	15,79	26,1	27,5	25,31	29,14
Pencari Kerja yang Belum Ditempatkan Jenis Kelamin Laki-Laki	26.258	15.658	13.120	23.990	18.042	17.527	1.314
Pencari Kerja yang Belum Ditempatkan Jenis Kelamin Perempuan	9.900	7.161	5.707	10.93	9.512	7.687	13.639
Jumlah Perusahaan Terdaftar	6.292	8.074	10.489	17.822	33.676	35.203	-
Kasus PHK	173	28	170	176	356	-	-
Orang Terkena PHK	1.702	181	2.298	995	1965	-	-
Rata-Rata Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Kabupaten/Kota	2.747.561	-	-	-	-	-	-
Upah Minimum Provinsi	2.747.561	2.981.378	2.981.378	3.014.497	3.201.396	3.360.858	3.579.313
Rata-Rata Upah Minimum (UMK) Kabupaten/Kota	2.747.561	2.981.378	2.981.378	3.249.613	3.430.317	-	-
Jumlah Perusahaan Yang Terdaftar di BPJS	13.445	13.337	16.713	15.026	18.083	18.242	18.342
Angka Partisipasi Perusahaan terdaftar BPJS Ketenagakerjaan	213,68	165,18	159,34	84,3	53,70	51,81	-
Jumlah Tenaga Kerja	478.172	130.462	232.129	343.471	448.719	593.275	-
Jumlah Tenaga Kerja Yang Terdaftar di BPJS	830.065	819.665	681.594	686.897	1.277.354	1.157.596	1.058.482
Angka Partisipasi Tenaga Kerja Terdaftar BPJS Ketenagakerjaan	173,59	628,28	293,63	199,99	284,66	58,56	-
Jumlah Penduduk Miskin (yang dilatih) yang terserap di Dunia Kerja	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Perusahaan	6.292	8.074	10.489	17.822	33.676	-	34.331
Jumlah Perusahaan yang menerapkan peraturan ketenagakerjaan	6.292	8.074	10.489	17.822	33.676	35.203	-
Produktivitas Tenaga Kerja	274.478.122	287.676.24	281.509.140	289.743.610	291.004.000	288.744.000	-
Jumlah Pengangguran yang menjadi Wirausaha Baru	340	-	80	-	-	-	-
Jumlah tenaga terampil bidang Jasa Kontruksi yang terserap oleh pasar kerja	-	-	-	-	10.462	-	-
Jumlah Peserta Pelatihan BLK	896	672	816	896	1.824	1.536	848
Jumlah Peserta Pelatihan BLK Yang Ditempatkan	896	403	450	429	673	291	323
Tingkat Lulusan Pelatihan BLK Yang Ditempatkan	100,00	59,97	55,15	47,88	36,90	34,22	38,09

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 5.1.9 Data Transmigrasi, 2019-2025

Nama Variabel	Tahun						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Jumlah Transmigrasi	-	-	15	5	-	60	211
Transmigrasi Umum (TU)	-	-	15	5	-	-	-
Transmigrasi Swakarsa	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Kawasan Transmigrasi	-	-	-	3	-	3	1
Luas Wilayah Perencanaan Kawasan Transmigrasi	-	-	-	-	-	10.948	1.416

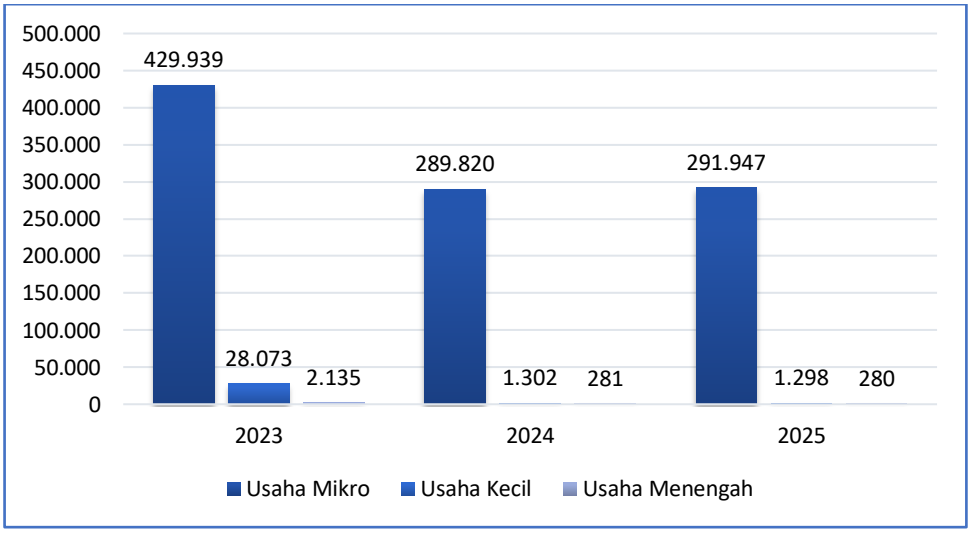
Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur



5.2 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, serta usaha kecil dan menengah (UKM). Dalam pelaksanaannya, dinas menjalankan fungsi perumusan, perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis di bidang industri, perdagangan dalam dan luar negeri, koperasi, serta UMKM. Melalui fungsi tersebut, dinas berperan dalam mendukung perkembangan sektor usaha, pemberdayaan ekonomi, dan pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Timur.

Grafik 5.2.1 Jumlah UMKM di Provinsi Kalimantan Timur, 2023-2025



Jumlah pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Provinsi Kalimantan Timur selama periode tahun 2023-2025 menunjukkan perubahan yang cukup signifikan. Jumlah usaha mikro pada tahun 2023 tercatat sebanyak 429.939 unit, kemudian menurun menjadi 289.820 unit pada tahun 2024. Pada tahun 2025, jumlah usaha mikro kembali mengalami sedikit peningkatan menjadi 291.947 unit. Sementara itu, jumlah usaha kecil menurun cukup tajam dari 28.073 unit pada tahun 2023 menjadi 1.302 unit pada tahun 2024, kemudian kembali sedikit menurun menjadi 1.298 unit pada tahun 2025.



Perubahan yang sama juga terlihat pada usaha menengah. Jumlah usaha menengah tercatat sebanyak 2.135 unit pada tahun 2023, kemudian menurun menjadi 281 unit pada tahun 2024 dan relatif stabil sebanyak 280 unit pada tahun 2025. Perubahan jumlah UMKM yang cukup besar, terutama antara tahun 2023 dan 2024, dapat berkaitan dengan perubahan cakupan pendataan, klasifikasi skala usaha, maupun pembaruan data UMKM di Kalimantan Timur.



Tabel 5.2.1 Data UMKM Tahun 2023-2025

Nama Variabel	Tahun		
	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)
Usaha Mikro	429.939	72.024	291.947
Usaha Kecil	28.073	331	1.298
Usaha Menengah	2.135	42	280

Sumber: Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 5.2.2 Persentase Koperasi Aktif Provinsi Kalimantan Timur, 2023

Kabupaten/Kota	Koperasi Aktif	Jumlah Koperasi	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)
Paser	193	322	59,94%
Kutai Barat	263	768	34,24%
Kutai Kartanegara	502	704	71,31%
Kutai Timur	465	1.154	40,29%
Berau	317	440	72,05%
Penajam Paser Utara	71	270	26,30%
Mahakam Ulu	27	125	21,60%
Kota Balikpapan	440	576	76,39%
Kota Samarinda	300	1.270	23,62%
Kota Bontang	66	82	80,49%
Binaan Provinsi Kalimantan Timur	**103**	**98**	**105,10%**

Sumber: Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 5.2.3 Jumlah Koperasi Unit Desa (KUD) dan Kegiatannya di Provinsi Kalimantan Timur, 2020-2025

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Jumlah KUD	206	205	206	207	206	206	Unit
Anggota Koperasi Unit Desa	4.276	4.768	3.837	3.216	-	-	Orang
Volume Usaha	64.718	79.506	12.155	11.538	-	-	Juta Rp
Modal	15.747	58.447	52.714	86.110	-	-	Juta Rp
Sisa Hasil Usaha	2.157	1.456	3.632	5.774	-	-	Juta Rp

Sumber: Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 5.2.4 Jumlah Koperasi Per Bentuk Anggota, 2019-2025

Jumlah Koperasi Per Bentuk Anggota	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Koperasi Primer	5.493	5.598	5.724	5.790	6.186	6.192	6.367
Koperasi Sekunder	21	21	21	21	17	5	18

Sumber: Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 5.2.5 Jumlah Koperasi Perjenis Usaha, 2023-2025

Jenis Usaha Koperasi	2023	2024	2025	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Koperasi Produsen	1.492	1.489	1.571	Unit
Koperasi Konsumen	3.890	3.889	3.752	Unit
Koperasi Jasa	507	507	561	Unit
Koperasi Pemasaran	146	-	-	Unit
Koperasi Simpan Pinjam	162	162	162	Unit

Sumber: Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 5.2.6 Data Koperasi, 2023-2025

Koperasi	2023	2024	2025	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Jumlah Koperasi Aktif	2.995	2.994	4.316	Unit
Jumlah Koperasi Pasif	3.202	3.203	3.107	Unit
Jumlah Anggota Koperasi Laki-Laki	116.765	134.459	134.839	Orang
Jumlah Anggota Koperasi Perempuan	48.186	54.335	56.463	Orang
Jumlah Koperasi Yang Melaksanakan RAT	646	861	778	Unit
Volume Usaha Koperasi	2.338.678	2.817.946	4.883.868	Rp. Juta
Jumlah KUD	206	206	206	Unit
Jumlah Non KUD	5.991	5.991	6.181	Unit
Jumlah Koperasi Berkualitas	10	4	4	Unit
Persentase Koperasi Aktif	48,33	48,00	59,00	%
Jumlah Koperasi Sehat	646	861	132	Koperasi

Sumber: Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 5.2.7 Data Potensi Industri, 2023-2025

Potensi Industri	2023	2024	2025	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Jumlah Industri	18.215	16.282	2.300	Unit
Jumlah Industri Besar	155	155	202	Unit
Jumlah Industri Kecil Menengah	18.100	16.127	20.048	Unit
Penyerapan Tenaga Kerja	34.740	120.185	38.938	Orang
Nilai Investasi	1.332.587	27.810.000	137.576.875	Rp Ribu
Jumlah Industri Inti Pengolahan Khas Daerah	-	-	69	Industri
Volume Usaha Kawasan Industri	-	-	-	Industri

Sumber: Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 5.2.8 Jumlah UKM Berdasarkan Jenis Usaha di Provinsi Kalimantan Timur, 2021-2023

Jenis Usaha UKM	2021	2022	2023	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1). Aneka Usaha	124.280	215.026	256.286	Unit
2). Perdagangan	169.142	195.704	195.704	Unit
3). Industri Pertanian	13.921	8.157	8.157	Unit
Jumlah UKM Naik Kelas	9	13	300	UKM

Sumber: Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 5.2.9 Jumlah Koperasi Menurut Prinsip Keuangan, 2022 -2025

Jenis Koperasi	2023	2024	2025	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Koperasi Konvensional	111	111	130	Unit
Koperasi Syariah	51	51	32	Unit

Sumber: Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 5.2.10 Data Jumlah Pasar, 2020 -2025

Jenis Pasar	2020	2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pasar Tradisional	346	403	404	403	404	404
Pasar Modern	214	456	456	240	448	448

Sumber: Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 5.2.11 Jumlah Wirausaha di Provinsi Kalimantan Timur, 2023-2025

Variabel	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)
Jumlah Wirausaha Baru	246	759	857
Jumlah WUB Mandiri	102	60	857

Sumber: Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur



5.3 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur memiliki tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral. Dalam menjalankan tugas tersebut, dinas ini melaksanakan sejumlah fungsi yang mendukung penyelenggaraan urusan energi dan sumber daya mineral di tingkat provinsi.

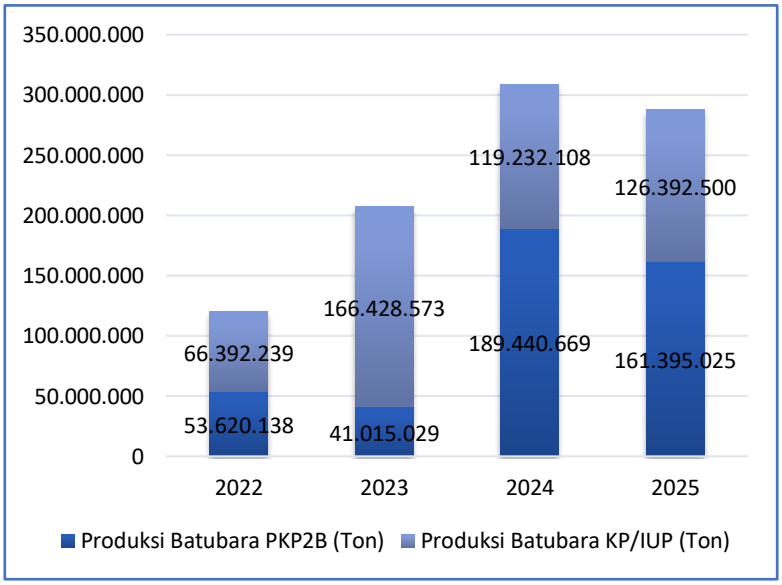
Fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral meliputi perumusan kebijakan teknis di bidang energi dan sumber daya mineral yang mengacu pada rencana strategis pemerintah daerah. Selain itu, dinas juga melaksanakan perencanaan, pembinaan, serta pengendalian kebijakan teknis di sektor energi dan sumber daya mineral.

Dinas ini turut berperan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang energi dan sumber daya mineral. Ruang lingkupnya mencakup perumusan, perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis di bidang mineral dan batubara, geologi dan air tanah, ketenagalistrikan, serta energi baru terbarukan dan konservasi energi.



Selain tugas dan fungsi tersebut, dinas juga melaksanakan urusan kesekretariatan, melakukan pembinaan terhadap kelompok jabatan fungsional, serta menjalankan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. Dengan demikian, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral memiliki peran penting dalam pengelolaan sumber daya energi dan mineral serta mendukung pemanfaatan sumber daya yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Grafik 5.3 1 Produksi Batubara menurut Jenis Perusahaan di Provinsi Kalimantan Timur, 2022- 2025



Berdasarkan data produksi batubara di Provinsi Kalimantan Timur tahun 2022-2025, terlihat adanya fluktuasi yang cukup signifikan pada kategori PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara) maupun KP/IUP (Kuasa Pertambangan/Izin Usaha Pertambangan). Pada tahun 2022, produksi batubara dari PKP2B tercatat sebesar 53,62 juta ton, sedangkan produksi dari KP/IUP mencapai 66,39 juta ton. Memasuki tahun 2023, produksi PKP2B mengalami penurunan menjadi 41,02 juta ton. Sebaliknya, produksi KP/IUP justru meningkat cukup tajam hingga mencapai 166,43 juta ton. Perbedaan arah perkembangan tersebut menunjukkan bahwa kontribusi produksi batubara dari masing- masing kategori izin pertambangan dapat berubah cukup besar dari satu tahun ke tahun berikutnya.

Pada tahun 2024, produksi batubara dari PKP2B mengalami peningkatan yang sangat signifikan hingga mencapai 189,44 juta ton. Sementara itu, produksi dari KP/IUP menurun menjadi 119,23 juta ton. Pada tahun 2025, produksi PKP2B kembali mengalami penurunan menjadi 161,40 juta ton, tetapi jumlah tersebut masih jauh lebih tinggi dibandingkan capaian pada tahun 2022 dan 2023. Di sisi lain, produksi KP/IUP kembali mengalami sedikit peningkatan menjadi 126,39 juta ton. Kondisi ini memperlihatkan bahwa selama periode 2022-2025 terjadi perubahan komposisi produksi batubara antara PKP2B dan KP/IUP, dengan kontribusi keduanya yang bergerak secara dinamis.

Perkembangan tersebut menggambarkan bahwa kegiatan pertambangan batubara di Kalimantan Timur masih mengalami perubahan dari tahun ke tahun. Fluktuasi produksi dapat berkaitan dengan berbagai faktor, seperti kondisi pasar batubara, kebijakan pertambangan, kapasitas dan kegiatan operasional perusahaan, serta penyesuaian target produksi. Meskipun demikian, besarnya produksi pada kedua kategori menunjukkan bahwa sektor pertambangan batubara tetap memiliki peran penting dalam aktivitas ekonomi Kalimantan Timur. Secara keseluruhan, data tahun 2022-2025 memperlihatkan bahwa produksi batubara di daerah ini tetap berada pada tingkat yang tinggi, meskipun mengalami kenaikan dan penurunan pada masing- masing kategori usaha pertambangan.



Tabel 5.3.1 Data Pertambangan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 - 2025

Nama Variabel	Tahun				Satuan
	2022	2023	2024	2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
Produksi Minyak Bumi	16.697.671	18.312.385	12.490.000	11.489.340	Barel
Produksi Gas Alam	163.134.528	175.079.218	125.070.000	116.537.400	MMBTU
Produksi Batubara PKP2B	4.653.620.138	41.015.029	189.440.669	161.395.025	Ton
Produksi Batubara KP/IUP	66.392.239	166.428.573	119.232.108	126.392.500	Ton
Total Produksi Batubara (PKP- 2B+KP/IUP)	120.012.377	207.443.602	308.672.777	287.787.525	Ton
Jumlah Perusahaan Batubara	1.403	1.403	1.403	1.403	Izin
Persentase Area Yang Direhabilitasi Dari Lahan Terganggu	39,00	39,00	39,00	-	Persen
Reklamasi Batubara	10.869,00	10.869,00	10.869,50	-	Ha
Luas Penambangan Liar YangDiterbitkan	75,5	75	75,5	-	Ha
Luas Area Penambangan Yang Liar	75,5	75	75,5	-	Ha

Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 5.3.2 Produksi Minyak Bumi dan Gas Bumi di Provinsi Kalimantan Timur, 2021- 2025

Tahun	Minyak Bumi (ribu barrel)	Gas Bumi (ribu MMBTU)
(1)	(2)	(3)
2021	17.742,36	172.829,53
2022	16.697,67	163.134,53
2023	18.312,38	175.079,22
2024	12.490,00	125.070,00
2025	11.489,34	116.537,40

Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 5.3.3 Produksi dan Pemasaran Batubara di Provinsi Kalimantan Timur (ton), 2021-2023

Tahun	Produksi	Pemasaran Domestik
(1)	(2)	(3)
2021	292.952.261,02	100.675.779,59
2022	305.481.285,92	104.770.634,55
2023	338.502.871,54	156.342.615,97

Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 5.3.4 Rasio Desa Berlistrik dan Rasio Elektrifikasi Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur (%), 2023

Kabupaten/Kota	Rasio Desa Berlistrik	Rasio Elektrifikasi
(1)	(2)	(3)
Paser	100,00	91,08
Kutai Barat	100,00	92,21
Kutai Kartanegara	100,00	89,43
Kutai Timur	100,00	88,63
Berau	100,00	90,01
Penajam Paser Utara	100,00	92,03
Mahakam Ulu	100,00	89,01
Kota Balikpapan	100,00	98,67
Kota Samarinda	100,00	100,00
Kota Bontang	100,00	94,04
Kalimantan Timur	**100,00**	**101,52**

Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 5.3. 5 Luas lahan Pertambangan Kalimantan Timur (Ha), 2019- 2025

Tahun	Pertambangan dan Penggalian	Batubara	Minyak dan Gas	Batuan Mineral Bukan Logam
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2019	4.163.689.872,00	4.153.297.886,00	9.571.843,00	820.143,35
2020	4.161.728.667,00	4.153.297.886,00	7.610.638,00	820.143,35
2021	4.160.249,20	4.153.297,89	6.131.173,81	820.143,35
2022	4.160.249,20	4.153.297,89	6.131.173,81	820.143,35
2023	4.160.249,20	4.153.297,89	741.506,40	1.440.694,81
2024	4.160.249,20	4.153.297,89	741.506,40	1.440.694,81
2025	4.160.249,20	4.153.297,89	741.506,40	1.440.694,81

Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur



5.4 Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Kalimantan Timur

Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur merupakan unit kerja yang memiliki peran penting dalam mendukung efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pengelolaan proses pengadaan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas. Biro ini berperan dalam memastikan seluruh kegiatan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dilaksanakan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, Biro Pengadaan Barang dan Jasa juga berperan dalam meningkatkan kapasitas dan profesionalisme aparatur pengadaan melalui kegiatan pembinaan dan pendampingan kepada perangkat daerah. Melalui penerapan sistem pengadaan secara elektronik (*e-procurement*), biro ini terus mendorong proses pengadaan yang lebih cepat, efisien, dan terbuka bagi para pelaku usaha, termasuk UMKM lokal. Berbagai upaya tersebut turut mendukung pembangunan ekonomi daerah serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur.

Tabel 5.4.1 Jumlah Penyedia Usaha Mikro Dan Kecil (UMK) yang Produknya Ditayangkan dalam Katalog Elektronik Provinsi Kalimantan Timur, 2025

Indikator	2025
(1)	(2)
Perlengkapan Spiritual Adat dan Keagamaan	7
Komponen Struktur	0
Pesawat/Peralatan Konstruksi Lainnya	809
Pesawat Tenaga dan Produksi	61
Pesawat Angkut	1.108
Pesawat Angkat	60
Material Olahan Utama	4.162
Material Dasar Utama	10.020
Peralatan Elektronik	10.020
Perlengkapan Alat Tulis	10.020
Alat Transportasi	10.020
Peralatan Olahraga	10.020
Peralatan Kantor	10.020
Pakaian dan Aksesoris Laki-Laki	10.020
Pakaian dan Aksesoris Perempuan	10.020
Hewan dan Ternak	10.020
Makanan dan Minuman	10.020
Hadiah Souvenir	2.680
Tanaman dan Sarana Pendukung	10.020
Peralatan Dapur	10.020
Perawatan Tubuh	1.649
Peralatan Pendidikan	10.020
Perkakas	10.020
Perikanan	10.020
Obat, Obat Bahan Alam, Vaksin dan PKMK	0

Lanjutan Tabel 5.4.1

Indikator	2025
(1)	(2)
Alat Penunjang Pelayanan Kesehatan	489
Alat Laboratorium	10.020
Perangkat Lunak/Software	10.020
Jasa Bidang Modifikasi Cuaca	0
Jasa Bidang Infrastruktur MKG	0
Jasa Bidang Geofisika	0
Jasa Bidang Meteorologi	0
Jasa Bidang Klimatologi	0
Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	0
Pekerjaan Cetak Sawah	133
Bidang Cipta Karya	9.360
Bidang Sumber Daya Air	689
Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)	4.817
Bidang Umum	2.115
Bidang Bina Marga	3.975
Jasa Sewa Pesawat/Peralatan Konstruksi Lainnya	130
Jasa Sewa Pesawat Tenaga dan Produksi	4
Jasa Sewa Pesawat Angkut	474
Jasa Sewa Pesawat Angkat	15
Jasa Akomodasi	516
Jasa Sewa Alat Transportasi	2.696
Jasa Sewa Peralatan Elektronik	412
Jasa Tenaga Kerja	2.760
Jasa Layanan	10.020

Sumber: Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur

5.5 Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Kalimantan Timur merupakan lembaga yang memiliki peran penting dalam mendorong penguatan ekosistem riset, pengembangan, dan inovasi di daerah. Sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang penelitian dan pengembangan, BRIDA Kaltim berperan dalam menghubungkan hasil riset dengan kebutuhan kebijakan serta mendukung proses pengambilan keputusan yang berbasis data dan ilmu pengetahuan. Melalui kerja sama dengan berbagai pihak, seperti perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan sektor swasta, BRIDA berupaya menghasilkan berbagai solusi inovatif yang dapat mendukung penyelesaian permasalahan pembangunan daerah.

Dalam pelaksanaannya, BRIDA Kalimantan Timur tidak hanya berfokus pada pengembangan penelitian terapan, tetapi juga mendorong pemanfaatan teknologi tepat guna untuk meningkatkan daya saing ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, BRIDA turut berperan dalam memperkuat kebijakan inovasi daerah melalui penyusunan regulasi, fasilitasi bagi para inovator lokal, serta pembinaan terhadap berbagai gagasan kreatif yang memiliki potensi memberikan nilai tambah bagi pembangunan daerah yang berkelanjutan.



Tabel 5.5.1 Indeks Inovasi Daerah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur, 2022-2025

Kabupaten/Kota	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Paser	52,16	41,32	35,78	45,46
Kutai Barat	55,83	58,69	58,59	59,81
Kutai Kartanegara	44,08	39,75	32,37	46,21
Kutai Timur	45,13	21,72	20,76	21,64
Berau	0,40	12,20	24,70	48,88
Penajam Paser Utara	28,4	15,96	37,61	44,73
Mahakam Ulu	5,80	5,80	18,10	8,40
Kota Balikpapan	53,88	39,14	57,21	60,92
Kota Samarinda	45,44	59,2	57,12	58,27
Kota Bontang	55,45	54,83	63,91	60,94
Kalimantan Timur	**50,17**	**49,23**	**61,74**	**59,9**

Sumber: Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 5.5.2 Indeks Daya Saing Daerah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur, 2024-2025

Kabupaten/Kota	2024	2025
(1)	(2)	(3)
Paser	3,31	3,48
Kutai Barat	3,52	3,58
Kutai Kartanegara	3,47	3,6
Kutai Timur	3,44	3,46
Berau	3,17	3,38
Penajam Paser Utara	3,33	3,5
Mahakam Ulu	2,83	2,94
Kota Balikpapan	4,07	4,12
Kota Samarinda	4,15	4,32
Kota Bontang	3,58	3,57
Kalimantan Timur	**3,37**	**3,63**

Sumber: Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Timur



PROFIL DATA

STATISTIK SEKTORAL
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

2026

KEUANGAN DAERAH

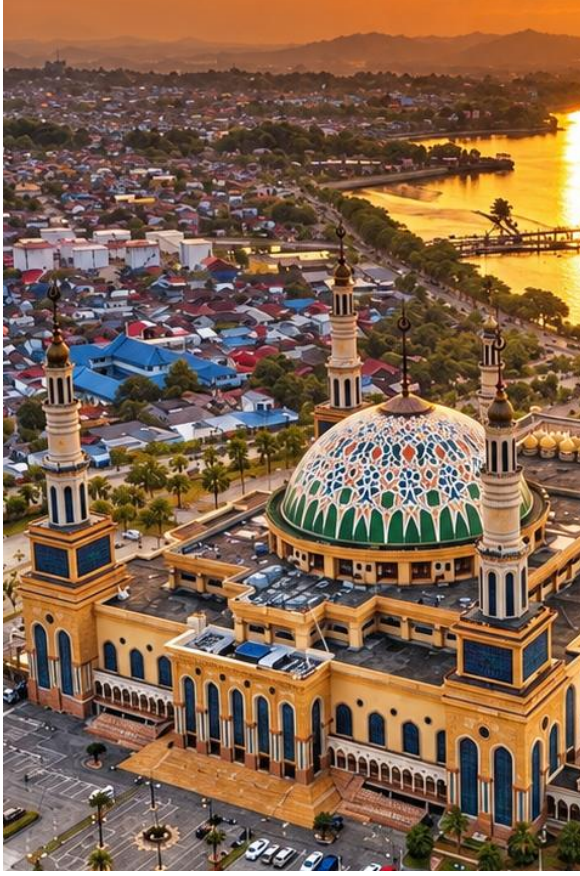
PROVINSI

KALIMANTAN TIMUR



BAB VI

EKONOMI DAN KEUANGAN



6.1 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perencanaan. Bappeda bertugas membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, khususnya pada bidang perencanaan pembangunan.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 43 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekda.

Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri atas Kepala Badan membawahkan: (1) Kepala Badan; (2) Sekretariat, membawahkan Subbagian Perencanaan Program, Subbagian Umum, dan Kelompok Jabatan Fungsional; (3) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional; (4) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional; (5) Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional; dan (6) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional. Bagan Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Tabel 6.1.1 Data Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025

Nama Data	Realisasi 2025	Satuan
(1)	(2)	(3)
Jumlah Daerah (Kabupaten/Kota)	10	Kabupaten/Kota
Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	98,89	Indeks
Persentase Rekomendasi Hasil Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah yang Ditindaklanjuti	100,00	%
Tingkat Kesesuaian Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Antar Level Pemerintahan	100,00	%
Tingkat Kesesuaian Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Antar Periode Perencanaan	95,87	%
Tingkat Kesesuaian Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dengan Dokumen Rencana Pembangunan Perangkat Daerah	100,00	%
Tingkat Kesesuaian Dokumen Rencana Perangkat Daerah Antar Periode Perencanaan	100,00	%
Jumlah Usulan dalam Musrenbang dari Daerah	20	Usulan
Jumlah Anggaran yang Diusulkan Daerah dalam Musrenbang yang Ditampung dan Disetujui	10.091.188.687.587	Rp
Jumlah Anggaran yang Diusulkan Daerah dalam Musrenbang	10.111.188.687.587	Rp
Jumlah Usulan dalam Musrenbang dari Daerah untuk Ditampung Lebih Lanjut	18	Usulan
Persentase Anggaran yang diusulkan Daerah dalam Musrenbang yang Ditampung oleh Pusat	99,80	%
Jumlah Pengeluaran Anggaran Keseluruhan per kapita	500.631.783.230	Rp

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 6.1.2 Luas Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021–2023

Daftar Data	2021	2022	2023	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Luas Wilayah	12.734.692	12.734.692	12.734.692	Ha
- Luas Daratan	12.638.893	12.638.893	12.638.893	Ha
- Luas Perairan Laut	95.799	95.799	95.799	Ha
Luas Pengelolaan Laut	3.997.373,71	3.997.373,72	3.997.373,72	Ha
Jarak				
- Paser	285	285	285	Km
- Kutai Barat	326	326	326	Km
- Kutai Kartanegara	30,2	30,2	30,2	Km
- Kutai Timur	162	162	162	Km
- Berau	523	523	523	Km
- Penajam Paser Utara	129	129	129	Km
- Mahakam Ulu	477	477	477	Km
- Balikpapan	115	115	115	Km
- Samarinda	-	-	-	Km
- Bontang	120	120	120	Km

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur

6.2 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Tipe A melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan. BPKAD memiliki fungsi dalam perumusan kebijakan teknis bidang keuangan dan aset yang mengacu pada rencana strategis Pemerintah Daerah, serta melaksanakan perencanaan, pengendalian, dan pembinaan dalam bidang anggaran, perbendaharaan, akuntansi, dan pengelolaan barang milik daerah. Selain itu, BPKAD juga melaksanakan evaluasi, pelaporan, dan administrasi sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Dalam pelaksanaannya, BPKAD turut menjalankan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sepanjang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.



Tabel 6.2.1 Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025

Uraian	2025	Satuan
(1)	(2)	(3)
BELANJA		
- Anggaran	14.939.392.634.132,00	Rupiah
- Realisasi	13.014.845.389.177,50	Rupiah
BELANJA OPERASI		
- Anggaran	9.956.825.775.767,62	Rupiah
- Realisasi	8.694.789.199.408,64	Rupiah
1) Belanja Pegawai		
- Anggaran	3.802.102.068.967,95	Rupiah
- Realisasi	3.445.626.583.155,71	Rupiah
2) Belanja Barang dan Jasa		
- Anggaran	5.410.502.474.364,67	Rupiah
- Realisasi	4.559.903.287.889,93	Rupiah
3) Belanja Bunga		
- Anggaran	0,00	Rupiah
- Realisasi	0,00	Rupiah
4) Belanja Hibah		
- Anggaran	710.045.732.435,00	Rupiah
- Realisasi	665.052.710.763,00	Rupiah
5) Belanja Bantuan Sosial		
- Anggaran	24.175.500.000,00	Rupiah
- Realisasi	22.497.000.000,00	Rupiah

Lanjutan Tabel 6.2.1

Uraian	2025	Satuan
(1)	(2)	(3)
BELANJA MODAL		
- Anggaran	4.880.766.312.956,38	Rupiah
- Realisasi	4.265.596.189.768,87	Rupiah
1) Belanja Modal Tanah		
- Anggaran	120.295.392.848,00	Rupiah
- Realisasi	105.174.546.207,00	Rupiah
2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin		
- Anggaran	1.198.745.948.464,34	Rupiah
- Realisasi	1.077.873.923.763,00	Rupiah
3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan		
- Anggaran	1.229.787.982.190,04	Rupiah
- Realisasi	955.008.010.952,87	Rupiah
4) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan		
- Anggaran	2.281.997.668.216,00	Rupiah
- Realisasi	2.082.120.462.869,00	Rupiah
5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		
- Anggaran	24.714.026.920,00	Rupiah
- Realisasi	24.333.757.193,00	Rupiah
BELANJA TAK TERDUGA		
- Anggaran	101.800.545.408,00	Rupiah
- Realisasi	54.460.000.000,00	Rupiah

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 6.2.2 Nilai Aset Sarana Prasarana Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2025

No	Daftar Data	2024	2025	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	6.772.560.062.340,75	7.830.532.353.197,45	Rupiah
2	Dinas Kesehatan	3.654.024.756.428,88	4.104.483.012.080,88	Rupiah
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	31.002.169.632.185,60	33.357.248.778.783,60	Rupiah
4	Satuan Polisi Pamong Praja	35.593.124.275,00	35.593.124.275,00	Rupiah
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	75.883.999.754,00	76.128.293.304,00	Rupiah
6	Dinas Sosial	110.475.308.190,15	114.085.080.756,15	Rupiah
7	Dinas Lingkungan Hidup	100.689.114.259,56	100.889.673.605,56	Rupiah
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	36.380.973.589,00	39.202.071.560,00	Rupiah
9	Dinas Perhubungan	443.384.712.806,09	605.552.926.239,00	Rupiah
10	Dinas Komunikasi dan Informatika	111.025.102.843,74	166.356.817.400,74	Rupiah
11	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	55.906.187.509,00	70.745.884.888,12	Rupiah
12	Dinas Pemuda dan Olah Raga	1.916.964.220.407,98	2.114.201.916.161,78	Rupiah
13	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	103.087.404.106,89	108.793.745.785,89	Rupiah
14	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	193.288.914.658,50	203.628.390.776,75	Rupiah
15	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	45.747.151.507,00	48.221.291.173,00	Rupiah
16	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	187.494.493.962,04	208.237.089.508,04	Rupiah
17	Dinas Kelautan Dan Perikanan	273.010.536.787,00	281.216.835.234,00	Rupiah
18	Dinas Pariwisata	53.468.876.212,34	56.323.032.089,34	Rupiah
19	Dinas Perkebunan	71.981.425.689,83	77.256.739.255,91	Rupiah
20	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	81.753.953.261,86	96.018.975.850,86	Rupiah
21	Dinas Kehutanan	679.559.119.256,75	744.610.196.788,13	Rupiah

Lanjutan Tabel 6.2.2

No	Daftar Data	2024	2025	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
22	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	35.111.875.041,00	35.580.084.141,00	Rupiah
23	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	253.290.121.554,98	294.755.785.625,58	Rupiah
24	Biro Umum	437.760.269.923,22	480.465.465.313,75	Rupiah
25	Biro Administrasi Pimpinan	8.106.614.720,00	8.409.790.620,00	Rupiah
26	Biro Hukum	3.004.612.009,00	3.110.617.758,00	Rupiah
27	Biro Organisasi	3.796.134.526,00	4.244.812.026,00	Rupiah
28	Biro Pemerintahan, Perbatasan dan Otonomi Daerah	13.222.122.707,00	13.262.879.687,00	Rupiah
29	Biro Kesejahteraan Rakyat	5.069.622.564,00	5.839.519.119,00	Rupiah
30	Biro Perekonomian	4.925.815.378,00	5.126.497.278,00	Rupiah
31	Biro Administrasi Pembangunan	9.669.857.345,00	10.759.447.925,00	Rupiah
32	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	2.960.856.110,00	4.691.066.891,00	Rupiah
33	Sekretariat DPRD	333.941.879.123,80	362.495.980.418,80	Rupiah
34	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	97.249.364.252,23	103.710.759.721,80	Rupiah
35	Badan Pendapatan Daerah	393.132.808.678,81	400.527.141.143,09	Rupiah
36	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	2.001.455.527.322,95	1.941.470.252.443,59	Rupiah
37	Badan Kepegawaian Daerah	97.013.505.562,79	98.705.658.177,79	Rupiah
38	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	227.563.829.835,39	236.938.159.515,39	Rupiah
39	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	29.858.801.804,00	30.508.220.484,00	Rupiah
40	Badan Penghubung Provinsi	84.563.107.830,93	85.881.314.357,13	Rupiah
41	Inspektorat	31.719.684.503,00	61.848.464.087,55	Rupiah
42	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	27.802.091.724,00	28.302.852.627,00	Rupiah

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 6.2.3 Alokasi Dana Perimbangan (Dana Transfer) TA 2023-2025

No	Daftar Data	2023	2024	2025	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	**TRANSFER**				
	- Anggaran	6.565.572.578.000,00	6.795.345.120.541,00	6.757.465.039.971,00	Rupiah
	- Realisasi	6.383.580.062.346,00	6.192.552.558.013,00	6.357.296.974.966,00	Rupiah
2	**TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN**				
	- Anggaran	5.368.072.578.000,00	4.992.900.000.000,00	4.696.713.889.971,00	Rupiah
	- Realisasi	5.186.080.062.346,00	4.391.448.912.082,00	4.312.085.824.966,00	Rupiah
	1) Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah				
	- Anggaran	5.368.072.578.000,00	4.992.900.000.000,00	4.696.713.889.971,00	Rupiah
	- Realisasi	5.186.080.062.346,00	4.391.448.912.082,00	4.312.085.824.966,00	Rupiah
3	**TRANSFER BANTUAN KEUANGAN**				
	- Anggaran	1.197.500.000.000,00	1.802.445.120.541,00	2.060.751.150.000,00	Rupiah
	- Realisasi	1.197.500.000.000,00	1.801.103.645.931,00	2.045.211.150.000,00	Rupiah
	1) Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya				
	- Anggaran	1.197.500.000.000,00	1.802.445.120.541,00	2.060.751.150.000,00	Rupiah
	- Realisasi	1.197.500.000.000,00	1.801.103.645.931,00	2.045.211.150.000,00	Rupiah
	2) Transfer Bantuan Keuangan Lainnya				
	- Anggaran	0,00	0,00	0,00	Rupiah
	- Realisasi	0,00	0,00	0,00	Rupiah
4	**SURPLUS / (DEFISIT)**				
	- Anggaran	-2.950.850.691.313,00	-976.554.771.199,00	-2.547.623.141.500,00	Rupiah
	- Realisasi	-1.973.972.410.316,02	1.621.113.350.301,67	-1.637.100.424.293,04	Rupiah

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 6.2.4 Pendapatan Provinsi Kalimantan Timur TA 2024

No	Daftar Data	2025	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	**PENDAPATAN**		
	- Anggaran	19.149.234.532.603,00	Rupiah
	- Realisasi	17.735.041.939.850,40	Rupiah
2	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**		
	- Anggaran	9.566.413.121.680,00	Rupiah
	- Realisasi	8.773.475.010.651,47	Rupiah
	1) Pendapatan Pajak Daerah		
	- Anggaran	7.937.566.254.869,00	Rupiah
	- Realisasi	6.888.387.426.692,70	Rupiah
	2) Pendapatan Retribusi Daerah		
	- Anggaran	1.114.869.349.428,00	Rupiah
	- Realisasi	1.247.937.529.327,30	Rupiah
	3) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		
	- Anggaran	377.458.223.635,00	Rupiah
	- Realisasi	368.004.360.121,26	Rupiah
	4) Lain-lain PAD Yang Sah		
	- Anggaran	136.519.293.748,00	Rupiah
	- Realisasi	269.145.694.510,21	Rupiah
3	**PENDAPATAN TRANSFER**		
	- Anggaran	9.277.648.428.533,00	Rupiah
	- Realisasi	8.672.180.152.238,00	Rupiah
	1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		
	- Anggaran	9.256.233.762.533,00	Rupiah
	- Realisasi	8.650.765.486.238,00	Rupiah
	2) Bagi Hasil Pajak		
	- Anggaran	962.310.607.533,00	Rupiah
	- Realisasi	706.814.176.500,00	Rupiah
	3) Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam		
	- Anggaran	6.592.279.732.000,00	Rupiah
	- Realisasi	6.366.622.703.000,00	Rupiah

Lanjutan Tabel 6.2.4

No	Daftar Data	2025	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)
	4) Dana Alokasi Umum (DAU)		
	- Anggaran	1.049.286.349.000,00	Rupiah
	- Realisasi	971.429.651.903,00	Rupiah
	5) Dana Alokasi Khusus (DAK)		
	- Anggaran	652.357.074.000,00	Rupiah
	- Realisasi	605.898.954.835,00	Rupiah
	6) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya		
	- Anggaran	21.414.666.000,00	Rupiah
	- Realisasi	21.414.666.000,00	Rupiah
	7) Dana Penyesuaian (DID)		
	- Anggaran	0,00	Rupiah
	- Realisasi	0,00	Rupiah
	8) Bantuan Keuangan		
	- Anggaran	0,00	Rupiah
	- Realisasi	0,00	Rupiah
	9) Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten		
	- Anggaran	0,00	Rupiah
	- Realisasi	0,00	Rupiah
	10) Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kota		
	- Anggaran	0,00	Rupiah
	- Realisasi	0,00	Rupiah
4	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**		
	- Anggaran	305.172.982.390,00	Rupiah
	- Realisasi	289.386.776.961,00	Rupiah
	1) Pendapatan Hibah		
	- Anggaran	28.361.111.193,00	Rupiah
	- Realisasi	18.671.285.000,00	Rupiah
	2) Pendapatan Lainnya		
	- Anggaran	276.811.871.197,00	Rupiah
	- Realisasi	270.715.491.961,00	Rupiah

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 6.2.5 Status Kepemilikan Gedung Bangunan Kantor Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2025

Status Kepemilikan Gedung Bangunan Kantor	2024	2025	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	653	641	Unit
- Milik Sendiri	652	640	Unit
- Sewa	0	0	Unit
- Gabung	0	0	Unit
- Pinjam	1	1	Unit
Dinas Kesehatan	32	36	Unit
- Milik Sendiri	32	36	Unit
- Sewa	0	0	Unit
- Gabung	0	0	Unit
- Pinjam	0	0	Unit
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	143	158	Unit
- Milik Sendiri	143	158	Unit
- Sewa	0	0	Unit
- Gabung	0	0	Unit
- Pinjam	0	0	Unit
Satuan Polisi Pamong Praja	1	1	Unit
- Milik Sendiri	1	1	Unit
- Sewa	0	0	Unit
- Gabung	0	0	Unit
- Pinjam	0	0	Unit
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3	3	Unit
- Milik Sendiri	2	2	Unit
- Sewa	0	0	Unit
- Gabung	0	0	Unit
- Pinjam	1	1	Unit
Dinas Sosial	24	24	Unit
- Milik Sendiri	24	24	Unit
- Sewa	0	0	Unit
- Gabung	0	0	Unit
- Pinjam	0	0	Unit
Dinas Lingkungan Hidup	3	3	Unit
- Milik Sendiri	3	3	Unit
- Sewa	0	0	Unit
- Gabung	0	0	Unit
- Pinjam	0	0	Unit

Lanjutan Tabel 6.2.5

Status Kepemilikan Gedung Bangunan Kantor	2024	2025	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	2	2	Unit
- Milik Sendiri	2	2	Unit
- Sewa	0	0	Unit
- Gabung	0	0	Unit
- Pinjam	0	0	Unit
Dinas Perhubungan	17	26	Unit
- Milik Sendiri	17	26	Unit
- Sewa	0	0	Unit
- Gabung	0	0	Unit
- Pinjam	0	0	Unit
Dinas Komunikasi dan Informatika	1	1	Unit
- Milik Sendiri	1	1	Unit
- Sewa	0	0	Unit
- Gabung	0	0	Unit
- Pinjam	0	0	Unit
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2	3	Unit
- Milik Sendiri	2	3	Unit
- Sewa	0	0	Unit
- Gabung	0	0	Unit
- Pinjam	0	0	Unit
Dinas Pemuda dan Olah Raga	9	10	Unit
- Milik Sendiri	9	10	Unit
- Sewa	0	0	Unit
- Gabung	0	0	Unit
- Pinjam	0	0	Unit
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	3	3	Unit
- Milik Sendiri	3	3	Unit
- Sewa	0	0	Unit
- Gabung	0	0	Unit
- Pinjam	0	0	Unit
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	9	9	Unit
- Milik Sendiri	9	9	Unit
- Sewa	0	0	Unit
- Gabung	0	0	Unit
- Pinjam	0	0	Unit

Lanjutan Tabel 6.2.5

Status Kepemilikan Gedung Bangunan Kantor	2024	2025	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1	2	Unit
- Milik Sendiri	1	2	Unit
- Sewa	0	0	Unit
- Gabung	0	0	Unit
- Pinjam	0	0	Unit
Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	61	63	Unit
- Milik Sendiri	61	63	Unit
- Sewa	0	0	Unit
- Gabung	0	0	Unit
- Pinjam	0	0	Unit
Dinas Kelautan Dan Perikanan	46	49	Unit
- Milik Sendiri	46	49	Unit
- Sewa	0	0	Unit
- Gabung	0	0	Unit
- Pinjam	0	0	Unit
Dinas Pariwisata	9	10	Unit
- Milik Sendiri	9	10	Unit
- Sewa	0	0	Unit
- Gabung	0	0	Unit
- Pinjam	0	0	Unit
Dinas Perkebunan	30	35	Unit
- Milik Sendiri	30	35	Unit
- Sewa	0	0	Unit
- Gabung	0	0	Unit
- Pinjam	0	0	Unit
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	21	20	Unit
- Milik Sendiri	21	20	Unit
- Sewa	0	0	Unit
- Gabung	0	0	Unit
- Pinjam	0	0	Unit
Dinas Kehutanan	246	257	Unit
- Milik Sendiri	246	257	Unit
- Sewa	0	0	Unit
- Gabung	0	0	Unit
- Pinjam	0	0	Unit

Lanjutan Tabel 6.2.5

Status Kepemilikan Gedung Bangunan Kantor	2024	2025	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	1	1	Unit
- Milik Sendiri	1	1	Unit
- Sewa	0	0	Unit
- Gabung	0	0	Unit
- Pinjam	0	0	Unit
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	11	13	Unit
- Milik Sendiri	11	13	Unit
- Sewa	0	0	Unit
- Gabung	0	0	Unit
- Pinjam	0	0	Unit
Biro Umum	6	7	Unit
- Milik Sendiri	6	7	Unit
- Sewa	0	0	Unit
- Gabung	0	0	Unit
- Pinjam	0	0	Unit
Biro Administrasi Pimpinan	0	0	Unit
- Milik Sendiri	0	0	Unit
- Sewa	0	0	Unit
- Gabung	0	0	Unit
- Pinjam	0	0	Unit
Biro Hukum	0	0	Unit
- Milik Sendiri	0	0	Unit
- Sewa	0	0	Unit
- Gabung	0	0	Unit
- Pinjam	0	0	Unit
Biro Organisasi	0	0	Unit
- Milik Sendiri	0	0	Unit
- Sewa	0	0	Unit
- Gabung	0	0	Unit
- Pinjam	0	0	Unit
Biro Pemerintahan, Perbatasan dan Otonomi Daerah	0	0	Unit
- Milik Sendiri	0	0	Unit
- Sewa	0	0	Unit
- Gabung	0	0	Unit
- Pinjam	0	0	Unit

Lanjutan Tabel 6.2.5

Status Kepemilikan Gedung Bangunan Kantor	2024	2025	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Biro Kesejahteraan Rakyat	0	0	Unit
- Milik Sendiri	0	0	Unit
- Sewa	0	0	Unit
- Gabung	0	0	Unit
- Pinjam	0	0	Unit
Biro Perekonomian	0	0	Unit
- Milik Sendiri	0	0	Unit
- Sewa	0	0	Unit
- Gabung	0	0	Unit
- Pinjam	0	0	Unit
Biro Administrasi Pembangunan	0	0	Unit
- Milik Sendiri	0	0	Unit
- Sewa	0	0	Unit
- Gabung	0	0	Unit
- Pinjam	0	0	Unit
Biro Pengadaan Barang dan Jasa	0	0	Unit
- Milik Sendiri	0	0	Unit
- Sewa	0	0	Unit
- Gabung	0	0	Unit
- Pinjam	0	0	Unit
Sekretariat DPRD	4	4	Unit
- Milik Sendiri	4	4	Unit
- Sewa	0	0	Unit
- Gabung	0	0	Unit
- Pinjam	0	0	Unit
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	8	8	Unit
- Milik Sendiri	8	8	Unit
- Sewa	0	0	Unit
- Gabung	0	0	Unit
- Pinjam	0	0	Unit
Badan Pendapatan Daerah	67	67	Unit
- Milik Sendiri	67	67	Unit
- Sewa	0	0	Unit
- Gabung	0	0	Unit
- Pinjam	0	0	Unit

Lanjutan Tabel 6.2.5

Status Kepemilikan Gedung Bangunan Kantor	2024	2025	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	35	39	Unit
- Milik Sendiri	35	39	Unit
- Sewa	0	0	Unit
- Gabung	0	0	Unit
- Pinjam	0	0	Unit
Badan Kepegawaian Daerah	9	8	Unit
- Milik Sendiri	9	8	Unit
- Sewa	0	0	Unit
- Gabung	0	0	Unit
- Pinjam	0	0	Unit
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	7	7	Unit
- Milik Sendiri	7	7	Unit
- Sewa	0	0	Unit
- Gabung	0	0	Unit
- Pinjam	0	0	Unit
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	2	2	Unit
- Milik Sendiri	2	2	Unit
- Sewa	0	0	Unit
- Gabung	0	0	Unit
- Pinjam	0	0	Unit
Badan Penghubung Provinsi	3	5	Unit
- Milik Sendiri	3	5	Unit
- Sewa	0	0	Unit
- Gabung	0	0	Unit
- Pinjam	0	0	Unit
Inspektorat	1	1	Unit
- Milik Sendiri	1	1	Unit
- Sewa	0	0	Unit
- Gabung	0	0	Unit
- Pinjam	0	0	Unit
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0	0	Unit
- Milik Sendiri	0	0	Unit
- Sewa	0	0	Unit
- Gabung	0	0	Unit
- Pinjam	0	0	Unit

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur

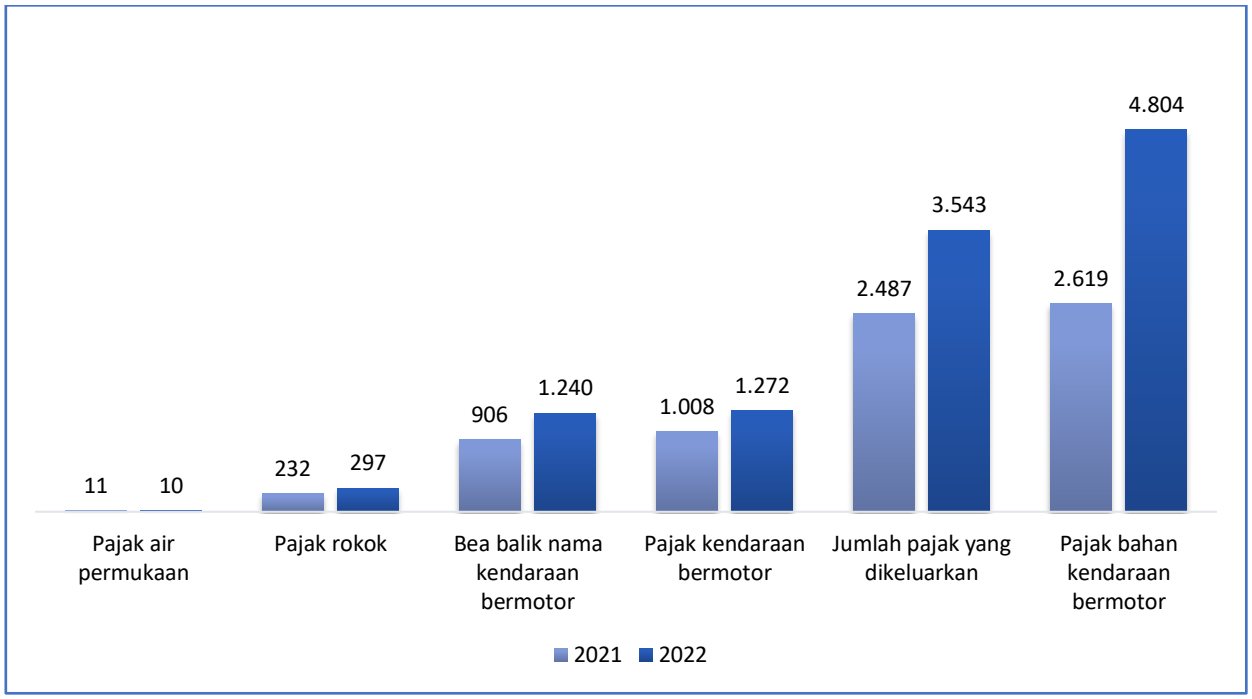
6.3 Badan Pendapatan Daerah



Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) merupakan badan yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan, khususnya dalam pengelolaan pendapatan daerah. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 3 Tahun 2001 tanggal 24 April 2001, Bapenda memiliki lima fungsi utama, yaitu penyusunan kebijakan teknis di bidang pendapatan, pelaksanaan pelayanan umum lintas kabupaten/kota, pembinaan teknis di bidang pendapatan, pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Daerah, serta pengelolaan urusan tata usaha dinas.

Realisasi penerimaan pajak daerah Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2022 secara umum mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2021. Namun, kondisi berbeda terlihat pada pajak air permukaan yang mengalami penurunan, dari sebesar Rp10.897.465.989,00 pada tahun 2021 menjadi Rp9.543.685.938,00 pada tahun 2022.

Grafik 6.3.1 Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Timur, 2021-2022



Tabel 6.3.1 Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022-2024 (Rupiah)

Jenis Pajak Daerah	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Rp1.271.895.140.197	Rp1.314.476.696.918	Rp1.419.943.632.225
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Rp1.240.322.341.882	Rp1.525.008.136.195	Rp1.576.232.699.700
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Rp4.804.399.816.223	Rp5.547.986.188.284	Rp5.235.191.665.571
Pajak Air Permukaan	Rp9.543.685.938	Rp12.752.795.512	Rp12.682.182.248
Pajak Rokok	Rp297.436.495.255	Rp294.935.704.900	Rp308.722.425.832
Jumlah Pajak yang dikeluarkan	Rp3.542.721.678.744	Rp4.806.911.873.431	

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 6.3.2 Objek Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2022

Wilayah	Sedan	Jeep	Minibus	Mikrobus
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Paser	195	1.011	9.980	224
Kutai Barat	48	645	6.966	95
Kutai Kartanegara	631	2.324	28.570	450
Kutai Timur	271	1.743	18.302	340
Berau	140	856	10.106	199
Penajam Paser Utara	70	412	4.956	138
Balikpapan	6.555	9.400	77.708	1.411
Samarinda	3.771	10.023	72.487	1.217
Bontang	1.517	2.068	17.303	383
Kalimantan Timur	13.198	28.482	246.378	4.457

Lanjutan Tabel 6.3.2

Wilayah	Bus	Pickup	Truck	Sepeda Motor	Total
(1)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Paser	58	7.600	3.190	163.997	186.255
Kutai Barat	40	4.806	1.705	102.442	116.747
Kutai Kartanegara	90	17.997	6.805	432.647	489.514
Kutai Timur	164	10.760	5.601	183.510	220.691
Berau	268	7.010	2.698	138.415	159.816
Penajam Paser Utara	11	3.746	2.317	82.998	94.654
Balikpapan	519	36.573	13.332	497.731	643.235
Samarinda	341	33.860	16.565	674.960	813.228
Bontang	174	5.084	2.040	120.662	149.365
Kalimantan Timur	1.665	127.436	54.253	2.397.362	2.873.505

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 6.3.3 Dana Alokasi Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022-2024

Indikator	Tahun		
	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)
Dana Alokasi Umum	Rp 824.108.986.889	Rp 857.319.948.081	Rp 927.318.126.878
a. Rasio Dana Alokasi Umum Terhadap Dana Perimbangan	10,58%	12,24%	7,98%
b. Rasio Dana Alokasi Umum Terhadap Pendapatan Daerah	4,90%	0,00%	4,20%
c. Rasio Dana Alokasi Umum Terhadap Total Belanja APBD	6,66%	6,43%	6,50%
d. Persentase Pertumbuhan Dana Alokasi Umum	-0,48%	4,03%	8,16%

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 6.3.4 Dana Alokasi Khusus Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022-2024

Indikator	Tahun		
	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)
Dana Alokasi Khusus	Rp599.563.058.143	Rp662.636.508.108	Rp74.027.762.934
a. Rasio Dana Alokasi Khusus Terhadap Dana Perimbangan	7,70%	9,46%	6,37%
b. Rasio Dana Alokasi Khusus Terhadap Pendapatan Daerah	3,57%	0,00%	3,35%
c. Rasio Dana Alokasi Khusus Terhadap Total Belanja APBD	4,85%	4,97%	5,19%
d. Persentase Pertumbuhan Dana Alokasi Khusus	-5,85%	10,52%	11,72%

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 6.3.5 Data Penerimaan Retribusi Daerah Tahun 2023-2024 (rupiah)

Indikator	Tahun	
	2023	2024
(1)	(2)	(3)
Retribusi Jasa Umum	5.926.654.000	1.007.400.506.678
Retribusi Jasa Usaha	55.647.795.503	27.029.822.137
Retribusi Perizinan Tertentu	460.037.000	213.980.400

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 6.3.6 Realisasi Dana Perimbangan dan Pendapatan Transfer Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024

Jenis Pendapatan Transfer	2024
-1	-2
Jumlah Dana Alokasi Khusus	
1). Pagu	742.114.657.000
2). Realisasi	740.277.629.340
Jumlah Dana Alokasi Umum	
1). Pagu	1.042.719.353.000
2). Realisasi	927.318.126.878
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak	
1). Pagu	647.013.092.000
2). Realisasi	646.998.081.000
Jumlah Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	
1). Pagu	8.579.526.871.517
2). Realisasi	9.260.987.234.000
Jumlah Dana Perimbangan	
1). Pagu	11.032.874.433.517
2). Realisasi	11.616.584.415.718

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 6.3.7 Data Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Tahun 2022-2023

Variabel	Tahun	
	2022	2023
(1)	(2)	(3)
Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya	Rp3.542.721.678.744	Rp4.806.911.873.431
Rasio dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya terhadap lain lain pendapatan daerah yang sah	206,61	53,30
Rasio dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya terhadap pendapatan daerah	21,08%	26,73%
Rasio dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya terhadap total belanja APBD	28,64%	24,37%
Persentase pertumbuhan dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya	42,44%	35,68%

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur

6.4 Biro Perekonomian Setda

Biro Perekonomian Provinsi Kalimantan Timur merupakan unsur Sekretariat Daerah yang berada di bawah koordinasi Sekretaris Daerah. Biro ini bertugas merumuskan kebijakan, mengoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat daerah, serta melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan di bidang perekonomian, sumber daya alam, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Layanan Umum Daerah. Biro Perekonomian dipimpin oleh Kepala Biro yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Realisasi penerimaan pajak daerah Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2022 secara umum mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2021. Namun, kondisi berbeda terlihat pada pajak air permukaan yang mengalami penurunan, dari sebesar Rp10.897.465.989,00 pada tahun 2021 menjadi Rp9.543.685.938,00 pada tahun 2022.

Tabel 6.4.1 Kuota Penugasan Penyediaan dan Pendistribusian Kuota Volume Penyalur Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Tahun 2019–2021 Provinsi Kalimantan Timur

Kabupaten/Kota	Tahun		
	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)
Samarinda	58.110	57.425	57.425
Balikpapan	41.345	37.756	37.756
Bontang	15.029	14.491	14.491
Kutai Kartanegara	84.587	81.557	81.557
Kutai Timur	37.231	39.518	39.518
Kutai Barat	32.810	31.122	31.122
Mahakam Ulu	9.309	8.859	8.859
Penajam Paser Utara	10.357	9.993	9.993
Paser	9.945	9.962	9.962
Berau	31.425	31.563	31.563
Kalimantan Timur	330.148	322.246	322.246

Sumber: Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 6.4.2 Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2022

Elemen Data	Tahun			Satuan
	2023	2024	2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
BUMD				
1. Jumlah BUMD	8	8	8	unit
2. Jumlah Aset dan Modal BUMD	58,421	60,309	52,655	Triliun Rp
A. Aset	51,603	53,492	45,838	Triliun Rp
1). Bankaltimtara	49,149	51,112	43,419	Triliun Rp
2). Perusda Pertambangan (BKS)	0,24	0,238	0,285	Triliun Rp
3). Perusda Melati Bhakti Satya (MBS)	1,243	1,253	1,249	Triliun Rp
4). Perusda Agro Kaltim Utama	0,001	0,001	0,001	Triliun Rp
5). Perusda Sylva Kaltim Sejahtera (SKS)	0,003	0,002	0,002	Triliun Rp
6). Perusda Kelistrikan	0,113	0,112	0,113	Triliun Rp
7). PT. Migas Mandiri Pratama (MMP)	0,696	0,599	0,557	Triliun Rp
8). PT. Jamkrida	0,159	0,176	0,211	Triliun Rp
B. Modal				
1). Bankaltimtara	5,1	5,1	5,1	Triliun Rp
2). Perusda Pertambangan (BKS)	0,005	0,005	0,005	Triliun Rp
3). Perusda Melati Bhakti Satya (MBS)	1,245	1,245	1,245	Triliun Rp
4). Perusda Agro Kaltim Utama	0,027	0,027	0,027	Triliun Rp
5). Perusda Sylva Kaltim Sejahtera (SKS)	0,005	0,005	0,005	Triliun Rp
6). Perusda Kelistrikan	0,126	0,126	0,126	Triliun Rp
7). PT. Migas Mandiri Pratama (MMP)	0,16	0,16	0,16	Triliun Rp
8). PT. Jamkrida	0,15	0,15	0,15	Triliun Rp
3. Return on Asset (ROA) BUMD	1,36%	1,38%	1,10%	Persentase

Sumber: Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Timur

6.5 Inspektorat

Inspektorat mempunyai tugas pokok menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan provinsi serta kabupaten/kota. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat menjalankan beberapa fungsi, yaitu:

1. Merumuskan kebijakan di bidang pengawasan sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
2. Memberikan dukungan dalam perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
3. Melaksanakan pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian terhadap pelaksanaan tugas pengawasan di bidang pembangunan;
4. Melaksanakan pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian terhadap tugas pengawasan di bidang pemerintahan;
5. Melaksanakan pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian terhadap tugas pengawasan di bidang kemasyarakatan;
6. Menyelenggarakan urusan kesekretariatan;
7. Melaksanakan pembinaan terhadap kelompok jabatan fungsional; dan
8. Menjalankan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.



Tabel 6.5.1 Zona Integritas Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023-2025

Variabel	Tahun			Satuan
	2023	2024	2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Jumlah SKPD yang Ditetapkan Debagai Zona Integritas Menuju WBK-WBBM	10	3	3	Perangkat Daerah
Opini Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi	WTP	WTP	WTP	Opini
Persentase Kab/Kota yang Memperoleh Opini WTP	100,00	100,00	-	%
Aparatur Pengawasan yang Bersertifikat	35	82	80	Orang
Persentase Capaian Kinerja SKPD Sesuai Tupoksi dan Penetapan Kinerjanya	92,01	92,00	92,00	%
Skor Rata-rata Evaluasi akuntabilitas kinerja SKPD	70,87	78,74	78,74	Skor
Skor Rata-Rata Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kabupaten/Kota	62,85	54,44	54,44	Skor
Persentase LPPD Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Nilai Sangat Tinggi	86,58	-	-	%
Cakupan Pengawasan yang Akan Dicapai	100,00	100,00	100,00	%
Persentase Kegiatan Pengawasan yang Sesuai dengan Program Pengawasan	100,00	100,00	100,00	%
Skor Rata-Rata Penerapan SPIP SKPD	3,034	3,203	-	Skor
Persentase Laporan Hasil Pengawasan yang Terbit Tepat Waktu	90,00	98,00	98,00	%
Indeks Persepsi Anti Korupsi	72,71	72,75	69,78	Skor
Kasus KKN	5	1	-	Kasus

Sumber: Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 6.5.2 Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2022

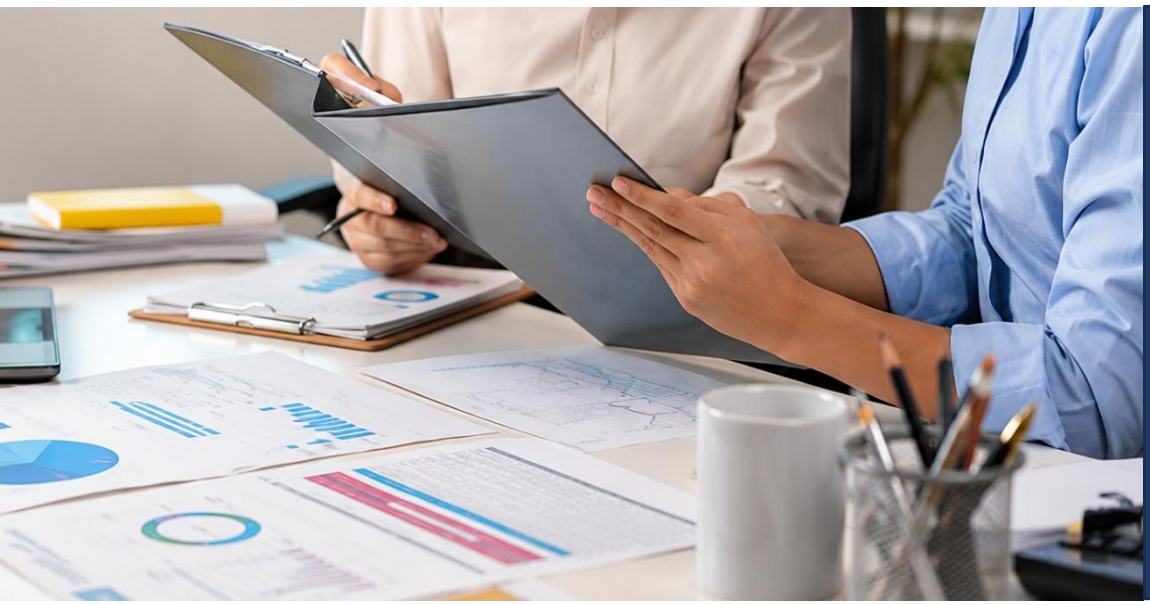
Daftar Data	Tahun			Satuan
	2023	2024	2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Jumlah Perangkat Daerah yang direviu laporan keuangannya	30	27	25	Perangkat Daerah
Jumlah Pengawasan Umum dan Teknis Pemda Kab/Kota	4	3	3	Kegiatan

Sumber: Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur

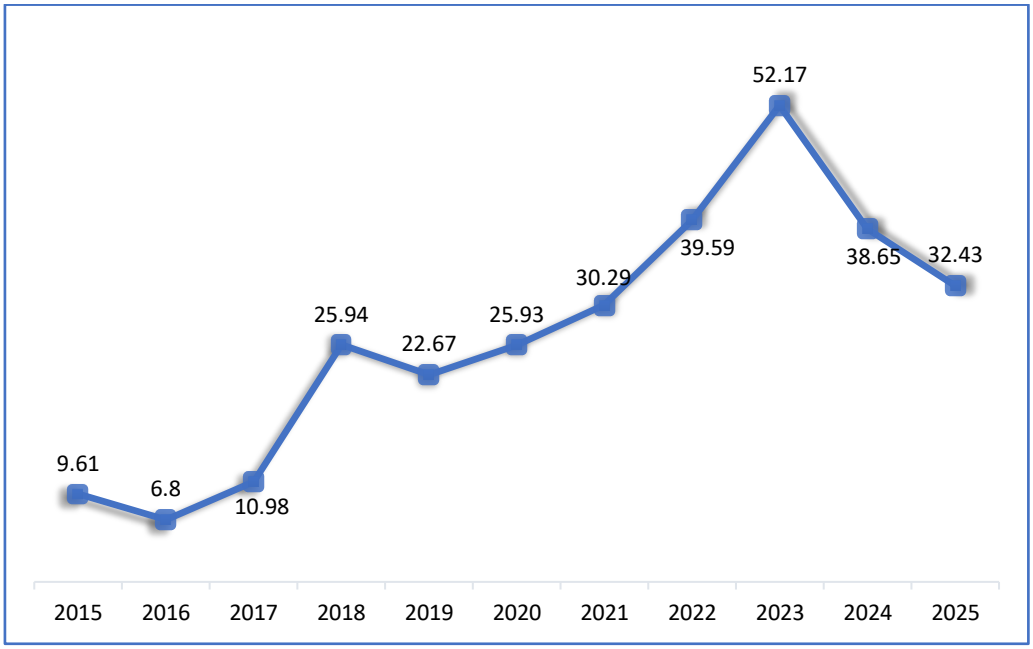
6.6 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Timur mempunyai tugas dalam membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal serta pelayanan terpadu satu pintu. Pelaksanaan tugas tersebut mencakup penyusunan dan penerapan kebijakan penanaman modal, penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan, serta koordinasi pelayanan dengan perangkat daerah dan instansi terkait. Melalui pelayanan terpadu, DPMPTSP juga berperan dalam mendukung kemudahan proses investasi dan kegiatan usaha di Provinsi Kalimantan Timur.

Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Provinsi Kalimantan Timur pada periode tahun 2015-2025 menunjukkan perkembangan yang berfluktuasi. Nilainya meningkat dari Rp9,61 triliun pada tahun 2015 menjadi Rp25,94 triliun pada tahun 2018, meskipun sempat mengalami penurunan pada beberapa tahun. Peningkatan berlanjut hingga mencapai nilai tertinggi sebesar Rp52,17 triliun pada tahun 2023, sebelum menurun menjadi Rp38,65 triliun pada tahun 2024 dan Rp32,43 triliun pada tahun 2025. Secara umum, realisasi PMDN cenderung meningkat hingga tahun 2023, kemudian mengalami penurunan pada dua tahun berikutnya. Visualisasi realisasi PMDN di Provinsi Kalimantan Timur tahun 2015-2025 dapat dilihat pada diagram garis berikut:



Grafik 6.6.1 Realisasi Investasi PMDN Provinsi Kalimantan Timur, 2015-2025





Tabel 6.6.1 Rekapitulasi Perizinan E-PTSP Menurut Sektor Usaha di Provinsi Kalimantan Timur, Januari-September 2025

Sektor Usaha	Total
(1)	(2)
Lingkungan Hidup	13
Kehutanan	13
Pendidikan dan Kebudayaan	4
Energi dan Sumber Daya Mineral	52
Kesehatan	1
Perhubungan	26
Sosial	5
Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	30
Perikanan Perairan dan Non Perairan	2
Perubahan Perizinan dan Non Perizinan	1
Total	**147**

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 6.6.2 Realisasi Proyek Penanaman Modal Dalam Negeri Menurut Sektor Ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur, Triwulan II 2025

Bidang Usaha	Jumlah Proyek	Realisasi Investasi (Juta)	Tenaga Kerja	
			Indonesia	Asing
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I. SEKTOR PRIMER/PRIMARY SECTOR				
1. Tanaman Pangan, Perkebunandan Peternakan/ Food Crops, Plantation Crops and Livestock	342	4.159.756.469.104	6.633	-
2. Kehutanan/Forestry	217	214.831.173.864	133	-
3. Perikanan/Fishing	83	290.300.000	28	-
4. Pertambangan/Mining	1063	290.300.000	3.232	3
II. SEKTOR SEKUNDER / SECONDARY SECTOR				
1. Industri Makanan/Manufacture of Food Products	142	1.328.691.755.447	430	-
2. Industri Tekstil/Manufacture of Textiles	50	219.350.000	9	-
3. Industri Barang dari Kulit dan Alas Kaki/ Manufacture of Leather and Related Products, and Footwear	1			-
4. Industri Kayu/Manufacture of Wood Products	38	2.571.389.371	8	-
5. Industri Kertas, Barang Kertas dan Pencetakan/ Manufacture of Paper and Printing	38	10.700.000		-
6. Industri Kimia Dasar, Barang Kimia dan Farmasi/ Manufacture of Chemicals and Pharmaceuticals Products	88	834.597.544.479	222	-
7. Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik/ Manufacture of Rubberand Plastics Products	16	14.435.889.988	83	-
8. Industri Mineral Non Logam/Manufacture of Non-Metallic Mineral	90	7.588.221.006	37	-
9. Industri Logam Dasar, Barang Logam, Mesin dan Elektronik/Manufacture of Metal, Machineryand Electronics	68	906.140.349.545	95	-

Lanjutan Tabel 6.6.2

Bidang Usaha	Jumlah Proyek	Realisasi Investasi (Juta)	Tenaga Kerja	
			Indonesia	Asing
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
10. Industri Instrumen Kedokteran,Presisi, Optik dan Jam/ Manufacture of Medical, Precision, Optical and Clock Instruments	94	35.026.211.152	190	-
11. Industri Alat Angkutan dan Transportasi Lainnya/ Manufactured of Motorized Vehicle and Other Transportation Equipment	77	35.452.715.823	30	-
12. Industri Lainnya/OtherManufacturing	135	43.920.920.257	38	-
III. SEKTOR TERSIER/TERTIARY SECTOR				
1. Listrik, Gas dan Air /Electricity, Gas and Water	169	177.543.197.317	3	-
2. Konstruksi/Construction	3.158	164.688.218.059	454	-
3. Perdagangan & Reparasi / Trade & Repair	5.665	737.413.165.379	1.880	-
4. Hotel dan Restoran / Hotel and Restaurant	465	48.152.877.319	443	-
5. Transportasi, Gudang & Komunikasi/Transportation, Storage, and Communication	1.041	1.094.512.926.301	1.453	-
6. Perumahan, Kawasan Industri & Perkantoran/ Housing, Industrial Estate & Office Buildings	249	139.443.348.857	47	-
7. Jasa Lainnya/Other Services Activities	2.202	139.443.348.857	2.208	2
Jumlah/Total	**15.491**	**10.085.020.372.125**	**17.656**	**5**

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 6.6.3 Realisasi Proyek Penanaman Modal Dalam Negeri Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur, April-Juni 2025

Bidang Usaha	Jumlah Proyek	Realisasi Investasi (Juta Rupiah)	Tenaga Kerja	
			Indonesia	Asing
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kabupaten				
1. Paser	655	208.505,61	3.482	-
2. Kutai Barat	470	934.725,00	203	-
3. Kutai Kartanegara	2.148	554.110,77	703	-
4. Kutai Timur	1.527	3.440.954,96	2.241	-
5. Berau	629	1.256.390,90	925	1
6. Penajam Paser Utara	237	141.012,37	805	-
7. Mahakam Ulu	64	94.043,36	7	-
Kota				
1. Balikpapan	4.139	3.252.463,58	2.628	1
2. Samarinda	3.098	793.404,17	2.735	-
3. Bontang	1.461	574.304,92	695	-
Kalimantan Timur	**14.428**	**11.249.915,64**	**14.424**	**2**

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 6.6.4 Realisasi Penanaman Modal Asing di Provinsi Kalimantan Timur, Tahun 2015-2025

Tahun	Jumlah Proyek	Realisasi Investasi (Juta Rupiah)	Tenaga Kerja	
			Indonesia	Asing
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2015	420	2.381.442,30	66.230	442
2016	471	1.181.859,20	22.204	350
2017	566	1.285.215,20	15.508	153
2018	513	587.501,60	12.500	68
2019	903	863.099,40	15.166	100
2020	778	378.027,20	5.868	92
2021	1.034	745.190,20	5.650	140
2022	1.005	1.266.221,77	16.247	384
2023	1.991	1.332.710,60	13.330	434
2024	3.018	1.417.000,00	13.417	-
2025	1.514	521.572,52	12.281	47

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 6.6.5 Realisasi Proyek Penanaman Modal Asing Menurut Sektor Ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur, April-Juni 2025

Bidang Usaha	Jumlah Proyek	Realisasi Investasi (Juta)	Tenaga Kerja	
			Indonesia	Asing
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I. SEKTOR PRIMER/PRIMARY SECTOR				
1. Tanaman Pangan, Perkebunandan Peternakan/ Food Crops, Plantation Crops and Livestock	79	48.328.206	2.596	5
2. Kehutanan/Forestry	20	2.032.940	9	-
3. Perikanan/Fishing	-	-	-	-
4. Pertambangan/Mining	116	54.993.469	394	-
II. SEKTOR SEKUNDER / SECONDARY SECTOR				
1. Industri Makanan/Manufacture of Food Products	75	22.149.103	212	1
2. Industri Tekstil/Manufacture of Textiles	-	-	-	-
3. Industri Barang dari Kulit dan Alas Kaki/ Manufacture of Leather and Related Products, and Footwear	-	-	-	-
4. Industri Kayu/Manufacture of Wood Products	9	13.218	10	-
5. Industri Kertas, Barang Kertas dan Pencetakan/ Manufacture of Paper and Printing	2	60.848.970	409	-
6. Industri Kimia Dasar, Barang Kimia dan Farmasi/ Manufacture of Chemicals and Pharmaceuticals Products	12	10.052.126	2	-
7. Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik/ Manufacture of Rubberand Plastics Products	4	10.052.126	2	-
8. Industri Mineral Non Logam/Manufacture of Non-Metallic Mineral	3	10.052.126		-
9. Industri Logam Dasar, Barang Logam, Mesin dan Elektronik/Manufacture of Metal, Machineryand Electronics	18	20.303.204	42	-

Lanjutan Tabel 6.6.5

Bidang Usaha	Jumlah Proyek	Realisasi Investasi (Juta)	Tenaga Kerja	
			Indonesia	Asing
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
10. Industri Instrumen Kedokteran,Presisi, Optik dan Jam/ Manufacture of Medical, Precision, Optical and Clock Instruments	11	273.574		-
11. Industri Alat Angkutan dan Transportasi Lainnya/ Manufactured of Motorized Vehicle and Other Transportation Equipment	6	240	2	-
12. Industri Lainnya/OtherManufacturing	9	330.875		-
III. SEKTOR TERSIER/TERTIARY SECTOR				
1. Listrik, Gas dan Air /Electricity, Gas and Water	11	4.275.637	-	-
2. Konstruksi/Construction	21	199.171	15	-
3. Perdagangan & Reparasi / Trade & Repair	246	3.249.357	18	-
4. Hotel dan Restoran / Hotel and Restaurant	55	578.647	13	-
5. Transportasi, Gudang & Komunikasi/Transportation, Storage, and Communication	71	1.814.071	30	1
6. Perumahan, Kawasan Industri & Perkantoran/ Housing, Industrial Estate & Office Buildings	27	3.941.684	1	-
7. Jasa Lainnya/Other Services Activities	86	4.152.417	39	3
Jumlah/Total	**881**	**257.641.161**	**3794**	**10**

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 6.6.6 Realisasi Proyek Penanaman Modal Asing Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur, April-Juni 2025

Bidang Usaha	Jumlah Proyek	Realisasi Investasi (Rp)	Tenaga Kerja	
			Indonesia	Asing
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kabupaten				
1. Paser	14	7.003.948.968	190	-
2. Kutai Barat	30	112.181.950.620	783	3
3. Kutai Kartanegara	82	495.151.419.830	1.042	2
4. Kutai Timur	64	458.917.241.157	732	3
5. Berau	58	1.397.491.296.512	431	-
6. Penajam Paser Utara	25	85.165.503.854	44	-
7. Mahakam Ulu	5	31.272.721.040	28	-
Kota				
1. Balikpapan	366	335.648.070.787	126	2
2. Samarinda	104	9.740.601.254	24	-
3. Bontang	17	14.658.959.053	-	-
Kalimantan Timur	**765**	**2.947.231.713.075**	**3.400**	**10**

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 6.6.7 Jumlah Realisasi Investasi di Provinsi Kalimantan Timur, 2014-2024

Tahun	Jumlah Proyek	Realisasi Investasi (Rupiah)
(1)	(2)	(3)
2014	357	37.872.764.871.600
2015	563	39.379.341.850.000
2016	714	23.312.967.480.000
2017	923	28.202.106.080.000
2018	1.033	33.814.483.540.000
2019	3.130	35.620.544.100.000
2020	4.702	80.377.920.480.000
2021	10.325	41.177.159.120.000
2022	7.711	57.765.915.399.500
2023	17.481	71.895.812.580.000
2024	27.761	76.330.000.000.000

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 6.6.8 Jumlah Realisasi Investasi di Provinsi Kalimantan Timur, 2014-2024

Tahun	Jumlah Tenaga Kerja yang Bekerja pada Perusahaan PMA danPMDN	Jumlah Proyek PMA dan PMDN	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja
(1)	(2)	(3)	(4)
2015	91.522	563	162,56
2016	51.607	714	72,28
2017	24.355	923	26,39
2018	25.801	1.033	24,98
2019	36.244	4.702	7,71
2020	25.990	4.702	5,53
2021	27.405	10.325	2,65
2022	56.423	7.711	7,32
2023	50.786	17.481	2,91
2024	70.419	27.761	2,54
2025	17.836	15.193	1,17

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 6.6.9 Jumlah Perizinan Berusaha OSS RBA Menurut Sektor Usaha di Provinsi Kalimantan Timur, Januari-September 2025

Sektor Usaha	Total
(1)	(2)
Lingkungan Hidup	683
Perhubungan	70
Energi dan Sumber Daya Mineral	58
Kelautan dan Perikanan	956
Komunikasi dan Digital	2
Pariwisata	8
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2
Pertanian	57
Perindustrian	463
Kesehatan	4
Kehutanan	3
Total	**2.306**

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur

PROFIL DATA STATISTIK SEKTORAL PROVINSI

Kalimantan Timur Tahun 2026



KERUSAKAN KAWASAN AKIBAT BENCANA ALAM DI KALIMANTAN TIMUR



PUTING BELIUNG
0 UNIT



TANAH LONGSOR
206 UNIT



BANJIR
39.554 UNIT



KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
323,07 HEKTAR



KEBAKARAN RUMAH
817 UNIT

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur



BAB VII
PENANGGULANGAN BENCANA DAN SATPOL PP

7.1 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Kalimantan Timur merupakan perangkat daerah yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik. Berdasarkan peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 83 Tahun 2016, Kesbangpol berada di bawah Gubernur dan bertanggung jawab melalui Sekretaris Dearah. Dalam pelaksanaan tugasnya, badan ini berperan dalam menjaga stabilitas daerah, memperkuat persatuan dan kesatuan masyarakat, serta mendukung terciptanya kehidupan politik yang aman dan kondusif. Adapun fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur meliputi:

1. Menyusun program dan rencana kerja badan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan
2. Merumuskan kebijakan teknis serta melaksanakan pembinaan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, karakter bangsa, politik dalam negeri, ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama, organisasi kemasyarakatan, penanganan konflik, dan kewaspadaan nasional
3. Melaksanakan fasilitas dan koordinasi dalam penyelenggaraan urusan kesatuan bangsa dan politik sesuai dengan bidang kewenagannya
4. Melakukan pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan terhadap pelaksanaan kebijakan dan kegiatan di bidang kesatuan bangsa dan politik

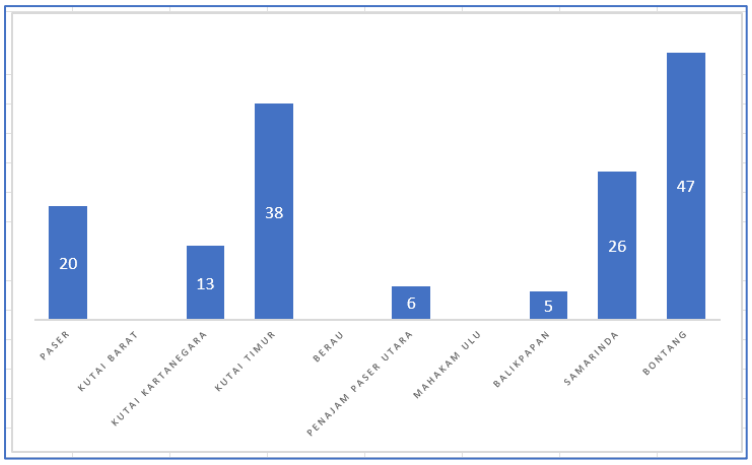




5. Menyelenggarakan administrasi dan kegiatan kesekretariatan untuk mendkung kelancaran pelaksaan tugas badan
6. Menyusun laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsi badan.

Salah satu bentuk pelaksanaan fungsi kewaspadaan dini dilakukan melalui forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM). FKDM merupakan wadah yang melibatkan berbagai unsur masyarakat dalam upaya meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gangguan yang dapat mempengaruhi keamanan, ketentraman, dan stabilitas lingkungan. Keberadaan FKDM di tingkat kabupaten/kota menjadi salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam mendudukung terciptanya kondisi daerah yang aman dan kondusif. Grafik berikut menunjukkan jumlah anggota FKDM pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur.

Grafik 7.1.1 Jumlah Anggota Forum Kewaspadaan Dini Se-Provinsi Kalimantan Timur, 2025



Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur

Berdasarkan grafik, jumlah anggota FKDM di Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan sebaran yang cukup berbeda antar Kabupaten/Kota. Kota Bontang mencatat jumlah tertinggi sebanyak 47 anggota, disusul Kabupaten Kutai Timur sebanyak 38 anggota dan Kota Samarinda sebanyak 26 anggota. Ketiga wilayah tersebut secara bersama-sama mencakup lebih dari 70 persen dari seluruh anggota yang tercatat pada grafik, sehingga terlihat adanya konsentrasi keanggotaan FKDM pada beberapa wilayah tertentu. Sementara itu, Kabupaten Paser dan Kutai Kartanegara berada pada kelompok menengah dengan masing-masing 20 dan 13 anggota, sedangkan Penajam Paser Utara dan Balikpapan memiliki jumlah yang relatif lebih sedikit, yaitu 6 dan 5 anggota. Adapun Kutai Barat, Berau, dan Mahakam Ulu belum menunjukkan jumlah anggota yang tercatat.

Tabel 7.1.1 Jumlah Lembaga Swadaya Masyarakat Tahun 2021-2025

Kategori	Tahun				
	2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Jumlah LSM Daerah	2	1	0	9	36
Jumlah LSM Nasional	0	0	0	-	-
Jumlah LSM Asing/Internasional yang Beroperasi di Daerah	0	0	0	0	0
Jumlah LSM Aktif	27	0	0	9	36
Jumlah LSM Tidak Aktif	179	1	0	0	0
Jumlah LSM Terdaftar	206	0	0	9	36

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 7.1.2 Jumlah Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2024

Keterangan	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Jumlah Anggota DPRD	385	385	385	385	385	55	Orang
Komposisi Anggota DPRD Berdasarkan Jenis Kelamin							
- Laki-Laki	317	332	332	332	332	47	Orang
- Perempuan	68	68	68	68	68	8	Orang
Jumlah Fraksi DPRD	8	8	8	8	8		
Partai Politik							
- Jumlah Parpol Peserta Pemilu	16	16	16	16	16	24	Partai

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 7.1.3 Jumlah Kegiatan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2024

Kegiatan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Sosialisasi Inpres No. 2 Tahun 2020 ke Toga, Tomas, Toda dan Tokoh Pemuda	Kegiatan	1				
Rapat Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika	Kegiatan	4	2	1		
Sosialisasi Pencegahan, Pemberanyasan dan Penyalahangunaan dan peredaran gelap narkotika (P4GN) di Kab. Kutim	Kegiatan		1			
tes Urine Bagi PNS dan Non PNs di Lingkungan Pemprov Kaltim	Kegiatan			1	3	

Sosialisasi Pencegahan, Pemberanyasan dan Penyalahangunaan dan peredaran gelap narkotika (P4GN) di Kab. PPU	Kegiatan	1		
Rapat Penyusunan Rancangan Pergub P4Gn & PN di Kaltim	Kegiatan	1		
Kegiatan Sosialisasi Pencegahan, Pemberantasan dan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN & PN) kepada Pemuda, Tokoh Agama dan Ormas	Kegiatan		2	
Rapat Tim Terpadu Percepatan Rehabilitasi Bagi Pecandu dan Penyalahgunaan Narkotika Wilayah Kaltim				2
Kegiatan Pemeriksaan Napza bagi ASN dan Non ASN di Lingkungan OPD Provinsi Kalimantan Timur				1

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan

Tabel 7.1.4 Jumlah Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) se-Provinsi Kalimantan Timur, 2025

Kabupaten/Kota	Satuan	Jumlah Anggota	No SK	Tanggal SK	Masa Berlaku
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Paser	Orang	20	489/208/HK-KS/V/2020	20 Mei 2020	2020-2025
Kutai Barat	Orang		188.45/362/BAKESBANGPOL/2021	29 Juli 2021	2021-2026
Kutai Kartanegara	Orang	13	188.45-206/2018	7 Juni 2018	2018-2022
Kutai Timur	Orang	38	135/SK-BUP/HK/2022	24 Maret 2022	2019-2023
Berau	Orang				
Penajam Paser Utara	Orang	6	223/K.707/2019	20 Desember 2019	2019-2022
Mahakam Ulu	Orang		220/237/2019	30 Desember 2019	2019-2023
Balikpapan	Orang	5	134.3/KEP-67/2022	24 Januari 2022	2020-2024
Samarinda	Orang	26	100.3.3.1/K.26/2024	14 Februari 2024	2024-2028
Bontang	Orang	47	800.05.300/K.152/2021		
Provinsi Kalimantan Timur	Orang		220/K.248/2015		

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 7.1.5 Data Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Se-Provinsi Kalimantan Timur, 2022-2024

Kab/Kota	Satuan	No SK	TGL SK	Masa Berlaku	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)
Paser	SK	134.3/KEP-282/2022	18/04/2022	2019 - 2024	Sudah Terbentuk	Sudah Terbentuk	Sudah Terbentuk
Kutai Barat	SK	800.05.450/K.752/2021	8/4/2021	2021 - 2024	Sudah Terbentuk	Sudah Terbentuk	Sudah Terbentuk
Kutai Kartanegara	SK	102/SK-BUP/HK/2021	17/03/2021	2021 - 2026	Sudah Terbentuk	Sudah Terbentuk	Sudah Terbentuk
Kutai Timur	SK	223/K.537/2022	16/06/2022	2019 - 2022	Sudah Terbentuk	Sudah Terbentuk	Sudah Terbentuk
Berau	SK	353 TAHUN 2021	3/9/2021	2021 - 2026	Sudah Terbentuk	Sudah Terbentuk	Sudah Terbentuk
Penajam Paser Utara	SK	223.05/227/2018	19/07/2018	2018 - 2023	Sudah Terbentuk	Sudah Terbentuk	Sudah Terbentuk
Mahakam Ulu	SK	800.300/K.141/2022	6/9/2022	2022 - 2027	Sudah Terbentuk	Sudah Terbentuk	Sudah Terbentuk
Balikpapan	SK	118.45-107/2020	5/3/2020	2020 - 2025	Sudah Terbentuk	Sudah Terbentuk	Sudah Terbentuk
Samarinda	SK	220/226/HK-KS/IV/2022	5/4/2022	2022 - 2026	Sudah Terbentuk	Sudah Terbentuk	Sudah Terbentuk
Bontang	SK	199/2017	199/2017	2017 - 2022	Sudah Terbentuk	Sudah Terbentuk	Sudah Terbentuk
Provinsi Kalimantan Timur	SK	450/K.349/2022	31/05/2022	2022 - 2027	Sudah Terbentuk	Sudah Terbentuk	Sudah Terbentuk

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 7.1.6 Data Pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) se-Provinsi Kalimantan Timur, 2023-2025

Kab/Kota	Satuan	2023	2024	2025	No SK
(1)	(2)	(5)	(6)	(6)	(7)
Kota Samarinda	SK	Sudah Terbentuk	Sudah Terbentuk	Sudah Terbentuk	SK Walikota Samarinda No : 220.05/169/HK-KS/IV/2020
Kota Bontang	SK	Sudah Terbentuk	Sudah Terbentuk	Sudah Terbentuk	SK Walikota Bontang No. 188.45/525/BAKESBANGPOL /2020
Kota Balikpapan	SK	Sudah Terbentuk	Sudah Terbentuk	Sudah Terbentuk	No : 188.45-168/2016
Kab. Kutai Kartanegara	SK	Sudah Terbentuk	Sudah Terbentuk	Sudah Terbentuk	No. SK Pengurus : 185/SK-BUP/HK/2018
Kab. Kutai Barat	SK	Sudah Terbentuk	Sudah Terbentuk	Sudah Terbentuk	SK Bupati Kubar No. 800.05.300/K.230/2020
Kab. Kutai Timur	SK	Sudah Terbentuk	Sudah Terbentuk	Sudah Terbentuk	No : 200/K.656/2016
Kab. Penajam Paser Utara	SK	Sudah Terbentuk	Sudah Terbentuk	Sudah Terbentuk	No : 700/226/2018
Kab. Paser	SK	Sudah Terbentuk	Sudah Terbentuk	Sudah Terbentuk	No : 340/KEP-479/2017
Kab. Berau	SK	Sudah Terbentuk	Sudah Terbentuk	Sudah Terbentuk	No. SK Pengurus : 614 tahun 2016
Kab. Mahakam Ulu	SK	Sudah Terbentuk	Sudah Terbentuk	Sudah Terbentuk	No : 800.200/K.184/2022
Provinsi Kalimantan Timur	SK	Sudah Terbentuk	Sudah Terbentuk	Sudah Terbentuk	No SK 188.44/K/397/2020

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur

7.2 Satuan Polisi Pamong Raja

Satuan Polisi Pamong Praja yang pada masa dahulu dikenal dengan sebutan Bailluw merupakan organisasi yang memiliki hubungan erat dengan masyarakat. Hak ini karena salah satu peran utamanya adalah menjaga ketertiban umum serta menciptakan ketentraman di tengah masyarakat. Dalam perkembangannya, organisasi ini telah mengalami beberapa kali perubahan nama menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan pada setiap masa. Polisi Pamong Praja pertama kali dibentuk di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan nama Detasemen Polisi Penjaga Kapanewon. Namun, belum genap satu bulan sejak pembentukannya, berdasarkan perintan Jawatan Praja Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 tahun 1948 tanggal 10 November 1948, nama tersebut diubah menjadi Detasemen Polisi Pamong Praja. Seiring berjalannya waktu, jumlah penduduk dalam suatu wilayah terus mengalami perumbuhan dan perkembangan. Kondisi tersebut mendorong perlunya pengaturan yang semakin baik dari pemerintah untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang berpotensi mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di wilayah kerjanya. Atas dasar kebutuhan tersebut, Menteri Dalam Negeri pada tanggal 3 Maret 1950 menerbitkan Surat keputusan Nomor UR 32/2/21 mengenai perubahan nama Detasemen Polisi Pamong Praja. Surat keputusan tersebut kemudian menjadi dasar ditetapkannya tanggal 3 Maret sebagai Hari Jadi Satuan Polisi Pamong Praja yang diperingati setiap tahun. Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja semakin diperkuat setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah.



Dalam pasal 13 disebutkan bahwa salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi adalah penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, termasuk perlindungan masyarakat. Selain itu, Pasal 148 menetapkan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai salah satu perangkat daerah.

Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menjadi salah satu landasan yang memperkuat keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam Pelaksaan pemerintah daerah. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur merupakan bagian dari perangkat daerah yang berperan dalam mendukung pelaksanaan pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur.

Satpol PP mempunyai tugas utama untuk menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur menyelenggarakan beberapa fungsi, yaitu:

1. Menyusun program dan melaksanakan kegiatan penegakan Peraturan Dearah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, serta perlindungan masyarakat.





2. Melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah
3. Melaksanakan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat daerah
4. Melaksanakan kebijakan di bidang perlindungan masyarakat
5. Melaksanakan koordinasi dalam penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat bersama kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyindik Pegawai Negeri Sipil Daerah dan aparatur lainnya.
6. Melaksanakan pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, maupun badan hukum agar mematuhi dan menaati peraturan daerah serta peraturan kepala daerah.
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan kewenangannya

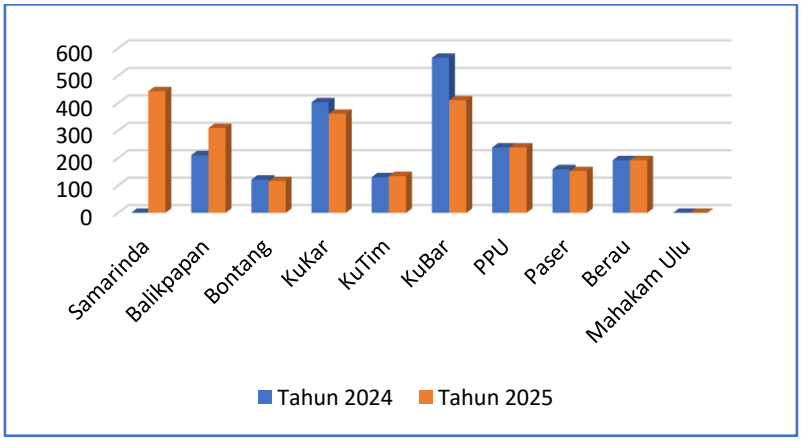
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur juga memiliki tujuan yang menjadi kondisi yang ingin diwujudkan dalam kurun waktu lima tahun. Tujuan utama tersebut adalah terwujudnya ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat di Provinsi Kalimantan Timur.

Sementara itu, sasaran merupakan gambaran kondisi yang ingin dicapai sebagai bentuk keberhasilan pelaksanaan tujuan pembangunan daerah maupum perangkat daerah. Sasaran tersebut diperoleh melalui pencapaian hasil atau outcome dari berbagai program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah. Adapun

sasaran jangka menengah yang ingin dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur meliputi:

1. Meningkatnya penegakan produk hukum daerah
2. Terselenggaranya ketentraman dan ketertiban umum
3. Terselenggaranya perlindungan masyarakat
4. Terlaksananya penanganan kebakaran

Grafik 7.2.1 Jumlah Aparat Satuan Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2025



Grafik menunjukkan bahwa jumlah aparat Satuan Polisi Pamong Praja di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2024–2025 mengalami perubahan yang beragam antar kabupaten/kota. Beberapa wilayah mengalami peningkatan, seperti Paser dari 210 menjadi 309 aparat, sedangkan penurunan cukup terlihat di Kutai Timur dari 565 menjadi 410 aparat. Sementara itu, beberapa daerah cenderung stabil, seperti Penajam Paser Utara yang tetap sebanyak 238 aparat. Secara umum, jumlah aparat Satpol PP pada tahun 2025 masih berbeda cukup nyata antarwilayah di Kalimantan Timur.

Tabel 7.2.1 Data Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kaltim Tahun 2024 dan 2025

Daftar Data	Satuan	Tahun	
		2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)
Jumlah Penyelesaian Penegakan Perda	Kasus	2.771	3.623
Jumlah Pelanggaran Perda	Kasus	2.771	3.670
Jumlah Kasus	Kasus	2.771	3.670
Rasio Penegakan Perda	%	100	50
Jumlah Aparat Satuan Pamong Praja	Orang	2.618	3.955
Jumlah Aparat Satuan Pamong Praja Provinsi	Orang	166	214
Jumlah Aparat Satuan Pamong Praja Kabupaten/Kota	Orang	2.452	1.912
Jumlah Petugas Perlindungan Masyarakat	Orang	9.245	10.463
Jumlah Petugas Perlindungan Masyarakat Provinsi (Satgaslinmas)	Orang	30	40
Jumlah Petugas Perlindungan Masyarakat Kabupaten/Kota (Satgaslinmas)	Orang	1.280	411
Jumlah Petugas Perlindungan Masyarakat Kecamatan/Kelurahan (Satlinmas)	Orang	2.258	4.053
Jumlah Petugas Perlindungan Masyarakat Desa/Kampung (Linmas)	Orang	2.677	7.691
Jumlah Pos Siskamling	Unit	3.761	4.313
Rasio Pos Siskamling Per Jumlah Desa	%	34,13	248.59
Jumlah Pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	Kasus	6.099	3.201
Jumlah Penyelesaian Pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	Kasus	5.197	3.155
Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	Kasus	5252	84,38
Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk	Rasio	0,26	6,00

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 7.2.2 Indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tahun 2022-2024

Indikator	2022	2023	2024	2025	Satuan
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Angka Pelayanan Publik	81,42	87,63	100	56,35	Indeks
Jumlah Aduan Warga, Aparatur dan Badan Hukum Terhadap Adanya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	4	0	216	1.260	Kasus
Jumlah pencegahan gangguan trantibum	100	50	3.325	8.404	Kegiatan
Jumlah penindakan atas gangguan trantibum	100	50	1.452	2.563	Kasus
Jumlah anggota satuan perlindungan masyarakat yang sudah terlatih	2492	2492	9.942	12.113	Orang

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 7.2.3 Indikator Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2023

Indikator	2021	2022	2023	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (%)	80	100	65	%
Persentase Pengamanan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Penyelenggaraan Penjagaan Pengawalan dan Patroli (%)	70	100	50	%
Meningkatnya Kapasitas Satlinmas di daerah Terbantunya pelaksanaan Perlindungan masyarakat (%)	100	100	38	%
Pencegahan dan pengendalian serta pelatihan dan Pembinaan dibidang kebakaran (%)	50	100	34	%

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 7.2.4 Jumlah Aparat Satuan Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 dan 2025

Aparat	Tahun	
	2024	2025
(1)	(2)	(3)
Kota Samarinda	0	443
Kota Balikpapan	210	309
Kota Bontang	121	116
Kabupaten Kutai Kartanegara	403	361
Kabupaten Kutai Timur	130	134
Kabupaten Kutai Barat	565	410
Kabupaten Penajam Paser Utara	238	238
Kabupaten Paser	159	152
Kabupaten Berau	192	192
Kabupaten Mahakam Ulu	0	0

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur

7.3 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

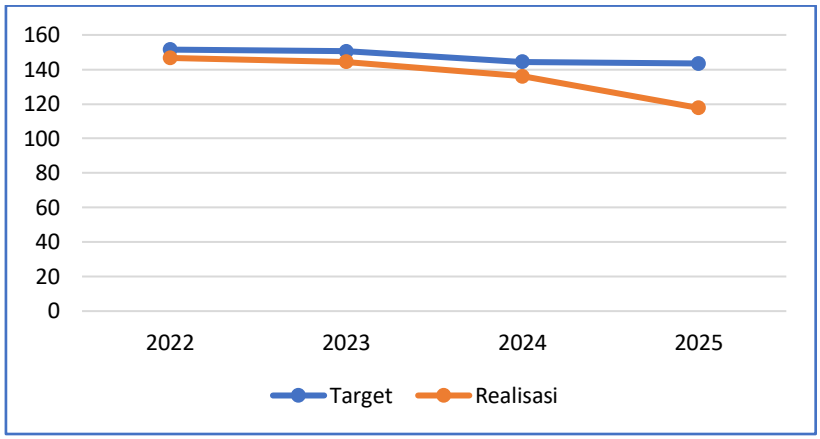
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Timur dibentuk sebagai bagian dari penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Sebelum BPBD terbentuk, pelaksanaan penanganan bencana di Kalimantan Timur dilaksanakan oleh Satuan Koordinasi Pelaksana Penanganan Bencana dan Pengungsi (Satkorlak PBP). Pembentukan BPBD kemudian memperkuat kelembagaan penanggulangan bencana agar pelaksanaannya dapat dilakukan secara lebih terarah, terpadu, dan terkoordinasi. BPBD Provinsi Kalimantan Timur memiliki visi **"**Terwujudnya masyarakat Kalimantan Timur yang tangguh dalam menghadapi bencana**."** Untuk mewujudkan visi tersebut, BPBD menjalankan misi berupa perlindungan masyarakat dari ancaman bencana melalui pengurangan risiko bencana, pembangunan sistem penanggulangan bencana yang andal, serta penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh.

Dalam menjalankan tugasnya, BPBD berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah serta dipimpin oleh Kepala Badan yang dijabat oleh Sekretaris Daerah. Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 43 Tahun 2023, BPBD mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis bidang penanggulangan bencana daerah sesuai rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah.
2. Perencanaan, pengoordinasian, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis bidang penanggulangan bencana daerah.
3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum penanggulangan bencana daerah.
4. Pengarahan pelaksanaan tugas bawahan sesuai tugas, tanggung jawab, permasalahan, hambatan, dan ketentuan yang berlaku.
5. Perumusan, perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis bidang pencegahan dan kesiapsiagaan.
6. Perumusan, perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis bidang kedaruratan dan logistik.
7. Perumusan, perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis bidang rehabilitasi dan rekonstruksi.

8. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan.
9. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional.
10. Pelaksanaan fungsi dan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur yang berkaitan dengan tugasnya.

Grafik 7.3.1 Target dan Realisasi Indeks Risiko Bencana Provinsi Kalimantan Timur



Target dan realisasi Indeks Risiko Bencana di Provinsi Kalimantan Timur selama periode tahun 2022-2025 menunjukkan kecenderungan menurun. Nilai target mengalami penurunan secara bertahap dari sekitar 151 pada tahun 2022 menjadi sekitar 143 pada tahun 2025. Sementara itu, nilai realisasi juga menurun dari sekitar 147 pada tahun 2022 menjadi sekitar 118 pada tahun 2025, dengan penurunan yang lebih tajam terutama pada periode 2024-2025. Nilai realisasi berada di bawah nilai target dan selisih keduanya semakin besar pada tahun 2025. Dengan demikian, perkembangan ini memperlihatkan bahwa capaian aktual penurunan risiko bencana di Kalimantan Timur bergerak lebih rendah dibandingkan target yang telah ditetapkan, terutama pada tahun 2025.

Tabel 7.3.1 Data Bencana Alam Provinsi Kalimantan Timur 2021-2025

Daftar Data	2021	2022	2023	2024	2025	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jumlah pengungsi akibat bencana						
1). Banjir	1.708	608	0	5.899	255	orang
2). Longsor	1	0	1	0	23	orang
3). Gempa	0	0	0	0	0	orang
4). Tsunami	0	0	0	0	0	orang
5). Konflik	0	0	0	0	0	orang
Jumlah Kabupaten lokasi	7	7	7	7	7	lokasi
Jumlah Kota Lokasi	3	3	3	3	3	lokasi
Jumlah pengungsi yang telah kembali	1.709	608	0	5.899	278	orang
Jumlah korban bencana alam					163.350	
1). Meninggal	3	0	0	1	79	orang
2). Hilang	0	0	0	0	22	orang
3). Luka-luka	1	0	24.863	4	58	orang
Jumlah lokasi bencana	245	452	188	528	58	lokasi
1). Jumlah Kabupaten lokasi bencana	7	7	7	7	7	Kabupaten
2). Jumlah Kota lokasi bencana	3	3	3	3	3	Kota
3). Jumlah Kecamatan lokasi bencana	67		54	89	105	Kecamatan
Persentase Penanganan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana	80	100	100	100	100	%
Jumlah Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Yang Terbentuk dan Memperoleh Peringatan Dini Bencana	4	12	13	0	0	Desa/ Kelurahan
Persentase Peningkatan Kapasitas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	56	100	100	100	100	%

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 7.3.2 Frekuensi Terjadinya Bencana Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2025

Jenis Bencana	2021	2022	2023	2024	2025	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kebakaran	210	247	270	287	259	Kali/Tahun
Kebakaran Hutan dan lahan	52	30	604	236	34	Kali/Tahun
Tanah Longsor	83	108	59	55	149	Kali/Tahun
Banjir	90	328	175	221	268	Kali/Tahun
Puting Beliung	7	14	14	9		Kali/Tahun
Konflik	0	0	0	0	0	Kali/Tahun
Kecelakaan Transportasi Udara	0	0	0	0	0	Kali/Tahun
Kecelakaan Transportasi Sungai Laut	21	33	4	20	0	Kali/Tahun
Wabah Penyakit	0	1	0	0	0	Kali/Tahun
Gempa Bumi	0	2	10	5	60	Kali/Tahun
Gelombang Tinggi / Tsunami	0	0	1	2	0	Kali/Tahun
Abrasi	2	0	0	0	0	Kali/Tahun
Orang Tenggelam	29	40	36	39	0	kali/Tahun
Lain-lain	21	54	81	35	45	Kali/Tahun
Frekuensi Terjadinya Bencana Gelombang Pasang					2	Kali/Tahun
Frekuensi Terjadinya Bencana Gagal Teknologi					0	Kali/Tahun
Frekuensi Terjadinya Bencana Konflik					0	Kali/Tahun
Frekuensi Terjadinya Bencana Tenggelam					0	Kali/Tahun
Total Kejadian Bencana	**515**	**857**	**1254**	**909**	**817**	**Kali/Tahun**

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 7.3.3 Kawasan Rawan Bencana Alam Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2025

Elemen Data	2021	2022	2023	2024	2025	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jumlah Kawasan Rawan Longsor	6	8	8	5	10*	Kab/Kot
Jumlah Kawasan Rawan Banjir	9	10	10	9	10*	Kab/Kot
Jumlah Kawasan Rawan Angin topan	3	6	7	6		Kab/Kot
Jumlah Kawasan Rawan Kebakaran	10	10	10	10		Kab/Kot
Jumlah Kawasan Rawan Gempa Bumi	0	2	6	2	10*	Kab/Kot
Jumlah Kawasan Rawan Gelombang Pasang	0	0	1	2	7*	Kab/Kot
Jumlah Kawasan Rawan Gagal Teknologi	0	0	0	0	7*	Kab/Kot
Jumlah Kawasan Rawan Konflik	0	0	0	0	10	Kab/Kot
Jumlah Kawasan Rawan Tenggelam	9	9	9	8		Kab/Kot
Jumlah Kawasan Rawan Tsunami	0	0	0	0	10*	Kab/Kot
Jumlah Kawasan Rawan Banjir Bandang	0	0	0	0	7*	Kab/Kot
Jumlah Kawasan Rawan Cuaca Ekstrim	0	0	0	0	10*	Kab/Kot
Jumlah Kawasan Rawan Karhutla	0	0	0	0	10*	Kab/Kot
Jumlah Kawasan Rawan Kekeringan	0	0	0	0	10*	Kab/Kot
Jumlah Kawasan Rawan Evidemi dan Wabah Penyakit	0	0	0	0	7*	Kab/Kot
Jumlah Kawasan Rawan Likuefaksi	**0**	**0**	**0**	**0**	**2***	**Kab/Kot**

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur

*Sumber: Data Dokumen KRB Prov Kaltim Tahun 2022-2026

Tabel 7.3. 4 Kerusakan Kawasan Akibat Bencana di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2025

Daftar Data	2021	2022	2023	2024	2025	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Longsor	106	124	62	76	206	Unit
Banjir	7.129	27.189	9.770	7.873	39.554	Unit
Angin Topan / Puting Beliung	42	64	114	86	0	Unit
Kebakaran hutan dan lahan	93.303	52	2.750,91	1.590,69	323,07	Ha
Kebakaran Pemukiman	552	886	918	1.113	817	Unit
Gempa bumi	0	0	0	0	0	Unit
Gelombang Pasang	0	0	0	0	0	Unit
Gagal Teknologi	0	0	0	0	0	Unit
Konflik	0	0	0	0	0	Unit
Tenggelam	31	27	36	38	0	Jiwa
Ciuaca Ekstrim	0	0	0	0	45	Unit

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalim

PROFIL DATA STATISTIK SEKTORAL PROVINSI

Kalimantan Timur Tahun 2026



16,05 JUTA

PERJALANAN WISATAWAN NUSANTARA di Kalimantan Timur Tahun 2025

29.323

TENAGA KERJA SEKTOR PARIWISATA di Kalimantan Timur Tahun 2025

Orang

Perkembangan Jumlah Pramuwisata dan Toko Cinderamata di Kalimantan Timur Tahun 2016–2025





BAB VIII

TELEKOMUNIKASI DAN PARIWISATA

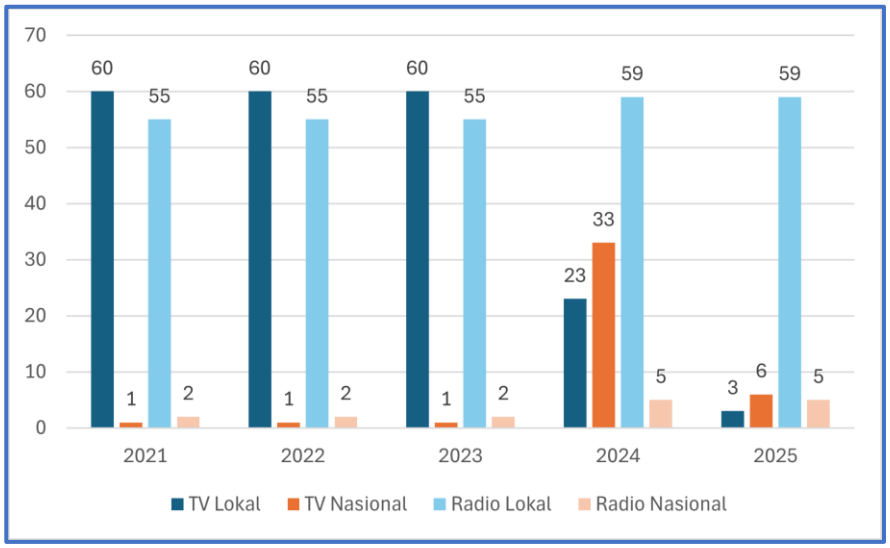
8.1 Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timu

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) memiliki tugas pokok dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang komunikasi dan informatika berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Dalam menjalankan tugas tersebut, Diskominfo melaksanakan berbagai fungsi yang berkaitan dengan penyelenggaraan komunikasi dan informatika di lingkungan pemerintah daerah.

Salah satu fungsi utama Diskominfo adalah merumuskan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Selain itu, Diskominfo juga melaksanakan perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis yang mencakup teknologi informasi, aplikasi telematika, dokumentasi dan informasi, serta layanan pos dan telekomunikasi.

Diskominfo juga bertanggung jawab dalam penyelenggaraan urusan kesekretariatan dan pembinaan kelompok jabatan fungsional, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya. Melalui pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, Diskominfo berperan dalam mendukung pengelolaan komunikasi dan informasi, sekaligus mendorong perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di daerah.

Grafik 8.1.1 Jumlah Penyiaran Media Elektronik Yang Masuk ke Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2025





Grafik tersebut menggambarkan jumlah penyiaran media elektronik di Provinsi Kalimantan Timur selama periode 2021–2025 yang terdiri atas TV Lokal, TV Nasional, Radio Lokal, dan Radio Nasional. Pada 2021 hingga 2023, jumlah TV Lokal tercatat stabil sebanyak 60, sedangkan TV Nasional hanya 1. Pada periode yang sama, Radio Lokal juga tetap sebanyak 55 dan Radio Nasional sebanyak 2.

Perubahan yang cukup besar mulai terlihat pada 2024. Jumlah TV Lokal menurun menjadi 23, sedangkan TV Nasional meningkat menjadi 33. Pada 2025, jumlah TV Lokal kembali menurun menjadi 3 dan TV Nasional menjadi 6. Sementara itu, Radio Lokal justru meningkat dari 55 pada 2023 menjadi 59 pada 2024 dan tetap bertahan pada angka tersebut hingga 2025. Radio Nasional juga meningkat dari 2 menjadi 5 pada 2024 dan tetap sama pada 2025.

Secara keseluruhan, perkembangan penyiaran media elektronik di Kalimantan Timur menunjukkan perubahan yang cukup mencolok terutama pada kategori televisi, sedangkan penyiaran radio cenderung lebih stabil. Radio Lokal menjadi kategori dengan jumlah terbanyak pada 2024 dan 2025, sementara TV Lokal mengalami penurunan cukup tajam dalam dua tahun terakhir. Data ini memberikan gambaran mengenai dinamika perkembangan media elektronik di Kalimantan Timur dari tahun ke tahun.

Tabel 8.1.1 Persentase Blankspot di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 – 2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Samarinda	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Balikpapan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bontang	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00
Kutai Kartanegara	24,00	24,00	15,03	15,03	15,03
Kutai Timur	25,00	25,00	21,01	21,01	21,01
Kutai Barat	46,00	46,00	39,47	39,47	39,47
Paser	29,00	29	23,19	23,19	23,19
Penajam Paser Utara	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00
Berau	38,00	38,00	17,17	17,17	17,17
Mahakam Ulu	6,00	6,00	6,12	6,12	6,12

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 8.1.2 Data Pos Telekomunikasi Provinsi Kaltim 2022–2025

Daftar Data	Tahun				
	2022	2023	2024	2025	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Jumlah Provider	5.487	6.672	6.986	6.986	Provider
Jumlah Pameran/Expo	2	5	3	7	Pameran
Ibukota Kecamatan yang terlayani Jaringan Telekomunikasi	103	103	103	441	Kecamatan
Jumlah Aplikasi yang terintegrasi	12	12	12	19	Aplikasi
Jumlah Jaringan Telepon Genggam	2.230	2.280	2.350	2.420	Jaringan
Jaringan Telepon (operator telp kabel)	88	90	92	95	Operator
Desa yang Terlayaninya Jaringan Telekomunikasi	753	761	769	775	Desa
Stasiun Radio	23	25	27	30	Stasiun
Website Daerah	52	58	64	70	Website

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 8.1.3 RPJMD Diskominfo Provinsi Kalimantan Timur, 2020–2024

Nama Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Persentase Siswa sekolah dan mahasiswa yang memiliki sertifikat kompetensi dibidang TIK	0,00	25,00	25,00	25,00	50,00
Jumlah lembaga yang mengembangkan media center informasi publik	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Persentase Indeks Kepuasan Pelayanan Informasi Publik	80,00	80,00	85,00	85,00	95,42
Cakupan Masyarakat yang memiliki akses terhadap pelayanan informasi	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,14	2,22	2,11	2,91	3,5
Persentase Perangkat Daerah yang memiliki sistem pengamanan data elektronik	70,00	70,00	71,50	71,50	78,30
Persentase Program/kegiatan dari hasil rekomendasi penelitian TIK yang dilaksanakan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 8.1.4 Jumlah Penyiaran Media Elektronik Yang Masuk, 2021– 2025

Daftar Data	Tahun				
	2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Jumlah Penyiaran Media Elektronik Yang Masuk	118	118	118	120	73
TV Lokal	60	60	60	23	3
Tv Nasional	1	1	1	33	6
Radio Lokal	55	55	55	59	59
Radio Nasional	2	2	2	5	5

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur

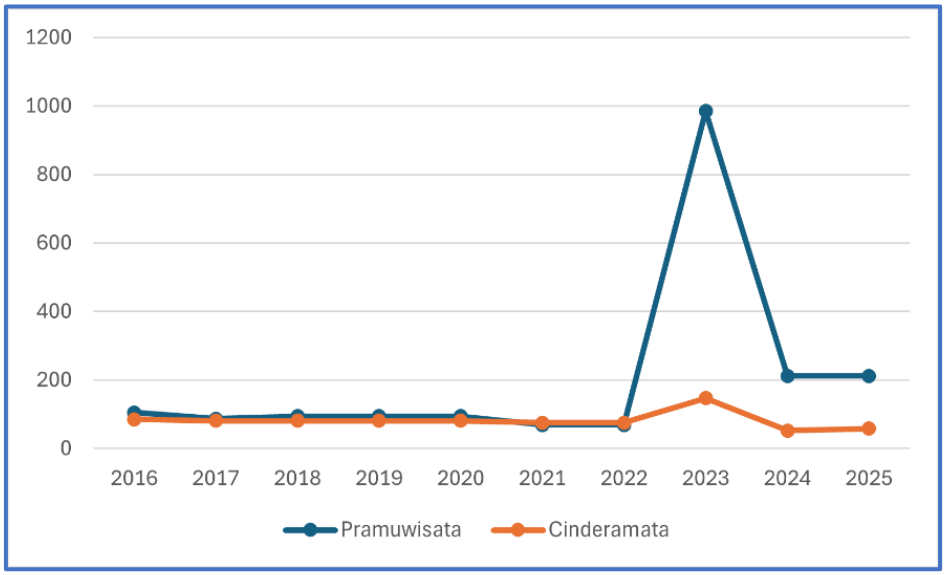
8.2 Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur

Dinas Pariwisata memiliki tugas dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis di bidang pariwisata, yang meliputi pengembangan destinasi, pemasaran pariwisata, pengendalian usaha jasa pariwisata, serta pengembangan seni dan budaya. Selain itu, Dinas Pariwisata juga berperan dalam melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan guna mendukung perkembangan destinasi serta pembangunan pariwisata di Kalimantan Timur.

Dalam pelaksanaannya, Dinas Pariwisata menyelenggarakan bimbingan teknis dan supervisi terhadap berbagai urusan pemerintahan di bidang pariwisata. Fungsi lainnya mencakup pembinaan, dukungan administrasi, pengelolaan barang milik negara, serta pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas di lingkungan dinas.

Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur juga mengoordinasikan penyusunan program dan rencana strategis, serta memantau pelaksanaan program pariwisata di kabupaten/kota. Kerja sama dengan instansi pemerintah maupun pihak lainnya turut dilakukan untuk mendukung keterpaduan pelaksanaan program. Melalui berbagai tugas tersebut, Dinas Pariwisata berperan dalam mendorong kemajuan sektor pariwisata serta meningkatkan kualitas dan daya saing pariwisata daerah.

Grafik 8.2.1 Data Pramuwisata dan Toko Cinderamata Provinsi Kalimantan Timur, Tahun 2016–2025



Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa jumlah pramuwisata dan toko cinderamata di Provinsi Kalimantan Timur mengalami peningkatan yang cukup besar pada Tahun 2023. Jumlah pramuwisata meningkat sangat signifikan, dari 69 orang pada Tahun 2022 menjadi 985 orang pada Tahun 2023. Sementara itu, jumlah toko cinderamata juga meningkat dari 75 unit menjadi 147 unit pada periode yang sama. Namun, pada Tahun 2024 jumlah pramuwisata menurun menjadi 212 orang dan tetap pada jumlah yang sama pada Tahun 2025, sedangkan toko cinderamata menurun menjadi 52 unit pada Tahun 2024 dan sedikit meningkat menjadi 58 unit pada Tahun 2025.

Secara keseluruhan, perkembangan jumlah pramuwisata dan toko cinderamata selama periode Tahun 2016–2025 menunjukkan kondisi yang relatif stabil pada beberapa tahun, kemudian mengalami peningkatan tajam pada Tahun 2023 sebelum kembali menurun pada Tahun 2024. Pada Tahun 2025, jumlah pramuwisata masih tetap sebanyak 212 orang, sedangkan jumlah toko cinderamata mulai mengalami sedikit peningkatan. Perkembangan tersebut menunjukkan adanya perubahan pada kegiatan pendukung sektor pariwisata di Kalimantan Timur, khususnya dari sisi penyediaan tenaga pramuwisata dan keberadaan usaha cinderamata.



Tabel 8.2.1 Jumlah Hotel Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019–2025

Jenis Hotel	Tahun						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Hotel Bintang Lima							
1. Jumlah hotel	5	5	5	5	5	4	4
2. Jumlah Kamar	1.038	1.038	1.038	1.038	3.518	882	732
3. Jumlah Tempat Tidur	461	784	784	784	868	604	784
Hotel Bintang Empat							
1. Jumlah hotel	16	16	14	14	19	19	20
2. Jumlah Kamar	2.646	2.646	2.646	2.646	5.126	5.126	5.228
3. Jumlah Tempat Tidur	2.764	2.764	2.764	2.764	2.844	6.218	6.316
Hotel Bintang Tiga							
1. Jumlah hotel	26	26	26	26	32	32	30
2. Jumlah Kamar	2.712	2.712	2.712	2.712	2.711	4.538	5.226
3. Jumlah Tempat Tidur	2.577	2.577	2.577	2.577	2.725	4.378	5.507
Hotel Bintang Dua							
1. Jumlah hotel	16	16	16	16	15	15	15
2. Jumlah Kamar	1.177	1.177	1.177	1.177	1.177	2.087	2.568
3. Jumlah Tempat Tidur	613	613	613	613	613	1.202	1.202
Hotel Bintang Satu							
1. Jumlah hotel	9	9	9	9	5	7	8
2. Jumlah Kamar	627	627	627	627	627	627	713
3. Jumlah Tempat Tidur	461	461	461	461	461	803	889
Hotel Non Bintang							
1. Jumlah hotel	420	413	413	413	333	339	351
2. Jumlah Kamar	5.050	5.903	5.050	7.004	7.004	-	-
3. Jumlah Tempat Tidur	1.449	1.449	1.449	3.409	3.409	7.663	7.673

Sumber: Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 8.2.2 Jumlah Objek Wisata di Provinsi Kalimantan Timur, 2021–2024

Uraian	Tahun			
	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Objek Wisata Alam	260	260	393	395
Objek Wisata Sejarah dan Budaya	177	177	244	244
Objek Wisata Buatan	150	150	244	246
Objek Wisata Kehidupan Masyarakat	54	54	59	61
Objek Wisata Bahari	48	48	120	120
Objek Wisata Taman Hutan Raya	7	7	12	12
Objek Wisata Nasional	4	4	7	7
Objek Wisata Taman Wisata Laut	64	64	66	66
Objek Wisata Hutan Mangrove	19	19	39	39
Objek Wisata Religi	26	26	54	54
Total Jenis Objek Wisata	**809**	**809**	**1238**	**1244**

Sumber: Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 8.2.3 Jumlah perusahaan atau agen biro perjalanan wisata di kaltim 2016–2023

Tahun	Jumlah Perusahaan/Cabang/Agen/Biro Perjalanan Wisata
(1)	(2)
2016	585
2017	1875
2018	457
2019	457
2020	448
2021	448
2022	448
2023	439

Sumber: Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Ti

Tabel 8.2.4 Jumlah Tenaga Kerja di Hotel berbintang Provinsi Kalimantan Timur Berdasarkan Akomodasi dan Jenis Kelamin Tahun 2024

Uraian	Jenis Akomodasi			
	Bintang		Non Bintang	
	Pria	Wanita	Pria	Wanita
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kabupaten Paser			49	95
Kabupaten Kutai Barat			129	85
Kabupaten Kutai Kartanegara	225	179	260	97
Kabupaten Kutai Timur	175	32	137	59
Kabupaten Berau	679	536	1.215	235
Kabupaten Penajam Paser Utara			82	62
Kabupaten Mahulu			12	9
Kota Balikpapan	2.828	1.409	302	143
Kota Samarinda	1.576	141	285	118
Kota Bontang	117	55	89	71

Sumber: Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 8.2.5 Data Pramuwisata dan Toko Cinderamata Provinsi Kalimantan Timur, 2016-2025

Tahun	Jumlah Pramuwisata	Toko Cinderamata
(1)	(2)	(3)
2016	105	85
2017	87	81
2018	94	81
2019	94	81
2020	94	81
2021	69	75
2022	69	75
2023	985	147
2024	212	52
2025	212	58

Sumber: Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 8.2.6 Data Jumlah Usaha Restoran dan Rumah Makan di Kalimantan Timur Tahun 2017–2023

Jenis Hotel	Tahun						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Jumlah Usaha Restoran dan Rumah Maka	2088	2085	2098	2098	2177	2177	4879

Sumber: Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
2026

Alamat Kantor:
Jl. Basuki Rahmat No. 41,
Sungai Pinang Luar, Kec. Samarinda Kota,
Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75121